WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 423 - 2024

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2024

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Solok Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Sistim dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Solok, maka perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah dengan dasar Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentag Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024;

6. Peraturan Wali kota Solok Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistim dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pengaturan secara teknis mengenai pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan oleh Inspektur .

KETIGA : Kepada Tim yang ditugaskan melakukan kegiatan pengawasan berupa pemeriksaan/audit (audit kinerja/audit operasional/audit Investigasi), reviu, evaluasi dan monitoring diberikan biaya operasional berupa perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam per hari dengan besaran:

a.	Penanggung Jawab	Rp150.000,-
b.	Wakil Penanggung Jawab	Rp140.000,-
c.	Pengendali Teknis	Rp130.000,-
d.	Ketua Tim	Rp120.000,-
e.	Anggota Tim Gol IV	Rp115.000,-
f.	Anggota Tim Gol III	Rp110.000,-
g.	Anggota Tim Gol II	Rp105.000,-
h.	Anggota Tim Kontrak/PTT/Sukarela	Rp100.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Perencanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 April 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
NOMOR : .....
TANGGAL : .....
TENTANG : **PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO TAHUN 2024**

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Hari Penugasan						Uang Harian	Transportasi	Total Anggaran	JUMLAH LHP	Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(13)
1	Pemeriksaan Investigatif/ PKKN	Monitoring Tindak Lanjut	Pelaporan Pemenuhan capaian target MCP KPK 2024	Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan	Sesuai dengan Tahapan Pelaporan MCP KPK Triwulan I, II, III dan IV		2	2	0	2	8	14	150000,0	-	2.100.000	1	IRBAN II			Mandatory
2	Capaian MCP KPK	Monitoring	Rencana Aksi MCP KPK	BKPSDM, Inspektorat, UKPBJ, BKD dan DPMPTSP	Sesuai dengan Tahapan Pelaporan MCP KPK Triwulan I, II, III dan IV		5	5	0	5	5	20	150.000	-	3.000.000	1	Irban III			Mandatory
3	Fasilitasi MR	Fasilitasi	RTP dan Penilaian Risiko se Kota Solok	Seluruh Perangkat Daerah	2024,01	2024,01	2	8	6	8	64	82	150.000	-	12.300.000	1	Sekretariat			Mandatory
4	Pengawasan Lainnya	Reviu SILPA FKTP	Laporan FKTP	Puskesmas	2024,01	2024,01	1	1	1	1	4	7	150.000	-	1.050.000	1	Irban III			Mandatory
5	Reviu DAK Bidang Kesehatan	Pengawasan Keuangan	AKI, AKB, STUNTING, PENGENDALIAN PENYAKIT, KEFARMASIAN	DINAS KESEHATAN	2024,01	2024,01	2	2	2	2	2	8	150.000	-	1.200.000	1	Irban III			Mandatory
6	Probity Audit	Pengawasan Tujuan Tertentu	Probity Audit Perencaan dan Pelaksanaan	2 Proyek Strategis	Sesuai Permintaan OPD		5	5	5	5	10	25	150.000	-	3.750.000	2	Irban III			Mandatory
7	Pengawasan Lainnya	Monitoring			Sesuai Permintaan OPD		6	6	6	6	12	30	150.000	-	4.500.000	3	Irban I			Mandatory
8	Evaluasi SAKIP	Pengawasan Kinerja	Evaluasi SAKIP OPD	Seluruh OPD	2024,01	2024,01	15	15	15	30	60	120	150.000	-	18.000.000	30	Irban I, II dan III			Mandatory
9	Pendampingan Pemeriksaan BPK	Monitoring dan Evaluasi	Inventarisir dokumen yang diminta oleh Tim BPK, mendampingi pemeriksaan ke lapangan Pemeriksaan Pendahuluan	LKPD Kota	2024,01	2024,02	5	5		5	30	45	150.000	-	6.750.000	1	Sekretariat			

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Hari Penugasan						Uang Harian	Transportasi	Total Anggaran	JUMLAH LHP	Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(13)
10	Pengawasan Lainnya	Monitoring dan Evaluasi	Auditee yanng telah diperiksa Tahun 2023	Seluruh OPD	2024,01	2024,01	2	2		2	4	10	150.000	-	1.500.000	1	Sekretariat			Mandatory
11	Pengawasan Lainnya	Monitoring	Gratifikasi	Seluruh OPD/Sekolah	Sesuai Keterjadian		6	6	6	6	6	24	150.000	-	3.600.000	3	Irban III			Mandatory
12	PK APIP	Pengawasan Tujuan tertentu	Pemenuhan Leveling APIP Pemda	Leveling APIP	2024,01	2024,06										1	Irban I			Mandatory
13	Pengawasan Lainnya	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	LKPD Kota Solok	2024,02	2024,02	5	5	5	5	40	55	150.000	-	8.250.000	1	Irban II		Risiko Tinggi	Mandatory
14	Pengawasan Lainnya	Reviu LPPD Kota Solok	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Bagian Administrasi Pemerintah	2024,02	2024,02	5	5	5	5	40	55	150.000	-	8.250.000	1	Irban II			Mandatory
15	Pengawasan Lainnya	Monitoring Persediaan	Laporan Persediaan Per 31 Desember 2023	UPTD Dinas Kesehatan	2024,02	2024,02	2	2		2	8	14	150.000	-	2.100.000	1	Sekretariat			
16	Dinas Pangan	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,02	2024,02	5	5	5	5	10	25	150.000	0	3.750.000	1	Irban I		Risiko Rendah	
17	Dinas Perhubungan	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan	2024,02	2024,02	5	5	5	5	10	25	150.000	0	3.750.000	1	Irban III		Risiko Rendah	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Hari Penugasan						Uang Harian	Transportasi	Total Anggaran	JUMLAH LHP	Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(13)
18	Reviu DAK	Pengawasan Keuangan	DAK	Dinas penerima Dana DAK	Sesuai Jadwal Pengajuan	Sesuai Jadwal Pengajuan	12	12	12	48	88	160	12.800.000	-	12.800.000	6	Irbanl, II dan III			Mandatory
19	Pendampingan Pemeriksaan BPK	Monitoring dan Evaluasi	Inventarisir dokumen yang diminta oleh Tim BPK, mendampingi pemeriksaan ke lapangan Pemeriksaan terinci	LKPD Kota	2024,01	2024,02	5	5		5	30	45	150.000	-	6.750.000	1	Sekretariat		Risiko Rendah	Mandatory
20	Reviu PBJ dan Penyerapan Anggaran	Pengawasan Keuangan	Reviu Pelaksanaan Penyerapan Anggaran PBJ Pemda 2022	UKPBJ	Setiap Triwulan	Setiap Triwulan	6	6		6	6	24	150.000	-	3.600.000	3	Sekretariat			Mandatory
21	Verifikasi pelaporan Rencana Aksi daerah Pencegahan dan pemberantasn Korupsi			LHKPN	Januari s/d Maret 2024		2	2	2	2	8	14	150.000	-	2.100.000	1	Irban III			Mandatory
22	Program Pengarusutamaan Gender (PPRG)	Reviu	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperlimbangkan isu gender	Seluruh OPD	2024,03	2024,03	2	2	2	2	10	16	150.000	-	2.400.000	1	Irban II			Mandatory
23	Survei Penilaian Integritas KPK	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Penilaian Integritas	Pemda Kota Solok	2024,03	2024,1										1	Irban III			Mandatory
24	Pengawasan Lainnya	Monitoring dan Evaluasi	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip	Seluruh OPD	2024,04	2024,04	3	3		3	9	18	150.000	-	2.700.000	1	Sekretariat			Mandatory
25	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Pengawasan kinerja	Pengumpulan bahan, rekapitulasi dan Evaluasi RB Tematik	Pemda Kota Solok	2024,04	2024,04	5	5	5	5	15	30	150.000	-	4.500.000	1	Sekretariat			Mandatory
26	Reviu RKPD	Pengawasan Keuangan	Reviu RKPD Pemda Tahun 2025	Bappeda	2004,04	2004,04	5	5	5	5	15	30	150.000	-	4.500.000	1	Irban II			Mandatory

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Hari Penugasan						Uang Harian	Transportasi	Total Anggaran	JUMLAH LHP	Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(13)
27	Dinas Dukcapil	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,04	2024,05	8	8	8	8	24	48	150.000	-	7.200.000	1	Irban I		Risiko Tinggi	
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,04	2024,05	6	6	6	6	12	30	150.000	-	4.500.000	1	Irban II		Risiko Tinggi	
29	Badan Keuangan Daerah	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,04	2024,05	8	8	8	8	40	64	150.000	-	9.600.000	1	Irban II		Risiko Tinggi	
30	Balitbang	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,04	2024,05	6	6	6	6	24	42	150.000	-	6.300.000	1	Irban III		Risiko Tinggi	
31	Dinas Lingkungan Hidup	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan	2024,04	2024,05	10	10	10	10	40	70	150.000	-	10.500.000	1	Irban III		Risiko Tinggi	
32	BKPSDM	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan	2024,04	2024,05	8	8	8	8	32	56	150.000	-	8.400.000	1	Irban I		Risiko Tinggi	
33	Reviu SSH	Pengawasan Keuangan	Reviu Standar Satuan Harga sesuai target MCP KPK	BKD	2024,05	2024,06	2	2	2	2	8	14	150.000	-	2.100.000	1	Irban II			Mandatory
34	Reviu ASB	Pengawasan Keuangan	Reviu ASB sesuai target MCP KPK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2024,05	2024,06	2	2	2	2	8	14	150.000	-	2.100.000	1	Irban III		Risiko Tinggi	Mandatory

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Hari Penugasan						Uang Harian	Transportasi	Total Anggaran	JUMLAH LHP	Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(13)
35	Monitoring TindakLanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Monitoring Tindak Lanjut	Penyelesaian temuan BPK	TLHP BPK	2024,05	2024,06	5	5		5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Sekretariat		Risiko Tinggi	Mandatory
36	Monitoring TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat	Monitoring Tindak Lanjut	Penyelesaian temuan Inspektorat	TLHP Inspektorat	2024,05	2024,06	5	5		5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Sekretariat		Risiko Tinggi	Mandatory
37	Monitoring TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat	Monitoring Tindak Lanjut	Penyelesaian temuan Inspektorat	TLHP Inspektorat	2024,05	2024,06	5	5		5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Sekretariat		Risiko Tinggi	Mandatory
38	BPBD	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,05	2024,06	8	8	8	8	32	56	150.000	-	8.400.000	1	Irban II		Risiko Tinggi	
39	Monev Saber Pungli	Monev			Jadwal menyesuaikan		2	2	2	2	8	14	150.000	-	2.100.000	1	Irban III			Mandatory
40	Pengawasan Penerimaan P3K	Pengawasan Tujuan Tertentu	Menyesuaikan dengan Juknis dari BPKP	BKPSDM	Jadwal menyesuaikan		2	2	2	2	6	12	150.000	-	1.800.000		Inspektorat		Risiko Tinggi	Mandatory
41	Bappeda	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,05	2024,06	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Irban II		Risiko Sedang	
42	Disdukcapil	Monitoring dan evaluasi	Pembangunan Zona Integritas	6 area perubahan ZI	2024,05	2024,06	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Sekretariat			Mandatory

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Hari Penugasan						Uang Harian	Transportasi	Total Anggaran	JUMLAH LHP	Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(13)
43	DPMPTSP	Monitoring dan evaluasi	Pembangunan Zona Integritas	6 area perubahan ZI	2024,05	2024,06	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Sekretariat			Mandatory
44	Maturitas SPIP	Pengawasan Tujuan Tertentu	Pemenuhan Persyaratan dokumen SPIP	Laporan SPIP Pemda	2024,06	2024,07	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Sekretariat			Mandatory
45	Dinas Pariwisata	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,06	2024,07	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Irban I		Risiko tinggi	
46	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,06	2024,07	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Irban III		Risiko tinggi	
47	Penilaian SPIP	Pengawasan Tujuan Tertentu	Pemenuhan Persyaratan dokumen SPIP	SPIP seluruh OPD	2024,06	2024,07	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Sekretariat		Risiko Tinggi	Mandatory

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Hari Penugasan						Uang Harian	Transportasi	Total Anggaran	JUMLAH LHP	Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(13)
48	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengawasan Tujuan Tertentu	Pengaduan Masyarakat	Pengaduan Masyarakat	Paling lambat 15 hari kerja setelah masuknya pengaduan															Mandatory
49	Dinas Perhubungan	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,06	2024,07	8	8	8	8	32	56	150.000	-	8.400.000	1	Irban III		Risiko Sedang	
50	Sekretariat Daerah	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,07	2024,08	10	10	10	10	40	70	150.000	-	10.500.000	1	Irban I		Risiko Tinggi	
51	Satpol PP Dan Damkar	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,07	2024,08	10	10	10	10	40	70	150.000	-	10.500.000	1	Irban I		Risiko tinggi	
52	Dinas Pertanian	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,07	2024,08	10	10	10	10	40	70	150.000	-	10.500.000	1	Irban III		Risiko tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Hari Penugasan						Uang Harian	Transportasi	Total Anggaran	JUMLAH LHP	Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(13)
53	Kecamatan Tanjung Harapan	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,07	2024,08	10	10	10	10	40	70	150.000	-	10.500.000	1	Irban I		Risiko tinggi	
54	Kecamatan Lubuk Sikarah	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,07	2024,08	10	10	10	10	40	70	150.000	-	10.500.000	1	Irban I		Risiko tinggi	
55	Kesbangpol	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,07	2024,08	6	6	6	6	24	42	150.000	-	6.300.000	1	Irban I		Risiko tinggi	
56	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial)	Audit Kinerja	Capaian terhadap kinerja Misi 3 RPJMD (Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial)	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olah Raga	2023,07	2023,08	15	15	15	60	120	210	150.000	-	31.500.000	1	Irabn I, Irban II dan Irban III		Risiko Tinggi	
57	Set DPRD	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2023,08	2023,08	10	10	10	10	40	70	150.000	-	10.500.000	1	Irban II			Risiko Tinggi

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Hari Penugasan						Uang Harian	Transportasi	Total Anggaran	JUMLAH LHP	Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(13)
58	Diskominfo	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,08	2024,08	8	8	8	8	32	56	150.000	-	8.400.000	1	Irban I		Risiko Sedang	
59	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,08	2023,09	10	10	10	10	40	70	150.000	-	10.500.000	1	Irban III		Risiko tinggi	
60	DPKUKM	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,08	2023,09	10	10	10	10	40	70	150.000	-	10.500.000	1	Irban II			Risiko tinggi
61	Reviu KUAPPAS	Pengawasan Keuangan	Reviu KUA-PPAS Pemda Tahun 2025	BKD	2024,08	2024,08	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Irban II			Mandatory
62	Puskesmas Tanjung Paku	Monitoring dan evaluasi	Pembangunan Zona Integritas	6 area perubahan ZI	2024,08	2024,09	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Sekretariat			Mandatory

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Hari Penugasan						Uang Harian	Transportasi	Total Anggaran	JUMLAH LHP	Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(13)
63	Puskesmas Nan Balimo	Monitoring dan evaluasi	Pembangunan Zona Integritas	6 area perubahan ZI	2024,08	2024,09	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Sekretariat			Mandatory
64	Puskesmas KTK	Monitoring dan evaluasi	Pembangunan Zona Integritas	6 area perubahan ZI	2024,08	2024,09	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Sekretariat			Mandatory
65	UPTD Labor	Monitoring dan evaluasi	Pembangunan Zona Integritas	6 area perubahan ZI	2024,08	2024,09	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Sekretariat			Mandatory
66	BKPSDM	Monitoring dan evaluasi	Pembangunan Zona Integritas	6 area perubahan ZI	2024,08	2024,09	8	8	8	8	32	56	150.000	-	8.400.000	1	Sekretariat			Mandatory
67	Reviu RKPD Perubahan	Pengawasan Keuangan	Reviu RKPD Perubahan Pemda 2024	Bappeda	2024,09	2024,09	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Irban I, II dan III			Mandatory

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Hari Penugasan						Uang Harian	Transportasi	Total Anggaran	JUMLAH LHP	Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(13)
68	P3DN	Monitoring	Meyakinkan perencanaan , penganggaran dan belanja daerah telah memakai Produk Dalam Negeri	Seluruh OPD	2024,03	2024,05	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Irban II			Mandatory
69	Pengendalian Inflasi Daerah	Monitoring	Monitoring harga kebutuhan Pokok	DPKUKM	setiap hari	setiap hari											Irban I			Mandatory
70	Sosialisasi Anti korupsi	Pengawasan Lainnya			Jadwal menyesuaikan										10.000.000		Irban III			Mandatory
71	Reviu RKA OPD Perubahan	Pengawasan Keuangan	Reviu RKA Perubahan OPD Tahun 2024	BKD	2024,09	2024,09	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Irban I, II, III			Mandatory
72	PUPR	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,10	2024,10	10	10	10	10	40	70	150.000	-	10.500.000	1	Irban I		Risiko tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Hari Penugasan						Uang Harian	Transportasi	Total Anggaran	JUMLAH LHP	Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(13)
73	DPPPA	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,10	2024,10	8	8	8	8	32	56	150.000	-	8.400.000	1	Irban II		Risiko Sedang	
74	Reviu RKA OPD	Pengawasan Keuangan	Reviu RKA OPD Tahun 2025	BKD	2024,11	2024,11	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Irban I, II, III			Mandatory
75	BKD	Audit Komprehensif	Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Aset	2024,11	2024,11	10	10	10	10	40	70	150.000	-	10.500.000	1	Irban II		Risiko tinggi	
76	Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan	Pengawasan Keuangan	Stock opname kas dan Persediaan	Seluruh OPD, Puskesmas dan Sekolah	2024,12	2024,12	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Irban I, II, III dan Sekretariat		Risiko tinggi	
77	Reviu HPS	Pengawasan Keuangan	Reviu HPS untuk Proyek Stategis Pemda	HPS Proyek Strategis Pemda	Sesuai Jadwal Pengajuan	Sesuai Jadwal Pengajuan	5	5	5	5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Irban I, II, III dan Sekretariat		Risiko tinggi	

No	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan/Sasaran	Ruang Lingkup	Jadwal		Hari Penugasan						Uang Harian	Transportasi	Total Anggaran	JUMLAH LHP	Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan
					RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(13)
78	Monitoring TindakLanjut Hasil Pemeriksaan BPK semester 2	Monitoring Tindak Lanjut	Penyelesaian temuan BPK	TLHP BPK	2024,12	2024,12	5	5		5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Sekretariat		Risiko tinggi	Mandatory
79	Monitoring TindakLanjut Hasil Pemeriksaan Inspektoratsemester 2	Monitoring Tindak Lanjut	Penyelesaian temuan Inspektorat	TLHP Inspektorat	2024,12	2024,12	5	5		5	20	35	150.000	-	5.250.000	1	Sekretariat		Risiko tinggi	Mandatory
Total															**493.350.000**					

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

INSPEKTORAT DAERAH KOTA SOLOK
AUDIT UNIVERSE

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
MISI I : Membangun Masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai budaya																	
1	Meningkatkan Kepribadian Masyarakat yang Religius beradat dan berbudaya	Persentase penurunan penyakit masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengalaman Ajaran Agama	Indeks Kesalehan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Kesra/Setda	Irban I	Tujuan : Meningkatkan kepribadian masyarakat yang religius								Tahun 2021 Terdapat pembayaran jasa/honorarium guru MDTA/TPQ yang tidak sesuai dengan standar biaya umum Tahun 2023 1. Kelebihan harga belanja kebutuhan atribut pendukung kegiatan MTQ ke 40 Tahun 2022 sebesar Rp4.694.077 2. Kelebihan pembayaran belanja perjalaan dinas sebesar Rp2.690.400; 3. Terdapat pembayaran insentif guru MTQ/TPQ yang tidak sesuai dengan standar biaya umum 4. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum sesuai aturan 5. Pencatatan barang persediaan belum sesuai aturan yang berlaku 6. Belum terpenuhi [illegible]
							Kesra/Setda		Sasaran : Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan Ajaran Beragama	Indeks Kesalehan	Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Kegiatan Penyuluh Agama Islam	Rp6.809.926.120	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan Sektor Unggulan		
												Hubih Baznas					
												Hubih Masjid dan Mushalla					
												Monev Pengelolaan Zakat					
												MTQ Tingkat Kota					
												Pagelaran Bedug					
												Pemberangkatan dan Pemulangan Ibadah Haj					
												Pengiriman TPHD					
												Siswa Pondok Akademi					
												Tabligh Akbar					
												Tim Ramadhan Kota					
						Jumlah mesjid paripurna	Kesra/Setda	Irban I									
					Program pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase dokumentasi kalsifikasi organisasi kemasyarakatan	Kesbangpol	Irban I	Meningkatnya ketahanan bangsa dibidang idiologi, politik, sosial, budaya dan [illegible]	Persentase Penanganan Konflik Sosial	Program Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Persentase Penanganan Konflik Sosial	336.390.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
							Kesbangpol				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Jumlah Peserta Pendidikan Idiologi Pancasila	1.000.424.900	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
							Kesbangpol				Program Koordinasi dan Pembinaan pencegahan bahaya narkoba dan miras	Persentase dokumentasi Kalsifikasi Organisasi Kemasyarakat	68.860.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
							Kesbangpol		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemantapan wawasan [illegible]	Persentase Organisasi Kemasyarakan yang terverifikasi	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		5.500.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
						Persentase dokumentasi kalsifikasi organisasi kemasyarakatan	Kesbangpol	Irban I	Meningkatnya ketahanan bangsa dibidang idiologi, politik, sosial, budaya dan [illegible]	Persentase Penanganan Konflik Sosial	Program Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Persentase Penanganan Konflik Sosial	128.260.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
							Kesbangpol				Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Jumlah Peserta Pendidikan Idiologi Pancasila	323.680.490	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
						Persentase dokumentasi kalsifikasi organisasi kemasyarakatan	Kesbangpol	Irban I	Meningkatnya ketahanan bangsa dibidang idiologi, politik, sosial, budaya dan [illegible]	Persentase Penanganan Konflik Sosial	Program Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Persentase Penanganan Konflik Sosial	519.100.980	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Program Pengembangan Kurikulum	% Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Dinas Pendidikan	Irban II	Meningkatkan kesempatan pemerataan pendidikan	1.Angka Partisipasi sekolah 2. Angka putus sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD APK SMP APK PAUD APM SD APM SMP Tingkat partisipasi	34.263.903.975	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan Sektor Unggulan		
						% Satuan Pendidikan Usia Dini yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Dinas Pendidikan	Irban II	Meningkatkan daya saing lembaga pendidikan	1. % akreditasi sekolah dengan akreditasi A 2. % Akreditasi PAUD A	Program Pengembangan Kurikulum	% Satuan Pendidikan Usia Dini yang menerapkan Kurikulum muatan lokal	145.982.820	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan Sektor Unggulan		
							Dinas Pendidikan				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% Pendidik SD Memiliki Sertifikat % Pendidik SMP Memiliki Sertifikat % Pendidik PAUD	9.750.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan Sektor Unggulan		
					Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Tingkat Penyelesaian pelanggaran ketertiban dan ketentraman	Dinas Pol PP	Irban I			Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban dan ketentraman	2.186.840.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan Sektor Unggulan	Tahun 2021 1. Serah terima pekerjaan dari bendahara Satpol PP dan Damkar tahun 2021 dari Sdri. Mira Emyldna Putri, A.Md bendahara pengeluaran lama kepada Sdri. Dari Meldalia A.Md (bendahara pengeluaran baru) belum tuntas. 2.Pelaksanaan pelaporan alat pemadam kebakaran tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.20.421.000,- 3. Terdapat pembayaran denda yang perlalatan dinas sebesar Rp.1.866.000,- 4. Kelebihan pembayaran honor PNS sebesar Rp.200.000,- 5. Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam daerah kabupaten kota didukung petunjuk teknis dan SOP 6. Peningkatan kualitas SDM Satpol PP belum direncanakan dengan baik 7. Satpol PP belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai Tahun 2022 1. Kelebihan Pembayaran Uang Jasa Tenaga Pemadam dan Penyelamat Sebesar Rp.4.275.000,- 2. Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Belum Dilaksanakan Secara Optimal 3. Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Dilaksanakan Secara Tertib dan Belum Sesuai Aturan Tahun 2023 1. Terdapat sisa denda administrasi pajak kendaraan dinas dibebankan ke APBD selai Rp.323.050,- 2. Belum dibuatnya laporan kegiatan periodik tahun anggaran 2022 dan 2023 3. Pengelolaan barang milik daerah belum dilaksanakan sesuai ketentuan	
			Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Penafsiran nilai-nilai adat dan budaya	Persentase pelaku adat dan budaya yang aktif	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar budaya yang dilestarikan	Pariwisata	Irban I								Tahun 2021 1. Pembayaran upah/gaji petugas keamanan pulau belibis dan taman pramuka tidak terdapat dalam SSH Kota Solok 2. Pembangunan jakebo pada Dinas Pariwisata yang tidak sesuai konteks 3. Belum adanya kerangka acuan kerja sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 4. Terdapat pembayaran belanja jasa/kerjasama pihak ketiga (jasa pelatih panggung pidato adat/kesenian) tidak dilakukan dengan non tunai Tahun 2022 1. Kelebihan pengadaan bahan pemeliharaan taman Pulau Belibis sebesar Rp. 1.076.920,- 2. Kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan objek wisata Pulau Belibis sebesar Rp. 3.995.000,- 3. Pelaksanaan perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang tidak efektif 4. Nilai belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua tidak sesuai dengan standar maksimal nilai belanja yang telah ditetapkan dalam standar satuan harga Pemerintah Daerah 5. Pelaksanaan belanja kegiatan yang tidak mempedomani satuan harga Tahun 2023 1. Terdapat Pengadaan Mesin Ketik Elektrik yang Belum dimanfaatkan Fisiknya sebesar Rp.4.259.460,- 2. Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan belum dilaksanakan dengan Tertib dan Akuntabel serta Belum di Dukung Dengan Buki yang Lengkap 3. Belum Terpenuhinya Laporan Periodik Capaian Target Kinerja Tahun 2022 dan 2023 serta Jadwal Kegiatan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh PPTK 4. Belum adanya Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat 5. Minimnya Infra Struktur Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di Taman Rekreasi Pulau Belibis Kota Solok	
				Program Pengembangan Kebudayaan		Persentase karya budaya yang ditetapkan	Pariwisata	Irban I	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Meningkatnya Pelestarian Budaya (benda dan tak Benda	Pengembangan Kebudayaan	Persentase peningkatan pelaku kebudayaan yang difasilitasi	851.571.200	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
						Persentase lembaga adat yang difasilitasi	Pariwisata	Irban I									
MISI II : Peningkatan Perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi																	
2	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan Berbasis potensi Unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB(ADHK)													
				Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB(ADHK)													

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	URUSAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB(ADHK)													
					Program Peningkatan Sarana dan distribusi perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang tertata dan memadai	DPKUKM	Urusan II	Tujuan : Pertumbuhan sektor perdagangan	Indikator Tujuan : Persentase pertumbuhan sektor perdagangan	Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan sarana perdagangan	2.586.133.733	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan	Tahun 2023 1. Penatausahaan Keuangan tidak tertib dan tidak valid 2. Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Ganda Sebesar Rp.4.125.000,- 3. Pembayaran biaya makan minum pada kegiatan perjalanan Dinas sebesar Rp.9.688.305,- 4. Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik Sebesar Rp.12.435.920,- 5. Pembayaran Ganda Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota dengan Paket Meeting Fullday dan Pelaksanaan Tera di Daerah Lain sebesar Rp.2.725.000,- 6. Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi senilai Rp.1.338.000,- 7. Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Moderator sebesar Rp.1.225.000,- 8.Terdapat Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 Dibebankan ke APBD senilai Rp.25.150,- 9. Pertanggungjawaban belanja BBM yang didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang nil senilai Rp.47.112.700,- 10. Revitalisasi WC Lokasi Bawah Bangunan Service sebesar Rp.189.267.000,- belum dimanfaatkan 11. Terdapat Beberapa Pelaksanaan Kegiatan yang Belum Efektif dan Efisien dalam Penggunaan Sumber daya 12. Administrasi Pengelolaan Keuangan yang Belum Sesuai dengan Aturan yang Berlaku 13. Pegawai yang Di Tugaskan untuk Melakukan Pemantauan Tidak Memenuhi Kriteria Sebagaimana yang di amanatkan dalam peraturan menteri perdagangan 14. Terdapatnya Pelaksanaan Pekerjaan Di Lakukan oleh Bidang yang tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan tidak Efektif 15. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Belum di setujui oleh Pejabat yang Berwenang 16.Terdapat Realisasi Anggaran yang tidak sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran 17. Pengenggaran Belanja yang Tidak sesuai dengan aturan yang berlaku 18. Terdapat Pengenggaran dan Belanja Pemeliharaan barang dan Pembelian Suku Cadang atas Barang bukan Milik Daerah 19.Pengelolaan Barang Milik DAerah yang belum sesuai aturan yang berlaku	
									Sasaran : Peningkatan sektor perdagangan	Indikator Sasaran : Persentase kenaikan nilai volume perdagangan		Persentase sarana Perdagangan yang tertata dan Memadai		Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
					Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	DPKUKM	Urusan II	Tujuan : Meningkatkan perekonomian daerah	Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha MIKRO (UMKM)	Persentase usaha Mikro yang menjadi wirausaha	376.650.000				
									Sasaran : Meningkatnya sektor perdagangan	Indikator Sasaran : Persentase pertumbuhan wirausaha baru				Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
					Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Usaha Mikro (%)	DPKUKM	Urusan II	Tujuan : Pertumbuhan koperasi berkualitas dan pertumbuhan pemasaran umkm	Indikator Tujuan : Persentase pertumbuhan omset umkm yang di binbi	Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan usaha mikro	437.575.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
									Sasaran : Meningkatkan koperasi dan umkm	Indikator Sasaran : Jumlah umkm yang naik kelas		Pertumbuhan UMKM		Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
					Program Perencanaan dan pembangunan Industri	Pertumbuhan Jumlah IKM(%)	DPKUKM	Urusan II	Tujuan : Meningkatkan perekonomian daerah	Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang Berkualitas	560.036.650	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
									Sasaran : Meningkatnya sektor perdagangan	Indikator Sasaran : Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah		Peningkatan Jumlah IKM					
												Peningkatan Jumlah IKM yang Berkualitas					
												Persentase pertumbuhan Jumlah IKM					
					Program Penyediaan dan pengembangan sarana Pertanian	Persentase pemenuhan sarana pertanian	Dinas Pertanian	Urusan III	Tujuan : Peningkatan Kesejahteraan Petani	Indikator Tujuan : Persentase pemenuhan sarana pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah populasi kambing	652.699.500	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan	Tahun 2021 Terdapat Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Fiktif sebesar Rp.35.957.300,- Tahun 2022 1. Terdapat pembayaran BBM yang tidak sah karena penggunaan faktur/nota BBM palsu untuk BBM rutin kendaraan roda 2 dan 4 tahun 2021 sebesar Rp159.083.650,- 2. Kepala Dinas Pertanian dan Bendahara Pengeluaran belum menaati instruksi Walikota Solok tentang implementasi non tunai secara menyeluruh dan maksimal	
						Persentase peningkatan populasi ternak			Sasaran : Meningkatnya produktivitas hewan ternak	Indikator Tujuan : Persentase pemenuhan sarana pertanian						Tahun 2023 1. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp560.000,- 2. Pertanggungjawaban belanja BBM belum akuntabel	
						- Sapi						Jumlah populasi sapi					
						-Unggas						Jumlah populasi unggas					

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						-Kambing						Persentase penakaian benih padi bersertifikat					
						Persentase Penakaian benih bersertifikat						Persentase penakaian benih sedi wangi bersertifikat					
						-Padi						Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian					
						-Serai wangi											
						-Kopi											
						Persentase	Dinas Pertanian	Irban III									
						-Padi											
						-Serai wangi											
						-Kopi											
					Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase ketersediaan prasarana pertanian	Dinas Pertanian	Irban III	Tujuan : Peningkatan Kesejahteraan Petani	Indikator Tujuan : Persentase ketersediaan prasarana pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana yng digunakan	623.700.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
									Sasaran : Meningkatnya agribisnis	Indikator Sasaran : Persentase ketersediaan prasarana pertanian							
					Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan menular	Dinas Pertanian	Irban III	Tujuan : Peningkatan Kesejahteraan Petani	Indikator Tujuan : Persentase kesembuhan penyakit hewan	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kesembuhan penyakit hewan	150.872.800	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
						Persentase kesembuhan penyakit hewan			Sasaran : Meningkatnya produktivitas hewan ternak	Indikator Tujuan : Persentase kesembuhan penyakit hewan		Persentase pengendalian Penyakit Hewan menular					
					Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Kunjungan wisata	Dinas Pariwisata	Irban I	Tujuan : Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan dari sektor pariwisata	Indikator Tujuan : Laju pertumbuhan Sektor Pariwisata	Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		772.265.200	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Pembayaran upah/gaji petugas keamanan pulau belibis dan taman pemuka tidak terdapat dalam SSH Kota Solok 2. Pembangunan gazebo pada Dinas Pariwisata yang tidak sesuai konsep 3. Belum adanya kerangka acuan kerja sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 4. Terdapat pembayaran belanja jasa/kerjasama pihak ketiga (jasa pelaku panggung pidato adat/kesenian) tidak dilakukan dengan non tunai Tahun 2022 1. Kelebihan pembelian bahan pemeliharaan taman Pulau Belibis sebesar Rp. 1.076.920,- 2. Kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan objek wisata Pulau Belibis sebesar Rp. 3.995.000,- 3. Pelaksanaan perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang tidak efektif 4. Nilai belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua tidak sesuai dengan standar maksimal nilai belanja yang telah ditetapkan dalam standar satuan harga Pemerintah Daerah 5. Pelaksanaan belanja kegiatan yang tidak mempedomani satuan harga Tahun 2023 1. Terdapat Pengadaan Mesin Ketik Elektrik yang Belum ditemukan Fisiknya sebesar Rp.4.259.460,- 2. Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan belum dilaksanakan dengan Tertib dan Akuntabel serta Belum di Dukung Dengan Bukti yang Lengkap 3. Belum Terpenuhinya Laporan Periodik Capaian Target Kinerja Tahun 2022 dan 2023 serta Jadwal Kegiatan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh PPTK 4. Belum adanya Unit Pelayanan Pengaduan Masyarakat 5. Minimnya Infrastruktur Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di Taman Rekreasi Pulau Belibis Kota Solok	
									Sasaran : Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Indikator Sasaran : Jumlah Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan							
					Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah event pariwisata yang dilaksanakan	Dinas Pariwisata	Irban I	Tujuan : Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan dari sektor pariwisata	Indikator Tujuan : Laju pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Jumlah event Pariwisata	561.892.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
									Sasaran : Meningkatkan pemasaran pariwisata	Indikator Sasaran : Kunjungan Wisata		Jumlah Publikasi Pariwisata					
										PAD sektor Pariwisata							
					Program Pengelolaan Perikanan budidaya	Jumlah benih berkualitas yang digunakan(ekor)	Dinas Pertanian	Irban III	Tujuan : Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan dari sektor pariwisata	Indikator Tujuan : Jumlah produksi perikanan (ton)	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Identifikasi Potensi Perikanan budidaya	257.540.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan	Tahun 2021 Terdapat Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Fiktif sebesar Rp.35.957.300,- Tahun 2022 1. Terdapat pembayaran BBM yang tidak sah karena penggunaan faktur/nota BBM palsu untuk BBM rutin kendaraan roda 2 dan 4 tahun 2021 sebesar Rp159.083.850,- 2. Kepala Dinas Pertanian dan Bendahara Pengeluaran belum menaati instruksi Walikota Solok tentang implementasi non tunai secara menyeluruh dan maksimal Tahun 2023 1. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp560.000,- 2. Pertanggungjawaban belanja BBM belum akuntabel	
						Jumlah produksi perikanan (ton)	Dinas Pertanian	Irban III	Sasaran : Meningkatnya produktivitas perikanan	Indikator Tujuan : Jumlah produksi perikanan (ton)		Jumlah benih berkualitas yang digunakan					
												Jumlah Benih yang dikalikan					

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	URBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
												Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan budidaya					
												Jumlah Produksi Benih Lele					
												Jumlah Produksi Benih Mas					
												Jumlah Produksi Benih Nila					
												Jumlah Produksi Perikanan					
					Program pengembangan Sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi	Dinas Pariwisata	Urban I	Tujuan : Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan dari sektor pariwisata	Indikator Tujuan : Laju pertumbuhan Sektor Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Industri Kreatif dan Pariwisata yang Produktif	218.275.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Pembayaran upah/gaji petugas keamanan pulau belibis dan taman pemuka tidak terdapat dalam SSH Kota Solok 2. Pembangunan gazebo pada Dinas Pariwisata yang tidak sesuai kontrak 3. Belum adanya kerangka acuan kerja sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 4. Terdapat pembayaran belanja jasa/kerjasama pihak ketiga (jasa pelaku panggung pidato adat/kesenian) tidak dilakukan dengan non tunai Tahun 2022 1. Kelebihan pembelian bahan pemeliharaan taman Pulau Belibis sebesar Rp. 1.076.920,- 2. Kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan objek wisata Pulau Belibis sebesar Rp. 3.995.000,- 3. Pelaksanaan perjalanan dinas kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang tidak efektif 4. Nilai belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua tidak sesuai dengan standar maksimal nilai belanja yang telah ditetapkan dalam standar satuan harga Pemerintah Daerah 5. Pelaksanaan belanja kegiatan yang tidak mempedomani satuan harga Tahun 2023 1. Terdapat Pengadaan Mesin Ketik Elektrik yang Belum ditemukan Fisiknya sebesar Rp.4.259.460,- 2. Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan belum dilaksanakan dengan Tertib dan Akuntabel serta Belum di Dukung Dengan Bukti yang Lengkap	
			Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Program Pengembangan iklim penanaman modal	Nilai Investasi (juta)	DPMPTSP	Urban III	Tujuan : Peningkatan Nilai Inventasi	Indikator Tujuan : Pertumbuhan Nilai Investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi	20.088.500	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Kelebihan pembayaran dan realisasi belanja yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada pelaksanaan anggaran kegiatan penyiapan tenaga kerja siap pakai dan pelatihan keterampilan pencari kerja sebesar Rp.12.175.600,- 2. Kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas sebesar Rp.3.138.000,- yang tidak sesuai dengan realisasi 3. Kelebihan pembayaran harga belanja kebutuhan operasional kantor sebesar Rp.1.635.000,- 4. Kelebihan pembayaran belanja honorarium bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran sebesar Rp.1.244.000,- 5. Pengeluaran belanja yang tidak ditemukan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.1.000.000,- 6. Pertanggungjawaban belanja yang tidak melalui tahap verifikasi PPK 7. Realisasi belanja yang tidak melalui transaksi non tunai 8. Belanja barang pengadaan yang dilakukan di luar kota solok 9. Pengadministrasian pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara dan PPTK belum tertib sesuai aturan yang berlaku 10. Penyuluhan dan bimbingan kerja untuk pencari kerja belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku 11. Sosialisasi kebijakan penanaman modal dan bimbingan teknis kemudahan berusaha bagi pelaku usaha belum dilaksanakan secara efisien dan efektif 12. Indikator kegiatan yang diperjanjikan pada bidang pelayanan informasi, advokasi dan tenaga kerja DPMPTSP Kota Solok tidak diukur dan pencapaiannya dan tidak dilakukan evaluasi program atau kegiatan 13. Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan belum dilengkapi dengan bukti yang lengkap 14. Administrasi pengelolaan barang daerah belum dilaksanakan secara tertib menurut aturan yang berlaku Tahun 2023 1. Pelaksanaan sub kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja tidak tepat sasaran serta belum mendukung pencapaian output dan outcome kegiatan 2. Pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan belum dilengkapi dengan bukti yang lengkap 3. Capaian kinerja kegiatan pada program pengembangan iklim penanaman model belum dicapai sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditargetkan 4. Administrasi pengelolaan barang belum dilaksanakan secara tertib menurut aturan yang berlaku	
									Sasaran : Peningkatan Iklim Inventasi	Indikator Sasaran : Nilai Investasi							
					Program promosi penanaman modal	Jumlah investor yang berinvestasi	DPMPTSP	Urban III	Tujuan : Peningkatan Nilai Inventasi	Indikator Tujuan : Pertumbuhan Nilai Investasi	Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berinvestasi	11.315.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
									Sasaran : Peningkatan Iklim Inventasi	Indikator Sasaran : Jumlah Investor yang berminat							
			Meningkatnya Peluang Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan	DPMPTSP	Urban III	Tujuan : Perluasan Kesempatan Kerja	Indikator Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan	514.400.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
									Sasaran : Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Indikator Sasaran : Persentase tenaga kerja siap pakai							
					Program Penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang terfasilitasi	DPMPTSP	Urban III	Tujuan : Perluasan Kesempatan Kerja	Indikator Tujuan : Tingkat Pengangguran Terbuka	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang terfasilitasi	1.850.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
									Sasaran : Peningkatan Peluang Kerja	Indikator Sasaran : Persentase tenaga kerja yang tersalurkan							
MISI III: Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial																	
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup													
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita													
					program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelayanan ibu hamil sesuai standar	Dinas Kesehatan	Irban III	Tujuan: Mewujudkan Peningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	49 407 433.773	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Tidak tersedia dokumen pendukung tertulis yang lengkap dan memadai pada proses pengadaan barang/jasa penanganan Covid-19 2. PPK belum melakukan pemeriksaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban secara baik dan tesuai dengan ketentuan yang berlaku Tahun 2023 1. Terdapat pembayaran biaya transport sebesar Rp.18.600.000,- yang belum didukung dengan bukti yang sah 2. Fasilitas puskesmas tanah garam kurang memadai 3. Administrasi pengelolaan barang belum dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku	
										Prevalensi stunting		Pelayanan Kesehatan bayi sesuai standar					
						Persentase pelayanan kesehatan bayi sesuai standar			Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Keluarga	AKI		Persentase Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar					
										AKB		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					
						Persentase Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar			Menurunkan Angka Kesakitan	Prevalensi Rate		Persentase Balita wasting (kurus dan sangat kurus berdasarkan Berat badan menurut tinggi badan					
									Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat		Persentase penanganan KLB					
						Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas	Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar kesehatan		Persentase Penanganan Penyakit tidak menular yang terdeteksi					
						Persentase Balita wasting(kurus dan sangat kurus)BB/TB				Capaian UHC		Persentase Penanganan Penyakit menular					
						Persentase penanganan KLB < 24 jam			Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Nilai evaluasi LAKIP dinas kesehatan Kota Sokok		Persentase Masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan					
						Persentase penyakit tidak menular yang terdeteksi						Operasional Rumah Sakit tipe C					
						Persentase Penanganan Penyakit menular						Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin					
						Persentase Masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan						Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)					
						Operasional Rumah sakit Type C						Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehata					

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Teknis
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien Masyarakat Miskin											
						Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization											
						Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan											
					Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (Kuratif)	Dinas Kesehatan	Irban III			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya(Kuratif)	29 225 000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
						Persentase Tenaga Punya Izin Praktik						Persentase Tenaga Punya Izin Praktik					
					Program sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase pelaksanaan pengawasan makanan	Dinas Kesehatan	Irban III			Program sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase pelaksanaan pengawasan makanan	389 570 800	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
						Persentase Pengawasan sarana kefirmasian, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT)						Persentase Pengawasan sarana kefirmasian, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional(UMOT)					
					Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase keluarga ber-PHBS	Dinas Kesehatan	Irban III			Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase keluarga ber-PHBS	170 647 400	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
						Persentase upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat(UKBM)						Persentase upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat(UKBM)					
					Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	jumlah gedung olahraga (milik pemda)	Dispora	Irban I			Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi	2 526 660 200	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Terdapat pembayaran belanja yang tidak sesuai dengan SSH TA 2020 dan 2021 sebesar Rp.8.146.000,- 2. Terdapat penganggaran dan pembayaran belanja yang belum diatur dalam SSH tahun 2020 dan 2021 3. Terdapat kelebihan pembayaran sarapan pagi dan perjalanan dinas sebesar Rp.467.650,- 4. Terdapat pembayaran ganda sebesar Rp.800.000,- 5. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.8.059.000,- 6. Terdapat ketidaksesuaian belanja modal antara SPJ dengan fisik barang yang dibeli 7. Terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai perencanaan dan peruntukan 8. Terdapat kelemahan dalam evaluasi dan verifikasi penganggaran dari hibah uang tahun 2021 9. Kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan cabang olahraga berprestasi di tingkat daerah 10. Pertanggungjawaban keuangan BBM perjalanan dinas tahun 2021 yang tidak tertib dan tidak akuntabel 11. Realisasi belanja kegiatan permasalah olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat tidak mencerminkan pencapaian output kegiatan 12. Terdapat SPJ yang barangnya tidak dapat ditunjukkan secara lengkap dan yang tidak dilengkapi bukti pendukung yang cukup Tahun 2022 1. Terdapat pengadaan barang dan pembayaran biaya transportasi atlet, pelatih/official/pendampingan yang tidak ada realisasi fisiknya sebesar Rp.400.664.997,- 2. Pembayaran BBM bus yang tidak sesuai perencanaan dan peruntukan sebesar Rp.1.261.000,- 3. Pelaksanaan transaksi non tunai yang tidak sesuai aturan 4. Nilai belanja pemeliharaan kendaraan roda empat tidak sesuai dengan standar maksimal nilai belanja yang telah ditetapkan dalam standar satuan harga Tahun 2023 1. Honorarium tim pengelola website Dinas yang tidak memiliki dasar pembayaran 2. Kelebihan pembayaran penggantian penginapan perjalanan dinas sebesar Rp.447.000,- 3. Kelebihan pembayaran upah tukang pekerjaan pemeliharaan sarana gelanggang olahraga tanjung paku sebesar Rp.12.100.000,- 4. Belanja perjalanan dinas dalam kota yang tidak sesuai dengan dasar pembayaran 5. Administrasi pertanggungjawaban belanja kegiatan yang tidak akuntabel	
						jumlah lapangan olahraga(Milik pemda dan yang dibina)						Jumlah gedung olahraga (milik pemda)					
						Cakupan pembinaan atlet muda						Jumlah kejuaraan/event olahraga rekreasi yang					

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Persentase atlet berprestasi						Jumlah kejuaraan olahraga prestasi yang diselenggarakan					
												Jumlah Medali yang diperoleh					
												Cakupan pembinaan atlet muda					
												Persentase atlet berprestasi					
						Jumlah tenaga kedahragaan yang berlisensi						Jumlah tenaga kedahragaan yang berlisensi					
							Dispora				Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Persentase pemuda produktif	341.550.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
												Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan			Bukan sektor unggulan		
							Dispora				Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Persentase pemuda produktif	500.000.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
												Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan					
					Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Baru	Dinas Dalduk & KB	Irban II	Tujuan : Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Masyarakat Yang Aktif dalam Program Bangga Kencana	117.429.900	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Kelebihan pembayaran perawatan kendaraan dinas roda 4 sebesar Rp.5.462.400,- 2. Penerimaan pembayaran ganda uang transportasi sebesar Rp.500.000,-	
						Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang			Sasaran: Meningkatnya Peserta KB	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) menurun		Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)					
							Dinas Dalduk & KB			Persentase Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (DO)	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Baru	1.213.850.100	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
										Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang					
							Dinas Dalduk & KB			Persentase Meningkatnya Penggunaan MKJP	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Yang Aktif Dalam Kelompok Kegiatan (Tribina, UPPKA)	1.337.352.800	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
									Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Persentase kelahiran pada usia remaja (15-19) (ASFR		Persentase Tenaga Teknis Yang Terampil					
										Jumlah KK miskin yang terfasilitasi program UPPKS							

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama sekolah(RLS)	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	Dinas Pendidikan	Irban II	Tujuan: Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	34.203.903.975	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Belanja Kegiatan yang belum ada realisasi Fisiknya sebesar Rp. 13,907,614,- 2. Kemahalan Pembelian Barang dan Pembayaran Upah sebesar Rp. 8,523,521,- 3. Kelebihan Pembayaran Belanja Kegiatan sebesar Rp. 2,326,000 4. Pengelolaan Administrasi Keuangan oleh Bendahara BOS pada Sekolah Swasta belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Aturan yang berlaku Tahun 2022 1. Terdapat Pengeluaran Senilai Rp. 30.811.905,- tidak ditemukan realisasi fisiknya 2. Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik senilai Rp. 15.362.934,- 3. Penunjukan Pengawas Pekerjaan Fisik yang kurang efisien 4. Kelebihan Pembayaran biaya perjalanan Dinas senilai Rp.4.490.000,- 5. Pembayaran BBM kendaraan Dinas BA 7001 yang tidak lengkap administrasinya senilai Rp. 55.432.300,- 6. Terdapat Dokumen Pertanggungjawaban yang tidak ditemukan senilai Rp. 180.774.822,- 7. Kemahalan Harga pembayaran berarsip cetak spanduk kegiatan senilai Rp.676.000,- 8. Terdapat Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Dinas Roda 2 dibebankan ke APBD senilai Rp.409.350,- 9. Terdapat bebas belanja pada perjalanan dinas yang tidak disertai dengan bukti yang sesuai dengan nilai senilai Rp. 450.000,- 10. Pengelolaan keuangan belum sesuai dengan aturan yang berlaku 11. Barang Pakai Habis yang tidak jelas pencatatannya senilai Rp. 54.707.900,- 12. Pertanggungjawaban belanja BBM yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang riil senilai Rp. 79.614.267,- 13. Terdapat ini Dokumen Kontrak Perencanaan Belum Sesuai dengan aturan 14. Penunjukan Pembantu Bendahara tidak Efisien dan Efektif 15. Terdapat Pengadaan Atas Barang Milik Daerah yang diserahkan kepada Sekolah belum diberi nomor kode barang 16. Penetapan Kegiatan Sub Kegiatan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku 17. Terdapat Pengangkatan Jabatan Khusus yang tidak sesuai dengan aturan yanberlaku Tahun 2023 1. Kekurangan volume pekerjaan fisik senilai Rp.7.471.400,- 2. Terdapat pajak kurang pungut dan kurang setor senilai Rp.462.273,- 3. Terdapat kemahalan harga dalam belanja barang pakai habis senilai Rp.4.408.800,- 4. Kelebihan pembayaran upah tukang pada pekerjaan rehab ruang kantor senilai Rp.1.078.800,- 5. Pertanggungjawaban belanja BBM yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang riil senilai Rp.37.739.650,-	
				Harapan lama Sekolah (HLS)		APK SMP				Harapan Lama Sekolah		APK SMP					
						APK PAUD(3-6th)			Sasaran: Meningkatkan kesempatan pemerataan pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah		APK PAUD(3-6th)					
						APM SD				Angka Putus Sekolah		APM SD					
						APM SMP			Meningkatkan daya saing lembaga pendidikan	% Sekolah dengan Akreditasi A		APM SMP					
						Tingkat Partisipasi Warga negara usia 7-18tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan				% PAUD dengan Akreditasi A		Tingkat Partisipasi Warga negara usia 7-18tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan					
					Program Pengembangan Kurikulum	%Satuan Pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	Dinas Pendidikan	Irban II				%Satuan Pendidikan dasar menerapkan kurikulum muatan lokal	145.982.820				
						%Satuan Pendidikan Usia dini yang menerapkan Kurikulum muatan lokal						%Satuan Pendidikan Usia dini yang menerapkan Kurikulum muatan lokal					
					Program Pendidik dan tenaga Kependidikan	% Pendidi SD Memiliki Sertifikat	Dinas Pendidikan	Irban II				% Pendidi SD Memiliki Sertifikat	9.750.000				
						%Pendidik SMP Memiliki Sertifikat						%Pendidik SMP Memiliki Sertifikat					
						% Pendidi PAUD Memiliki Sertifikat						% Pendidi PAUD Memiliki Sertifikat					
							Dinas Pendidikan	Irban II			Program Pengembangan Kurikulum	Satuan Pendidikan dasar yang melaksanakan muatan lokal	145.982.820	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
												Satuan Pendidikan PAUD yang melaksanakan muatan lokal					
							Dinas Pendidikan	Irban II			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0% Guru PNS SMP yang memiliki sertifikat pendidik	9.750.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
					Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Dinas Pepustakaan dan Kearsipan	Irban II	Tujuan: Terwujudnya Budaya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	10.582.630.600	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Terdapat pembayaran yang masih menggunakan transaksi tunai 2. Belum dilaksukannya survey kepuasan pemustaka Tahun 2022 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tidak melakukan Pengawasan Pengelolaan Keuangan yang mengakibatkan Kacaunya Penatausahaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Akhir Tahun 2021 dan Kewajiban setor ke Kas Daerah sebesar Rp. 30.645.339,- 2. Terdapat dana tunai yang masih berada dilangan Bendahara Pengeluran akibat adanya fix penarikan cheque dalam transaksi keuangan di awal tahun 2021 sebesar Rp. 6.839.370,- 3. Terdapat Pajak Tahun 2021 yang belum disetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah sebesar Rp. 9.317.269,- Tahun 2023 1. Ruang penyimpanan arsip belum memenuhi standar yang ditentukan dalam peraturan kepala arsip nasional nomor 31 tahun 2015 2. Naskah kuno suhu latisah kota solok belum terdaftar sebagai naskah kuno nasional 3. Masih lemahnya inventarisasi koleksi buku perpustakaan pada kegiatan buku berguir 4. Pengembangan koleksi perpustakaan belum memiliki dasar kebijakan berupa surat keputusan kepala dinas 5. Perencanaan pemenuhan penambahan koleksi perpustakaan tidak berpodoman pada standar nasional perpustakaan 6. Didapati kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp850.000,-	
						Indeks Kepuasan Pemustaka			Terwujudnya Penyelenggaraan Kearsipan Yang Andal	Indeks pemanfaatan arsip		Indeks Kepuasan Pemustaka					
							Dinas Pepustakaan dan Kearsipan		Sasaran: Meningkatkan kegemaran membaca masyarakat		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah yang dilamarkan	23.220.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
							Dinas Pepustakaan dan Kearsipan		Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan		Program Pengelola Arsip	Indeks Pemanfaatan Arsip	93.583.500	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
							Dinas Pepustakaan dan Kearsipan				Program Perizinan Penggunaan Arsip			Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	%Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS)yang aktif	Dinas Sosial	Irban II	Tujuan: Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Angka Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	%Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS)yang aktif	111.430.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupkan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Kelebihan pembayaran belanja barang yang diserahkan ke Masyarakat dan barang kebutuhan kantor sebesar Rp.1.697.600,- 2. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp.180.000,- 3. Pemberdayaan sosial yang merupakan bagian dari urusan pemerintah wajib belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Sosial 4. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada biang Sosial belum memiliki dasar pelaksanaan kebijakan daerah 5. Pembayaran belanja BBM kendaraan dinas belum menggunakan sistem atcost	
				Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial(PPKS)													
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dirinya	Dinas Sosial	Irban II	Sasaran: Menurunnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terlanganl/ menerima bantuan	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dirinya	288.187.600	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Kelebihan pembayaran belanja barang yang diserahkan ke Masyarakat dan barang kebutuhan kantor sebesar Rp.1.697.600,- 2. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp.180.000,- 3. Pemberdayaan sosial yang merupakan bagian dari urusan pemerintah wajib belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Sosial 4. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada biang Sosial belum memiliki dasar pelaksanaan kebijakan daerah 5. Pembayaran belanja BBM kendaraan dinas belum menggunakan sistem atcost	
						Persentase Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dirinya				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif		Persentase Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dirinya				Tahun 2022 1. Terdapat pembayaran ganda atas pembayaran bantuan BBM dalam angka melakukan perjalanan dinas sebesar Rp.308.000,- 2. Terdapat belanja yang tidak sesuai dengan perumukannya senilai Rp. 10.740.000,- 3. Terdapat belanja yang tidak didukung oleh bukti yang sah dan relevan senilai Rp. 13.570.000,- 4. Terdapat belanja BBM dengan sistem DO yang tidak dilengkapi dokumen perjanjian kerjasama tanggal pengisian BBM dan	

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Persentase Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial			Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin	Persentase penurunan data error DTKS		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial				kelebihan belanja pengiriman BBM 6. Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp.625.000,- 7. Terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai perutukannya senilai Rp.760.000,- 8. Terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas dan uang representatif Kepala Dinas yang tidak pada satu mata anggaran 9. Terdapat barang milik daerah yang belum diserahkan ke Dinas Sosial oleh Sdr Rahmad Budi Setiawan, S.Sos 10. Terdapat kendaraan dinas yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kepemilikan dan buku pemilik kendaraan bermotor 11. Pengelolaan barang belum dilaksanakan dengan baik dan tertib 12 Terdapat belanja modal yang dianggarkan pada belanja barang pakai habis 13. Terdapat pengelolaan keuangan yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku 14. Pengaturan bantuan bencana belum sesuai aturan yang berlaku 15. Tugas lembaga koordinasi kesejahteraan sosial belum memupedoman undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial 16. Pendataan atas lembaga kesejahteraan sosial dan izin atas pengumpulan uang dan barang belum berjalan efektif 17. Pelaksanaan sub kegiatan pemberian layanan kedaduratan dan pemberian layanan rujukan yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan 18. Terdapat dokumen pertanggungjawaban yang telah direalisasikan akan tetapi belum diverifikasi oleh PPK SKPD 19. Terdapat surat keputusan perpanjangan pegawai kontrak yang belum sesuai aturan 20. Pelaksanaan kegiatan belum dilengkapi dengan standar operasional prosedur, penetapan kriteria dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 1. Ketidaksesuaian dokumen anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dengan peraturan menteri sosial RI nomor 9 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota 2. Terdapat belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya senilai Rp3.465.000,- 3. Terdapat kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp. 1.063.800,- 4.Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tahun 2023 belum dilakukan verifikasi secara memadai 5. Terdapat data terkait penerimaan pelayanan dasar rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan dan pengemis di luar panti yang belum dilakukan verifikasi dan validasi	
						Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya						Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya					
						Persentase Orang terlantar yang terlangani						Persentase Orang terlantar yang terlangani					
					program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi	Dinas Sosial	Urban II			program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi	418.509.900	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
						Persentase Fakir miskin yang ditangani						Persentase Fakir miskin yang ditangani					
							Dinas Sosial				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	Persentase warga migran terlantar terlangani	-	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
							Dinas Sosial				Program Penanganan Bencana	persentase penanganan korban bencana alam	92.435.500	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
							Dinas Sosial					persentase penanganan korban bencana sosial					
							Dinas Sosial				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	persentase pemeliharaan TMP	20.528.200	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS)	Persentase Tenaga Teknis yang terampil	Dinas Dalduk dan KB	Urban II			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS)	Persentase Tenaga Teknis yang terampil	1.337.352.800			Tahun 2021 1. Kelebihan pembayaran perawatan kendaraan dinas roda 4 sebesar Rp.5.462.400,- 2. Penerimaan pembayaran ganda uang transportasi sebesar Rp.500.000,-	
						Persentase Keluarga yang aktif Dalam Kelompok Kegiatan (Tribina UPPKA)						Persentase Keluarga yang aktif Dalam Kelompok Kegiatan (Tribina UPPKA)					
					Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Persentase Wirausaha muda	Dinas Pemuda dan Olahraga	Urban I			Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Persentase Wirausaha muda	341.550.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan	Tahun 2021 1 Terdapat pembayaran belanja yang tidak sesuai dengan SSH TA 2020 dan 2021 sebesar Rp.8.145.000,- 2. Terdapat penganggaran dan pembayaran belanja yang belum diatur dalam SSH tahun 2020 dan 2021 3. Terdapat kelebihan pembayaran harapan tagi dan perjalanan dinas sebesar Rp.467.650,- 4. Terdapat pembayaran ganda sebesar Rp.800.000,- 5. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.8.059.000,- 6. Terdapat ketidaksesuaian belanja modal antara SPJ dengan fisik barang yang dibeli 7. Terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai perencanaan dan peruntukan 8. Terdapat kelemahan dalam evalusi dan verifikasi penganggaran dana hibah uang tahun 2021 9. Kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan cabang olahraga berprestasi di tingkat daerah 10. Pertanggungjawaban keuangan BBM perjalanan dinas tahun 2021 yang tidak tertib dan tidak akuntabel 11. Realisasi belanja kegiatan permasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat tidak mencerminkan pencapaian output kegiatan	
						Jumlah Pemuda Pelopor						Jumlah Pemuda Pelopor				12. Terdapat SPJ yang barangnya tidak dapat ditunjukkan secara lengkap dan yang tidak dilengkapi bukti pendukung yang cukup	
						Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif						Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif				Tahun 2022 1. Terdapat pengadaan barang dan pembayaran biaya transportasi atlet, pelatih/official/pendampingan yang tidak ada realisasi fisiknya sebesar Rp.400.664.997,- 2. Pembayaran BBM bus yang tidak sesuai perencanaan dan peruntukan sebesar Rp.1.261.000,- 3. Pelaksanaan transaksi non tunai yang tidak sesuai aturan	

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengempu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
						Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi Kepemudaan						Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi Kepemudaan				4. Nilai belanja pemeliharaan kendaraan roda empat tidak sesuai dengan standar maksimal nilai belanja yang telah ditetapkan dalam standar satuan harga Tahun 2023 1. Honorarium tim pengelola website Dinas yang tidak memiliki dasar pembayaran 2. Kelebihan pembayaran penggantian pengiapan perjalanan dinas sebesar Rp.447.000,- 3. Kelebihan pembayaran upah bukang pekerjaan pemeliharaan taman pelanggang dalamnya tahunan paku sebesar	
					Program Perlindungan Perempuan	Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan	DPPPA	Urban II	Tujuan: Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak		Program Perlindungan Perempuan	Persentase penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan	247.979.500	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Pertanggungjawaban keuangan belum dilengkapi dengan bukti yang sah dan lengkap 2. Pembayaran transaksi keuangan belum dilakukan secara non tunai 3. Terdapat transaksi keuangan berupa panjar yang belum dipertanggungjawabkan senilai Rp.37.013.115,- 4. Terdapat kurang pungut dan setor PPN oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.200.000,- Tahun 2022 1. Pembayaran BBM kendaraan dinas yang tidak sesuai perencanaan dan peruntukan sebesar Rp.3.074.750,- 2. Pelaksanaan transaksi non tunai (non cash transactions) yang tidak sesuai aturan 3. Nilai belanja pemeliharaan kendaraan roda empat tidak sesuai dengan standar maksimal nilai belanja yang telah ditetapkan dalam standar satuan harga	
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani sesuai standar	DPPPA	Urban II	Sasaran: Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG (%)	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani sesuai standar	280.057.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan	Tahun 2023 1. Pelaksanaan belanja dengan transaksi non tunai (non cash transactions) belum sesuai aturan berlaku 2. Evaluasi kepuasan layanan bagi penerima manfaat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum dilaksanakan sesuai ketentuan 3. Capaian kinerja indikator kinerja sasaran "Persentase OPD yang melaksanakan PPRG belum terlaksana secara maksimal	
			Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase OPD yang sudah melaksanakan PUG melalui PPRG	DPMPPA	Urban II	Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Persentase organisasi perempuan yang aktif (%)	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase OPD yang sudah melaksanakan PUG melalui PPRG	714.948.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
				Kota Layak Anak		Persentase organisasi	DPMPPA		Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Nilai Evaluasi Kota Layak Anak (KLA)		Persentase organisasi					
						Persentase anggaran responsif gender pada belanja non gaji			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani (%)		Persentase anggaran responsif gender pada belanja non gaji					
					Program Peningkatan kualitas keluarga	Persentase peningkatan ketahanan keluarga	DPMPPA	Urban II		Persentase partisipasi kelembagaan masyarakat yang aktif	Program Peningkatan kualitas keluarga	Persentase peningkatan ketahanan keluarga	5.100.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
					Program Pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	DPMPPA	Urban II			Program Pengelolaan sistem data gender dan anak	Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	390.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak	DPMPPA	Urban II			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak	174.975.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
						predikat kta layak anak						predikat kta layak anak					
						Persentase Kelembagaan anak yang aktif						Persentase Kelembagaan anak yang aktif					
							DPMPPA				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase PKK aktif	1.651.603.500	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
							DPMPPA					Persentase Kelembagaan anak yang aktif					

MSI IV : Optimalisasi Penataan Ruang dan Pengadaan Infrastruktur Kota Berwawasan Lingkungan

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Terwujudnya Tata Ruang dan Infrastruktur kota Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan RTRW	Dinas PUPR	Irban I	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Penataan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan RTRW	625.937.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Kekurangan volume pekerjaan fisik sebesar Rp.19.250.393,- 2. Kelebihan pembayaran sebesar Rp.15.513.901,- kekurangan pembayaran sebesar Rp.3.820.487,- kelebihan pungut pajak sebesar Rp.5.718.218,- SPJ yang ada di BKU tapi tidak ditemukan bukti transfer sebesar Rp.785.000,- dan selisih saldo buku dan saldo kas sebesar Rp.5.532.172,- 3. Pembayaran tagihan belanja secara non tunai tidak langsung kepada penerima dan penyedia, namun ditransferkan ke rekening staf bidang 4. Kegiatan survey/monitoring yang belum efektif dan efisien 5. Laboratorium Dinas PUPR belum dimanfaatkan secara optimal 6. Terdapat kelebihan pembayaran belanja survey sebesar Rp.213.750,- 7. Belum adanya pengamatan asset atas tanah fasos yang diperoleh Tahun 2022 1. Pembayaran ganda pelaksanaan perjalanan dinas dalam provinsi, perjalanan dinas luar kota luar provinsi dengan perjalanan dinas dalam kota (survey) sebesar Rp.2.600.000,- 2. Kekurangan volume pekerjaan irigasi banda tabek payo sebesar Rp.1.097.000,- 3. Pelaksanaan belanja dengan transaksi non tunai belum sesuai aturan berlaku 4. Nilai belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua tidak sesuai dengan standar satuan harga pemerintah daerah	
			Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Indeks kaltas Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Kelaatan usahakegiatan terhadap pertetujuan lingkungan, pertetujuan teknis dan PUU LH yang di Terbitkan	Dinas LH	Irban III			Program Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase kelaatanusahakegiatan terhadap pertetujuanlingkungan, persentaseteknis dan PUU LHyang diterbitkan	2.275.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Adanya pembayaran ganda perjalanan dinas dan honorarium kegiatan (survey) TA 2020 sebesar Rp.667.500 2. Terdapat belanja monitoring dan evaluasi yang tidak ada output dan laporan tertulisnya 3. Terdapat perbedaan antara pemakai mesin potong rumput dan betor dari SK Kepala DLH serta penyerahannya belum didukung dengan berita acara serah terima 4. Pengelolaan barang milik daerah tidak sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 Tahun 2022 1. Terdapat pembayaran uang harian perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan SSH Tahun 2021 sebesar Rp400.000,- 2. Terdapat inefisiensi pengadaan barang/jasa sebesar Rp800.000 3. Pelaksanaan hak dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup belum terlaksananya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. UPTD Laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup belum terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan personil yang tidak memenuhi persyaratan di laboratorium 5. Taman keanekaragaman hayati belum termanfaatkan dengan baik 6. Terdapat belanja atas pengadaan barang yang belum dicatatkan ke dalam daftar pengadaan barang milik daerah 7. Administrasi pengelolaan barang belum dilaksanakan sesuai Permendagri No.19 Tahun 2016 Tahun 2023 1.Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas yang Belum Efisien dan Efektif 2. Pertanggung Jawaban Keuangan belum Dilengkapi dengan Bukti Yang Lengkap	
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati(Kehati)	Persentase Luasan RTH Publik	Dinas LH	Irban III			Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase Luasan RTHPublik Persentase penyediaandata potensi dapemanfaatankeanekaragaman hayatidi kota solok	3.677.735.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
			Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Indeks kualitas pemukiman	Program Penyelenggaraan jalan	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	Dinas PUPR	Irban I	Meningkatnya Kualitas jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	12.688.473.925	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Kekurangan volume pekerjaan fisik sebesar Rp.19.250.393,- 2. Kelebihan pembayaran sebesar Rp.15.513.901,- kekurangan pembayaran sebesar Rp.3.820.487,- kelebihan pungut pajak sebesar Rp.5.718.218,- SPJ yang ada di BKU tapi tidak ditemukan bukti transfer sebesar Rp.785.000,- dan selisih saldo buku dan saldo kas sebesar Rp.5.532.172,-	
					Program Kawasan Pemukiman	Persentase Kawasan pemukiman kumuh dibawah 10ha di Kabupaten/kota yang ditangani	Dinas Pekim	Irban III								Tahun 2021 1. Adanya kekoyakan kas bendahara pengeluaran DPKP per 6 Oktober 2021 sebesar Rp. 63.785.323,- 2. Adanya kekurangan pembayaran honorarium Tim Addendum, Pejabat PHP (PPHP) dan Tim Pengawasan Pekerjaan Fisik sebesar Rp.9.000.400,- 3. 4 dari hasil uji petik pada pekerjaan pengecoran bahu jalan Jl. Padang Lindang (dari Gawan tembusa ke Depag) VI Suku tahun 2020 tidak memenuhi spesifikasi teknis yang diperjanjikan 4.Hasil cor beton senilai Rp.46.709.805,79 pada pekerjaan drainase/jalan belakang DPRD tahun 2020 tidak memenuhi spesifikasi teknis yang diperjanjikan 5. Hasil pengadaan pekerjaan perencanaan drainase/gorong-gorong tahun 2020 kurang dari yang diperjanjikan 6. Pengelolaan BMD belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku Tahun 2022 1. Terdapat asset dinas Pekim yang dibawa oleh Bidang Penyelenggaraan Bangunan ke Dinas PUPR dan belum dikembalikan ke Dinas Pekim 2. Terdapat satu unit laptop merk asus dan satu unit meteran digital yang rusak tidak ditemukan fisiknya 3. Terdapat 1 unit laptop dell intel core 17 yang hilang karena kemalingan dirumah staf Dinas Pekim 4. Terdapat selisih saldo buku kas umum (BKU) dengan rekening koran per tanggal 01 Juli 2022 sebesar minus Rp.347.695,- Tahun 2023 1. Terdapat kekurangan fisik pembelian suku cadang kendaraan dinas 2. Belanja fotocopy tidak akuntabel dan biaya jilid yang tidak sesuai SSH 3. Pelaksanaan pelatihan dinas belum efektif dan efisien	
					Program perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni yang tersedia	Dinas Pekim	Irban III			Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	persentase rumah layakhuni yang tersedia	260.605.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air dalam Kondisi Baik	Dinas PUPR	Irban I	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik	5.381.136.950	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Kekurangan volume pekerjaan fisik sebesar Rp.19.250.393,- 2. Kelebihan pembayaran sebesar Rp.15.513.901,- kekurangan pembayaran sebesar Rp.3.820.487,- kelebihan pungut pajak sebesar Rp.5.718.218,- SPJ yang ada di BKU tapi tidak ditemukan bukti transfer sebesar Rp.785.000,- dan selisih saldo buku dan saldo kas sebesar Rp.5.532.172,- 3. Pembayaran tagihan belanja secara non tunai tidak langsung kepada penerima dan penyedia, namun ditransferkan ke rekening staf bidang 4. Kegiatan survey/monitoring yang belum efektif dan efisien	

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD						Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	Dinas PUPR	Irban I			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap Rumah	319.093.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan	5. Laboratorium Dinas PUPR belum dimanfaatkan secara optimal 6. Terdapat kelebihan pembayaran belanja survey sebesar Rp.213.750,- 7. Belum adanya pengamatan asset atas tanah fasos yang diperoleh Tahun 2022 1. Pembayaran ganda pelaksanaan perjalanan dinas dalam provinsi, perjalanan dinas luar kota luar provinsi dengan perjalanan dinas dalam kota (survey) sebesar Rp.2.600.000,- 2. Kekurangan volume pekerjaan irigasi benda tabek payo sebesar Rp.1.097.000,- 3. Pelaksanaan belanja dengan transaksi non tunai belum sesuai aturan berlaku 4. Nilai belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua tidak sesuai dengan standar satuan harga pemerintah daerah 5.Perjalanan dinas dalam kota yang tidak efektif Tahun 2023 1. Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp.3.092.000,- 2. Terlambatnya waktu penerbitan dan penyerahan surat keputusan izin pemanfaatan ruang (SK-PR) kepada masyarakat pengguna layanan 3. Pembayaran pekerjaan fisik yang tidak memiki dasar perhitungan 4. Capaian kinerja dalam laporan kinerja DPUPR tahun 2022 belum menggambarkan kondisi sebenarnya	
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Dinas PUPR	Irban I			Program pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	820.360.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
					program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU)	Dinas Perkim	Irban III			Program peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	10.233.700.503	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Adanya kekurangan kas bendahara pengeluaran DPKP per 6 October 2021 sebesar Rp. 93.785.323,- 2. Adanya kekurangan pembayaran honorarium Tim Addendum, Pejabat PHP (PPHP) dan Tim Pengawasan Pekerjaan Fisik sebesar Rp.9.099.400,- 3. 4 dan hasil uji coran pada pekerjaan pengecoran baku jalan Jl. Padang Lindang (dari Gawan tembusa ke Dapag) VI Suku tahun 2020 tidak memenuhi spesifikasi teknis yang diperjanjikan 4.Hasil cor beton senilai Rp.46.709.865,79 pada pekerjaan drainase/jalan belakang DPRD tahun 2020 tidak memenuhi spesifikasi teknis yang diperjanjikan 5. Hasil pengadaan pekerjaan perencanaan drainase/gorong-gorong tahun 2020 kurang dari yang diperjanjikan	
MISI V: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Manajemen Birokrasi yang bersih, efektif dan efisien																	
	Meningkatkan Kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM Pelayanan Publik													
				Indeks Profesionalitas ASN													
					Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KIA	Dinas Dukcapil	Irban I	Tujuan: Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki KIA	168.675.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Terdapat distribusi buku profil perkembangan kependudukan Kota Solok dan Buku Data Agregat Kependudukan Kota Solok yang belum maksimal 2. Terdapat biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai perencanaan dan peruntukan 3. Terdapat Kelemahan dalam pengelolaan Arsip kependudukan dan pencatatan Sipil 4. Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kurang Memadai Tahun 2022 1. Pelaksanaan belanja dengan transaksi non tunai (non cash transaction) dalam sesuai aturan berlaku 2.Nilai belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda empat tidak sesuai dengan standar maksimal nilai belanja yang telah ditetapkan dalam Standar Satuan Harga 3.Kurang lengkapnya pemenuhan administrasi pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam kota 4. Pengelolaan barang milik daerah dan barang persediaan belum sesuai aturan yang berlaku Tahun 2023 1. Belum Optimalnya Capaian Realisasi Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Lingkungan Pemerintah Kota Solok 2. Belum Dilakukannya Evaluasi Hasil Survay kepuasan Masyarakat (SKM) 3. Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	
												Persentase penduduk yang memiliki KK					
										Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan		Persentase penduduk yang memiliki KTP		Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
						Persentase Kepemilikan KTP/el	Dinas Dukcapil		Sasaran: 1. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio penduduk yang memiliki KTP	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akte perceraian	36.635.300	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Merupakan sektor unggulan		
												Persentase kepemilikan akte perkawinan					
												Persentase penduduk meninggal dunia yang diurus akte kematiannya					
												Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran					
							Dinas Dukcapil				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kesesuaian pemanfaatan data dan informasi kependudukan	12.030.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD							Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)	(17)	(18)
							Dinas Dukcapil				Program pengelolaan profil kependudukan	Data agregat kependudukan	-		Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
										Rasio penduduk memiliki akte kelahiran								
										Rasio penerbitan kartu keluarga (KK)								
										Rasio penduduk meninggal dunia yang diurus akte kematiannya								
										Rasio anak umur < umur 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak								
									2. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data penduduk	Penurunan persentase data ganda								
										Penurunan persentase anomali data								
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Dinas Kominfo											
					Program Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Dinas Kominfo											
					Program Pengembangan Sumber daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi PNS	BKPSDM	Irban I	Tujuan: Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Indeks Profesional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan sumber daya manusia	138.770.000		Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Kelebihan pembayaran kegiatan sebesar Rp 2.700.000,- 2. Pelaksanaan transaksi non tunai (Non Cash Transactions) yang tidak sesuai aturan 3. Pembayaran kegiatan belum dilaksanakan dengan tertib 4. Pemutakhiran data kepegawaian ASN Kota Solok belum dilaksanakan 5. Belum terdapatnya laporan kegiatan pada bidang perencanaan dan pembinaan aparatur Tahun 2022 1. Rendahnya pencapaian indeks profesionalisme aparatur sipil negara (IP ASN) Kota Solok 2. Administrasi pertanggungjawaban keuangan belum dilaksanakan dengan tertib dan akuntabel serta belum didukung dengan bukti yang lengkap 3. Pengimputan data profil PNS pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (Simpeg) belum lengkap dan akurat 4. Pengelolaan barang milik daerah belum dilaksanakan sesuai ketentuan	
			Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)			BKPSDM		Sasaran: Meningkatnya pengelolaan penempatan ASN sesuai asfirin	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi dan syarat jabatan	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan pelayanan kepegawaian melalui aplikasi kepegawaian	788.579.000		Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan	Tahun 2023 1. Pelaksaan belanja dengan transaksi non tunai (non cash transactions) belum sesuai aturan berlaku 2. Kurang lengkapnya pemenuhan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 3. Pertanggungjawaban belanja bahan bakar minyak (BBM) belum sepenuhnya menggunakan sistem atcost 4. Indeks profesionalitas ASN Kota Solok tahun 2021 masih rendah	
				Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)								Ketersediaan sistem informasi penilaian kinerja						
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah								Persentase keterisian jabatan						
				Tingkat Kematangan Implementasi SPIP								Persentase pelanggaran disiplin pegawai						
				Indeks SPBE								Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu						
												Persentase spesifikasi pendidikan aparatur sesuai spesifikasi jabatan						
									Meningkatnya manajemen kinerja aparatur	Persentase pegawai berkinerja baik (≥90)								
									Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat								

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD										
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program	Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketesuaian dokumen perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA	Irban II	Tujuan: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah	409.856.410	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan	Tahun 2021 1. Terdapat duplikasi pelaksanaan kegiatan yang bukan kewenangan Bappeda Kota Solok pada kegiatan penyusunan dan pengumpulan database perencanaan pembagunan 2. Belum disusun kerangka acuan kerja (KAK) sub bidang data dan informasi Bappeda Kota Solok tahun 2020 3. Belum efektif dan efisiennya penggunaan anggaran pada kegiatan penyusunan dan pengumpulan databaseperencanaan pembangunan daerah 4. Terdapat objek belanja kegiatan yang tidak berkorelasi langsung terhadap pencapaian ouput pada kegiatan pemeliharaan gedung kantor 5. Kelemahan dalam pengalokasian belanja kegiatan yang tidak berpengaruh terhadap pencapaian output kegiatan 6. Terdapat pengulangan yang kurang efektif dan efisien pada kegiatan penyusunan RPJMD Teknokratik tahun 2020 Tahun 2024 1.Pelaksanaan pemeliharaan gedung secara swakelola tidak berpedoman pada peraturan presiden RI Nomor 12 tahun 2021 2. Terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran 3. Terdapat BMD yang tidak ditemukan 4. Terdapat dokumen pertanggungjawaban berupa belanja pemeliharaan yag tidak dijelaskan penggunaannya sebilai Rp2.500.000,- 5. Terdapat kelebihan pembayaran belanja atas pembelian suku cadang senilai Rp.5.269.000,- 6. Pengendalian silhubungan dengan belanja pemeliharaan kendaraan dinas belum memadai	
									Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan	Indeks kualitas perencanaan								
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	BAPPEDA	Irban II			Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	1.030.227.100	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketesuaian Pengelolaan Keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	BKD	Irban II			Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	7.968.040.616	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan	Tahun 2023 1. Terdapat kurang setor uang yang harus dipertanggung jawabkan (UYHD) pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.818.880,49 2. Terdapat kurang setor atas penerimaan pajak senilai Rp.705.632,- 3. Pencatatan dan pendokumentasian atas transaksi pajak belum memadai	
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketesuaian pelaporan BMD sesuai aturan yang berlaku	BKD	Irban II			Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase kesesuaian pelaporan BMD sesuai aturan berlaku	2.499.600.505	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian realisasi PAD	BKD	Irban II			Program pengelolaan pendapatan daerah	Capaian realisasi PAD	488.651.979	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indeks Penguatan Pengawasan	Inspektorat	Irban I	Tujuan: Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi komponen pengawasan	Program penyelenggaraan pengawasan	Indeks penguatan pengawasan	483.750.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
												Indeks penguatan pengawasan					
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Tingkat Maturitas SPIP	Inspektorat	Irban I	Sasaran: 1. Terwujudnya pengawasan yang efektif	1. Persentase opik yang tidak mendapatkan temuan berindikasi kerugian daerah/negara	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Indeks RB	233.888.000	Mendukung sasaran RPJMN dan RPJMD	Bukan sektor unggulan		
										2. Persentase kerugian daerah		Jumlah unit kerja yang mendapatkan wilayah					
										3. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal		Level kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah APIP					

No	RPJMD							RENCANA STRATEGIS OPD							Program Prioritas terkait di RPJMN/ Indikator Program	Sektor Unggulan	Informasi terkait temuan dan TL, Potensi Fraud, Kasus Hukum	Isu Terkini
	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Program RPJMD	Indikator Program	OPD/Unit Pengampu	IRBAN PENGAMPU	Tujuan/ Sasaran dalam Renstra	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran Program					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
										4. Persentase Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal		Persentase laporan gratifikasi yang sudah ditindak lanjuti					
										5. Persentase Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang diselesaikan sebelum 60 hari		Tingkat kematangan kapabilitas APIP					
										6. Pencapaian level kapabilitas APIP Inspektorat Kota Solok		Tingkat maturitas SPIP					
										7. Persentase perangkat daerah yang menyatakan puas atau layanan Inspektorat Kota Solok							
										8. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat Minimal BB							
									2. Terselesaikannya pengaduan masyarakat	1. Jumlah pengaduan masyarakat diselesaikan							
									3. Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase perangkat daerah yang telah mengimplementasikan SPIP							
										2. Indeks RB							
										3. Jumlah unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Solok yang mendapatkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)							

Draft Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Pemerintah Kota SPGK
Tahun Penilaian : 2023
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	BELUM EVALUASI															SETELAH EVALUASI																RATA-RATA NILAI RISIKO		
			Risiko			Sebab				Dampak								Risiko			Sebab				Dampak										
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
MISI I	Membangun Masyarakat yang berbudiluhur religius beradab dan berbudaya melalui pengamalan nilai-nilai agama dan kebhinekaan serta pengembangan nilai budaya																																			
	Meningkatkan Kepribadian Masyarakat yang Religius beradat dan berbudaya.	Persentase penurunan penyakit masyarakat.																																		
a	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengalaman Ajaran Agama	Indeks Kesalehan	Keterlibatan Pimpinan OPD terkait pencapaian nilai evaluasi SAKIP belum optimal	RSP1	Walikota	1. Pengetahuan dan Komitmen Kepala OPD tentang SAKIP masih rendah	Internal	C	1. Gagal memperoleh DID 2. Target walikota tidak tercapai	Walikota, Masyarakat	5	3	15	1. Penerapan mekanisme reward dan punishment 2. Peningkatan kompetensi penyusun SAKIP	Tujuan: Meningkatkan reformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Keterlibatan Pimpinan OPD terkait pencapaian nilai evaluasi SAKIP belum optimal	RSP1	Walikota	1. Pengetahuan dan Komitmen Kepala OPD tentang SAKIP masih rendah	Internal	C	1. Gagal memperoleh DID 2. Target walikota tidak tercapai	Walikota, Masyarakat	5	3	15	1. Penerapan mekanisme reward dan punishment 2. Peningkatan kompetensi penyusun SAKIP	4,50	3,67	16,50
						2. Koordinasi antar OPD pengampu belum terlaksana dengan baik	Internal	C	Belum optimalnya kinerja kepala OPD sesuai tupoksi											2. Koordinasi antar OPD pengampu belum terlaksana dengan baik	Internal	C									
						3. Belum adanya mekanisme reward dan punishment	Internal	C	Belum optimalnya kinerja pegawai sesuai tupoksi											3. Belum adanya mekanisme reward dan punishment	Internal	C									
			Capaian Nilai IKM masih berada dibawah target yang diharapkan	RSP2	Walikota	Komitmen Kepala OPD untuk peningkatan kualitas layanan masih rendah	Internal	C	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat/ pengguna layanan terhadap [illegible]	Walikota/ masyarakat	5	3	15	1. Membuat Aplikasi e-SKM 2. Melaksanakan SKM secara mandiri	Sasaran: 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. 2. Meningkatnya Akuntabilitas	IKM Pelayanan Publik	Capaian Nilai IKM masih berada dibawah target yang diharapkan	RSP2	Walikota	Komitmen Kepala OPD untuk peningkatan kualitas layanan masih rendah	Internal	C	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat/ [illegible]	Walikota/ masyarakat	5	3	15	1. Penerapan mekanisme reward dan punishment 3. Peningkatan kompetensi [illegible]	4,33	3,83	16,61
						Rencana Tindak Lanjut hasil SKM belum sepenuhnya dilaksanakan	Internal	C	Belum optimalnya pelayanan publik	Masyarakat										Rencana Tindak Lanjut hasil SKM belum sepenuhnya dilaksanakan	Internal	C									
																	Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan menjadi objek temuan Auditor pengawasan sehingga mempengaruhi kinerja kegiatan	RO09	Kepala Bag Keuang	1. Keterlambat pembayaran	Internal	C	Tingkat akuntabilitas menjadi rendah	ASN	4	4	16	Meningkatkan kompetensi ASN dan menerapkan mekanisme reward dan punishment	4,17	4,00	16,67
																				2. Pengadaan belum sesuai aturan	Internal	C									
																				3. Bukti SPJ belum lengkap dan kurang valid											
			Jumlah kasus politik uang masih cukup tinggi sehingga mencederai demokrasi	RSO1	Kepala Kantor Kesbangpol	1. pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih rendah	Eksternal	UC	Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Masyarakat	5	4	20	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama	Tujuan : Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Stabilitas Politik	1. Persentase Penanganan konflik sosial	Jumlah kasus politik uang masih cukup tinggi sehingga mencederai demokrasi	RSO1	Kepala Kantor Kesbangpol	1. pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih rendah	Eksternal	UC	Menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Masyarakat	5	4	20	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama	4,17	4,00	16,67
						2. Faktor tingkat ekonomi yang masih rendah	Eksternal	UC	Politik uang sulit diberantas	Masyarakat										2. Faktor tingkat ekonomi yang masih rendah	Eksternal	UC	Politik uang sulit diberantas	Masyarakat							
						3. Penyuluhan yang dilakukan masih minim dan belum efektif	Internal	C	generasi muda menjadi rusak	Masyarakat										3. Penyuluhan yang dilakukan masih minim dan	Internal	C	generasi muda menjadi rusak	Masyarakat							
	Sasaran 2: Peningkatan Ketahanan Politik	2. Persentase pemilih dalam Pemilu	Penyuluhan bagi pemilih pemula masih sangat minim sehingga potensi terjadi politik uang menjadi tinggi	RSO2	Kepala Kantor Kesbangpol	1. Penyuluhan yang dilakukan masih minim dan belum efektif	Internal	C	Pemilu berjalan tidak berkualitas	Masyarakat	5	2	8		Sasaran 2: Peningkatan Ketahanan Politik	2. Persentase pemilih dalam Pemilu	Penyuluhan bagi pemilih pemula masih sangat minim sehingga potensi terjadi politik uang menjadi tinggi	RSO2	Kepala Kantor Kesbangpol	1. Penyuluhan yang dilakukan masih minim dan belum efektif	Internal	C	Pemilu berjalan tidak berkualitas	Masyarakat							
						2. Kerjasama dengan pihak Sekolah (SLTA) dan perguruan tinggi masih belum optimal	Internal	C	Generasi Muda/Pemilih Pemula menjadi rusak	Masyarakat							pernyataan risiko adalah bahasa pagelaran			2. Kerjasama dengan pihak Sekolah (SLTA) dan perguruan tinggi masih belum optimal	Internal	C	Generasi Muda/Pemilih Pemula menjadi rusak	Masyarakat							
			Masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD	RSO5	Kepala Kantor Kesbangpol	1. Tokoh Perempuan yang dicalonkan Partai Politik tidak didukung oleh masyarakat (tanpa kaum	Eksternal	UC	Hak perempuan banyak terabaikan	Masyarakat	4	3	12				Masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD	RSO5	Kepala Kantor Kesbangpol	1. Tokoh Perempuan yang dicalonkan Partai Politik tidak didukung oleh	Eksternal	UC	Aspirasi perempuan banyak terabaikan	Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan kompetensi calon perempuan, bekerja sama dengan Parpol	4,00	4,00	16,00
						2. Pencalonan perempuan baru hanya sekedar pemenuhan kuota	Internal	C												2. Pencalonan perempuan baru hanya sekedar pemenuhan kuota	Internal	C						2. Meningkatkan sosialisasi kepada pemilih perempuan			
							Eksternal	UC												3. Kompetensi calon perempuan belum memadai	Eksternal	UC									
			Perencanaan belum didukung dengan data yang akurat dan lengkap	RO01	Kasi	1. Perencanaan masih dipandang sebagai rutinitas	Internal	C	Target OPD tidak tercapai maksimal	Kantor Kesbangpol	3	3	9				Perencanaan belum didukung dengan data yang akurat dan lengkap	RO01	Kasi	1. Perencanaan masih dipandang sebagai rutinitas	Internal	C	Target OPD tidak tercapai maksimal	OPD dan masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan kompetensi SDM	4,00	4,00	16,00
						2. Hasil evaluasi belum berdampak kepada perbaikan perancanaan														2. Hasil evaluasi belum berdampak kepada perbaikan perancanaan	Internal	C						2. Meningkatkan pengendalian pimpinan atau atasan			
																				3. Daftar inventaris masalah (DIM) belum disusun	Internal	C									
			Pertanggungjawaban kegiatan menjadi temuan pemeriksaan	RO04	Kepala Kantor dan Kepala Seksi	Administrasi belum lengkap	Internal	C	Adanya Temuan Hasil Pemeriksaan	Kantor Kesbangpol	3	3	9				Pertanggungjawaban kegiatan menjadi temuan pemeriksaan	RO04	Kepala Kantor dan Kepala Seksi	Administrasi belum lengkap	Internal	C	Tingkat akuntabilitas keuangan rendah	OPD dan masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan kompetensi SDM	4,00	4,00	16,00

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI – Risiko – Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI – Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko – Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO – Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
				ROO5		Kelebihan pembayaran	Internal	C		Kanit/ Kasatlingpol										Kelebihan pembayaran	Internal	C						2. Meningkatkan pengendalian pimpinan atau atasan			
				ROO6		Kekurangan fisik/volume pengadaan	Internal	C		Kanit/ Kasatlingpol										Kekurangan fisik/volume pengadaan	Internal	C									
			Pelanggaran terhadap Perda Trantibum masih tinggi terutama penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi	RSO1	Kepala Satuan	Kurangnya Sosialisasi tentang Perda Trantibum	Eksternal	C	Penegakan Perda Kurang Efektif	Pemerintah Daerah, Masyarakat	4	4	16	1. Melakukan Sosialisasi dan implementasi Perda dan Perwako secara menyeluruh dan efektif 2. Penertiban harus tetap dilakukan 3. Dukungan dari OPD terkait dan Muspida serta Anggota legislatif	Tujuan : peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan PERDA	Pelanggaran terhadap Perda Trantibum masih tinggi terutama penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi	RSO1	Kepala Satuan Pol PP	Kurangnya Sosialisasi tentang Perda Trantibum	Internal	C	Penegakan Perda Kurang Efektif	Pemerintah Daerah, Masyarakat	4	4	16	1. Melakukan Sosialisasi dan implementasi Perda dan Perwako secara menyeluruh dan efektif 2. Penertiban harus tetap dilakukan 3. Dukungan dari OPD terkait dan	4,00	4,00	16,00
						Masih banyak masyarakat yang belum faham mengenai Perda Trantibum	Internal	C							Sasaran : Meningkatkan penegakan aturan dan perlindungan masyarakat	Cakupan petugas perlindungan Masyarakat (Linmas)				Masih banyak masyarakat yang belum faham mengenai Perda Trantibum	Eksternal	C									
						Sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera	Eksternal	C												Sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera	Eksternal	C									
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	RSO2	Kepala Satuan	Pola pikir masyarakat bahwa tanggung jawab keamanan berada di aparat keamanan	Eksternal	C	Meningkatnya Kasus Pelanggaran	Masyarakat	4	4	16	1. Piket keamanan secara rutinitas dengan melibatkan masyarakat 2. Melakukan sosialisasi tentang pertunya keterlibatan masyarakat dalam keamanan lingkungan ke setiap Kelurahan			Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	RSO2	Kepala Satuan Pol PP	Pola pikir masyarakat bahwa tanggung jawab keamanan berada di aparat keamanan	Eksternal	C	Meningkatnya Kasus Pelanggaran	Masyarakat	4	4	16	1. Piket keamanan secara rutinitas dengan melibatkan masyarakat 2. Melakukan sosialisasi tentang pertunya keterlibatan masyarakat dalam keamanan lingkungan ke	4,00	4,00	16,00
						Masih minimnya sosialisasi tentang pertunya keterlibatan masyarakat dalam keamanan lingkungan														Masih minimnya sosialisasi tentang pertunya keterlibatan masyarakat dalam keamanan lingkungan	Internal	C									
						Banyaknya poskamling yang tidak berfungsi secara aktif														Banyaknya poskamling yang tidak berfungsi secara aktif	Eksternal	UC									
			Belum optimalnya peran tupoksi bidang trantib dalam penegakan Perda	ROO 8	Kabid Trantib dan Kasi Operasional dan Pengendalian	Kurangnya personil yang turun kelapangan	Internal	C	Kurangnya optimalnya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan	Personil Pol PP	4	4	16	1. Penambahan Personil 2. Penyediaan Peralatan Safety			Belum optimalnya peran tupoksi bidang trantib dalam penegakan Perda	ROO 8	Kabid Trantib dan Kasi Operasional dan Pengendalian	Kurangnya personil yang turun kelapangan	Internal	C	Kurangnya optimalnya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan	Personil Pol PP	4	4	16	1. Penambahan Personil 2. Penyediaan Peralatan Safety	4,00	4,00	16,00
						Peralatan safety yang masih minim	Internal	C												Peralatan safety yang masih minim	Internal	C									
						Kendaraan yang sudah tidak ekonomis	Internal	C												Kendaraan yang sudah tidak ekonomis	Internal	C									
						Sarana komunikasi (HT) yang masih terbatas	Internal	C												Sarana komunikasi (HT) yang masih terbatas	Internal	C									
			Pelanggaran atas penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi masih tinggi	ROO 9	Kabid Trantib dan Polisi Pamong Praja Ahli Muda Bidang Trantib	Tingkat kesadaran masyarakat kurang	Eksternal	C	Bentrokan antar personil terhadap warga/masyarakat	Masyarakat/Warga/PKL disekitarnya	4	4	16	1. Melakukan Sosialisasi Perda Trantibum bersama OPD terkait. 2. Perwako tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Trantibum			Pelanggaran atas penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi masih tinggi	ROO 9	Kabid Trantib dan Polisi Pamong Praja Ahli Muda Bidang Trantib	Tingkat kesadaran masyarakat kurang	Eksternal	C	Bentrokan antar personil dengan warga/masyarakat	Masyarakat/Warga/PKL disekitarnya	4	4	16	1. Melakukan Sosialisasi Perda Trantibum bersama OPD terkait. 2. Menyusun draf Perwako tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Trantibum	4,00	4,00	16,00
						masih minimnya sosialisasi dari OPD terkait	Eksternal	C												masih minimnya sosialisasi oleh OPD terkait	Eksternal	UC									
						Belum adanya Perwako tentang petunjuk teknis pelaksanaan trantibum	Internal	C												Belum adanya Perwako tentang petunjuk teknis pelaksanaan trantibum	Internal	C									
			Kurang optimalnya dampak pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Satpol PP bagi masyarakat	ROO 11	Kabid Trantib dan Kasi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan	Partisipasi masyarakat masih kurang	Eksternal	C	Kurangnya meriahnya penyelenggaraan kegiatan HUT Satpol PP	Personil Pol PP	4	4	16	Melakukan Bakti Sosial di Lingkungan Masyarakat, Masjid, di			Kurang optimalnya dampak pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Satpol PP bagi masyarakat	ROO 11	Kabid Trantib dan Kasi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan	Partisipasi masyarakat masih kurang	Eksternal	C	Belum harmonisnya hubungan masyarakat dengan Satpol PP	Personil Pol PP dan Masyarakat	4	4	16	Melakukan Bakti Sosial di Lingkungan Masyarakat, Masjid, di	4,00	4,00	16,00
						Anggapan masyarakat bahwa kegiatan hanya sebatas seremonial	Eksternal	C												Anggapan masyarakat bahwa kegiatan hanya sebatas seremonial	Eksternal	C									
			Kurangnya aktifnya operasional pada pos penjagaan/ poskamling	ROO 12	Kabid Perlindungan Masyarakat dan Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat	Minimnya swadaya masyarakat	Eksternal	C	Kurang maksimalnya kegiatan pos ronda di Kelurahan	Satgas RT se Kelurahan	4	4	16	Ketersediaan Sarana dan prasarana pada Pos Penjagaan/ poskamling			Kurang aktifnya operasional pada pos penjagaan/ poskamling	ROO 12	Kabid Perlindungan Masyarakat dan Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat	Minimnya swadaya masyarakat dalam pemenuhan sarana dan prasarana	Eksternal	C	Tingkat gangguang keamanan ketertiban masih tinggi	Masyarakat	4	4	16	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan	4,00	4,00	16,00
						Pos Kamling tersedia tetapi tidak dimanfaatkan/ Difungsikan	Eksternal	C												Pos Kamling tersedia tetapi tidak dimanfaatkan/ Difungsikan	Eksternal	UC									
						Sosialisasi terkait pentingnya Pos Ronda belum terlaksana	Eksternal	C												Sosialisasi terkait pentingnya Pos Ronda belum terlaksana	Internal	C									
						Minimnya Sarana dan prasarana	Eksternal	C												Belum efektifnya monitoring dan pembinaan	Internal	C									
			Anggota/personil tidak hadir mengikuti kegiatan Pelatihan Fisik dan Mental	ROO 13	Kabid Trantib dan Kasi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan	Kurangnya kesadaran anggota terhadap manfaat kegiatan pelatihan fisik dan mental	Internal	C	Kegiatan yang dilaksanakan kurang optimal	Personil Pol PP	4	4	16	Melakukan Kegiatan Pelatihan Fisik dan Mental diikuti secara menyeluruh dan efektif oleh personil			Anggota/personil tidak hadir mengikuti kegiatan Pelatihan Fisik dan Mental	ROO 13	Kabid Trantib dan Kasi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan	Kurangnya kesadaran anggota terhadap manfaat kegiatan pelatihan fisik dan mental	Internal	C	Rendahnya disiplin personil yang berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan	Personil Pol PP dan masyarakat	4	4	16	Menerapkan mekanisme reward dan punishment	4,00	4,00	16,00

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO		
			Risiko		Sebab				Dampak								Risiko		Sebab				Dampak								
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
																				Lemahnya penegakan aturan	Internal	C									
			Terjadinya Pembayaran Ganti Rugi Akibat penegakan atas pelanggaran Perda	ROO 14	Jabfd Tranlib	Masyarakat/PHL membutuhkan pengobatan	Eksternal	C	Masyarakat/pihak yang terdampak akibat pelanggaran	Masyarakat/pihak yang terdampak akibat pelanggaran	4	4	16	lok sda roo 14 di sheet 7			Terjadinya Pembayaran Ganti Rugi Akibat penegakan atas pelanggaran Perda	ROO 14	Kacid Tranlib	Masyarakat/PHL membutuhkan pengobatan dan ganti rugi	Eksternal	C	Pemborosan keuangan daerah dan ketidakpercayaan masyarakat	Personil Pol PP dan masyarakat	4	4	16	Meningkatkan kompetensi personil	4,00	4,00	16,00
						Masyrakat Membutuhkan penggantian atas kerugian materi	Eksternal	C												Kompetensi personil yang belum memadai	Eksternal	UC									
			Tingkat kesalahan dalam penegakan perda (Eksekusi) masih tinggi	ROO 15	Jabfd Perlindungan masyarakat/ Polisi Pamong Praja Ahli Muda Bidang Perlindungan	Kompetensi pegawai belum memadai	Internal	C	Pelaksanaan penegakan perda tidak optimal	Personil Pol PP	4	4	16	Keterbatasan Kompetensi SDM Petugas Lapangan			Tingkat kesalahan dalam penegakan perda (Eksekusi) masih tinggi	ROO 15	Kacid Perlindungan Masyarakat/ Polisi Pamong Praja Ahli Muda Bidang Perlindungan	Kompetensi personil belum memadai, terutama Pemahaman terkait prosedur	Internal	C	Potensi terjadinya konflik dan kerugian	Personil Pol PP dan masyarakat	4	4	16	Meningkatkan kompetensi personil dan revisi SOP	4,00	4,00	16,00
						Pemahaman petugas lapangan terkait prosedur kerja masih rendah	Internal	C												SOP yang disusun belum mempertimbangkan resiko konflik	Internal	C									
						Potensi konflik tinggi karena kurangnya dukungan OPD terkait	Eksternal	C												Potensi konflik tinggi karena kurangnya dukungan OPD terkait	Eksternal	UC									
			Peran pembinaan dan penyuluhan belum terlaksana secara optimal	ROO 16	sekretaris	Kompetensi pegawai belum memadai	Internal	C	Pembinaan dan Penyuluhan belum ada	Pegawai Fungsional	4	4	16	1. ketersediaan Jabatan Fungsional Penyuluhan di lingkungan Satpol PP 2. Meningkatkan Kompetensi SDM untuk jabatan Fungsional Penyuluhan			Peran dan fungsi pembinaan/ penyuluhan belum terlaksana secara optimal	ROO 16	Sekretaris	Kompetensi pegawai belum memadai	Internal	C	Fungsi pencegahan belum optimal	Personil Pol PP dan masyarakat	4	4	16	1. ketersediaan Jabatan Fungsional Penyuluhan 2. Meningkatkan Kompetensi SDM untuk jabatan Fungsional Penyuluhan	4,00	4,00	16,00
						Belum adanya jabatan fungsional penyuluhan	Internal	C												Belum adanya jabatan fungsional penyuluhan	Internal	C									
			Pola karir untuk pejabat fungsional belum terfasilitasi dengan baik	ROO 17	sekretaris	Belum adanya tim penilai angka kredit	Internal	C	pejabat fungsional belum terfasilitasi dengan baik	Pegawai Fungsional	4	4	16	Pembentukan Tim Penilai angka kredit di Satpol PP Kota Solok dan pemenuhan angka kredit Pejabat Fungsional			Pola karir untuk pejabat fungsional belum terfasilitasi dengan baik	ROO 17	Sekretaris	Belum adanya tim penilai angka kredit	Internal	C	Tingkat kesejahteraan personil rendah	Personil Pol PP	4	4	16	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan pengajuan formasi pejabat fungsional	4,00	4,00	16,00
						Pemenuhan pencapaian angka kredit	Internal	C												Pemenuhan pencapaian angka kredit	Internal	C									
						Minimnya alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional	Internal	C												Minimnya alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional	Internal	C									
			Pertanggungjawaban kegiatan menjadi tersisan spiral pengawasan	ROO 18	Sekretaris/ Kabid	Kelalaian pembayaran	Internal	C	Tingkat akuntabilitas menjadi rendah	ASN	4	4	16	1. Melakukan pembinaan terkait pertanggung jawaban keuangan 2. Menerapkan sanksi yang sesuai			Pertanggungjawaban kegiatan menjadi tersisan spiral pengawasan	ROO 18	Sekretaris/ Kabid	Kelalaian pembayaran	Internal	C	Tingkat akuntabilitas menjadi rendah	ASN	4	4	16	1. Melakukan pembinaan terkait pertanggung jawaban keuangan 2. Menerapkan sanksi yang sesuai	4,13	4,00	16,50
						Pengadaan tidak sesuai kontrak	Internal	C												Pengadaan tidak sesuai kontrak	Internal	C									
						Administrasi tidak lengkap	Internal	C												Administrasi tidak lengkap	Internal	C									
			Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belum dilakukan	ROO 19	Sekretaris/ Kabid	Kompetensi SDM yang belum memadai	Internal	C	Ketidaktaatan/ kegagalan pencapaian target kinerja tidak bisa diukur	ASN	4	4	16	1. Melakukan pembinaan terkait peningkatan implementasi SAKIP 2. Menerapkan sanksi yang sesuai			Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belum dilakukan	ROO 19	Sekretaris/ Kabid	Kompetensi SDM yang belum memadai	Internal	C	Keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja tidak bisa diukur	ASN	4	4	16	1. Melakukan pembinaan terkait peningkatan implementasi SAKIP 2. Menerapkan sanksi yang sesuai	4,13	4,00	16,50
						Belum adanya tindak lanjut	Internal	C												Belum adanya tindak lanjut	Internal	C									
																				Lemahnya pengendalian oleh atasan	Internal	C									
			Masih banyaknya pelanggaran tertib jalan yang dilakukan masyarakat/Kelompok/ Pelaku Usaha	ROO 20	Jabfd Perlindungan masyarakat dan Kasi peningkatan kapasitas aparatur perlindungan masyarakat	Kurangnya Sosialisasi atas Perda Trantibum No. 4 Tahun 2022 terhadap masyarakat/Kelompok/ Pelaku Usaha terhadap Perda	Eksternal	C	Minimnya perhatian masyarakat/Kelompok/ Pelaku Usaha terhadap Perda	Masyarakat/Kelompok/ Pelaku Usaha	4	4	16	Melakukan Sosialisasi atas Perda Trantibum No. 4 Tahun 2022 terhadap masyarakat/Kelompok/ Pelaku Usaha			Masih banyaknya pelanggaran tertib jalan yang dilakukan masyarakat/Kelompok/ Pelaku Usaha	ROO 20	Kacid Perlindungan Masyarakat dan Kasi peningkatan kapasitas aparatur perlindungan masyarakat	Kurangnya Sosialisasi atas Perda Trantibum No. 4 Tahun 2022 terhadap masyarakat/Kelompok/ Pelaku Usaha	Internal	C	Tingginya tingkat pelanggaran	Personil Pol PP dan masyarakat	4	4	16	Melakukan Sosialisasi atas Perda Trantibum No. 4 Tahun 2022 terhadap masyarakat/Kelompok/ Pelaku Usaha	4,25	4,00	17,00
						Fasilitas yang telah disediakan dianggap kurang strategis														Fasilitas yang telah disediakan dianggap kurang strategis	Eksternal	UC									
			Terjadinya bentrokan fisik dan verbal antar masyarakat/warga dengan personil Pol PP akibat pelanggaran terhadap Perda	ROO 21	Jabfd Tranlib dan Kasi Operasional dan Pengendalian	Kurangnya kesadaran masyarakat/warga akan perda dan Perkada yang telah ditetapkan	Internal	C	Kurangnya empati masyarakat/Kelompok/ Pelaku terhadap pelanggaran yang dilakukan	Masyarakat/Kelompok/ Pelaku Usaha	4	4	16	1. Melakukan Sosialisasi dan implementasi Perda dan Perwako kepada masyarakat/warga 2. Sosialisasi oleh OPD Terkait			Terjadinya bentrokan fisik dan verbal antar masyarakat/warga dengan personil Pol PP akibat pelanggaran terhadap Perda	ROO 21	Kacid Tranlib dan Kasi Operasional dan Pengendalian	Kurangnya kesadaran masyarakat/warga akan perda dan Perkada yang telah ditetapkan	Eksternal	UC	Terjadinya potensi konflik dan kurangnya kepercayaan masyarakat	Personil Pol PP dan masyarakat	4	4	16	1. Melakukan Sosialisasi dan implementasi Perda dan Perwako kepada masyarakat/warga 2. Sosialisasi oleh OPD Terkait 3. Menerapkan sanksi bagi oknum	4,29	4,00	17,14
						Kurang Sosialisasi oleh OPD terkait	Internal	C												Kurang Sosialisasi dari OPD terkait	Eksternal	UC									
						Adanya kepentingan pribadi yang bertentangan dengan aturan	Internal	C												Adanya kepentingan/ego pribadi yang bertentangan dengan aturan	Eksternal	UC									
						Adanya oknum yang melindungi si pelanggar	Internal	C												Adanya oknum yang melindungi si pelanggar	Internal	C									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI – Risiko – Uraian	Risiko – Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sebab – Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Dampak – Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI – Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko – Uraian	Risiko – Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sebab – Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Dampak – Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO – Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
			Kebocoran informasi dalam perandakan pelanggaran	ROO 22	Kabid Trantib/ Polisi Pamong Praja Ahli Muda Bidang Trantib	Oknum petugas yang terlibat dalam tim	Eksternal	C	Kurangnya pelaksanaan terhadap pelanggaran yang dilakukan	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	4	4	16	Pola pengarahan (apel) dilakukan secara tertutup			Kebocoran informasi dalam perindakan pelanggaran	ROO 22	Kabid Trantib/ Polisi Pamong Praja Ahli Muda Bidang Trantib	Adanya oknum yang melindungi si pelanggar	Internal	C	Penegakkan terhadap pelanggaran tidak efektif	Personil Pol PP dan masyarakat	4	4	16	Pola pengarahan (apel) dilakukan secara tertutup dan Menerapkan sanksi bagi oknum pelanggar	4,00	3,88	15,50
						Pola pengarahan (apel) masih dilakukan secara terbuka	Internal	C												Pola pengarahan (apel) masih dilakukan secara terbuka	Internal	C									
			Pertanggungjawaban kegiatan menjadi temuan aparat pemeriksa	ROO 23		- Ketidaksesuaian spesifikasi dan volume - Administrasi yang tidak lengkap - Kelebihan Pembayaran	Internal	C	Tingkat akuntabilitas menjadi rendah	ASN	4	4	16	1. Malakukan pembinaan terkait pertanggung jawaban keuangan 2. Menerapkan sanksi yang sesuai			Pertanggungjawaban kegiatan menjadi temuan aparat pemeriksa/pengawasan	ROO 23		- Ketidaksesuaian spesifikasi dan volume - Administrasi yang tidak lengkap - Kelebihan Pembayaran	Internal	C	Tingkat akuntabilitas menjadi rendah	ASN	4	4	16	1. Melakukan pembinaan terkait pertanggung jawaban keuangan 2. Menerapkan sanksi yang sesuai	4,00	3,89	15,56
			Kurangnya Tenaga PPNS yang ada	ROO 24	Kabid Trantib dan Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kurangnya pelatihan PPNS yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang	Internal	C	Kurang efektifnya dalam menangani kasus pelanggaran	PPNS	4	4	16	pd sheet 7 tdk ada roo 24			Kurangnya jumlah Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	ROO 24	Kabid Trantib dan Polisi Pamong Praja Ahli Muda pada Bidang Ketentraman dan	Kurangnya pelatihan PPNS yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang	Internal	C	Kurang efektifnya dalam menangani kasus pelanggaran	Personil Pol PP dan masyarakat	4	4	16	Mengajukan formasi jabatan PPNS dan meningkatkan kopetensi	4,00	3,89	15,56
																				Keterbatasan formasi untuk PPNS	Eksternal	UC									
	Sasaran : 1. Peningkatan Pelayanan Informasi Bencana	1. Persentase kawasan rawan bencana yang mendapat informasi	Keterlambatan saat pemantauan (deteksi) daerah - daerah rawan bencana	RSO1	Kasi PK, dan Kasi KL	1. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan deteksi bencana	Eksternal	UC	Tidak lancarnya kegiatan	Masyarakat & personil	5	3	15		Sasaran : 1. Peningkatan Pelayanan Informasi Bencana	1. Persentase kawasan rawan bencana yang mendapat informasi	Keterlambatan saat pemantauan (deteksi) daerah - daerah rawan bencana	RSO1	Kasi PK, dan Kasi KL	1. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan deteksi bencana	Eksternal	UC	Tidak lancarnya kegiatan	Masyarakat & Personil	5	4	20		3,80	3,90	14,82
						2. Intensitas pemantauan masih kurang	Internal	C	Tidak lancarnya kegiatan	Masyarakat & personil										2. Intensitas pemantauan masih kurang	Internal	C	Tidak lancarnya kegiatan	Masyarakat & Personil							
						3. Sarana pendukung pemantauan belum lengkap	Internal	C	Tidak lancarnya kegiatan	Masyarakat & personil										3. Sarana pendukung pemantauan belum lengkap	Internal	C	Tidak lancarnya kegiatan	Masyarakat & Personil							
																				4. Tidak tersedianya data perencanaan pemantauan terhadap lokasi rawan bencana	Internal	C	Lokasi rawan bencana tidak terpantau dengan baik	Masyarakat & Personil							
			Informasi tidak sampai dan tidak tepat sasaran serta sering terlambat	RSO2	Kasi PK	1. Lokasi bencana yang tertutup (terisolir)	Eksternal	UC	Sulitnya melakukan evakuasi	Masyarakat & personil	4	4	16				Informasi bencana tidak sampai dan tidak tepat sasaran serta sering terlambat	RSO2	Kasi PK	1. Lokasi bencana yang tertutup (terisolir)	Eksternal	UC	Sulitnya melakukan evakuasi	Masyarakat & Personil	4	4	16		3,80	3,90	14,82
						2. Sarana komunikasi terputus karena bencana	Eksternal	UC	Terhambatnya komunikasi di lokasi kejadian	Masyarakat & personil										2. Sarana komunikasi terputus karena bencana	Eksternal	UC	Terhambatnya komunikasi di lokasi kejadian	Masyarakat & Personil							
						3. Belum semua masyarakat mengetahui nomor layanan pengaduan	Internal	C	Informasi yang sampai terlambat	Masyarakat & personil										3. Belum semua masyarakat mengetahui nomor layanan pengaduan	Internal	C	Informasi yang sampai terlambat	Masyarakat & Personil							
	2. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	2. Persentase kawasan rawan bencana yang mendapat layanan pencegahan dan	Sarana dan prasarana penyebarluasan informasi tidak maksimal	RSO3	Kasi Logistik	1. Jumlah alat komunikasi (HT) masih kurang	Internal	C	Terhambatnya komunikasi di lokasi kejadian	Masyarakat & personil	5	4	20		2. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	2. Persentase kawasan rawan bencana yang mendapat layanan pencegahan dan	Sarana dan prasarana penyebarluasan informasi tidak maksimal	RSO3	Kasi Logistik	1. Jumlah alat komunikasi (HT) masih kurang	Internal	C	Terhambatnya komunikasi di lokasi kejadian	Masyarakat & Personil	5	4	20		3,82	3,91	14,93
						2. Register mengalami kerusakan	Internal	C	Informasi yang sampai terlambat	Masyarakat & personil										2. Register mengalami kerusakan	Internal	C	Informasi yang sampai terlambat	Masyarakat & Personil							
						3. Pemakaian Barang Inventaris Kantor Untuk pribadi	Internal	C	1. Kurangnya kesadaran pegawai mengenai aset kantor 2. Tidak adanya SOP mengenai aset kantor tidak dibawa pulang	personil										3. Pemakaian Barang Inventaris Kantor Untuk pribadi	Internal	C	1. Kurangnya kesadaran pegawai mengenai aset kantor 2. Tidak adanya SOP	Personil							
																				4. Alat komunikasi tidak dipelihara dengan baik, serta tidak diandalkan secara memadai	Internal	C	Penggunaan atas alat komunikasi menjadi tidak maksimal								
			Pelaksanaan Sosialisasi belum berjalan efektif	RSO3	Kasi PK	Pelaksanaan sosialisasi belum dilakukan evaluasi baik terhadap narasumber maupun peserta	Internal	C	Informasi yang di sampaikan belum sepenuhnya tersampaikan	Masyarakat & personil	4	4	16				Pelaksanaan Sosialisasi belum berjalan efektif	RSO3	Kasi PK	Pelaksanaan sosialisasi belum dilakukan evaluasi baik terhadap narasumber maupun peserta	Internal	C	Informasi yang di sampaikan belum sepenuhnya tersampaikan	Masyarakat & Personil	3	4	12		3,64	3,91	14,21
							Internal	C													Internal	C									
	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3. Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana < 24 jam	Kesalahan pemahaman masyarakat terhadap tupoksi BPBD	RSO4	Kasi PK, dan Kasi KL	Kurangnya sosialisasi tupoksi BPBD kepada masyarakat	Internal	C	Informasi yang di ketahui masyarakat terbatas	Masyarakat & personil	4	4	16		3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3. Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana < 24 jam	Kesalahan pemahaman masyarakat terhadap tupoksi BPBD	RSO4	Kasi PK, dan Kasi KL	Kurangnya sosialisasi tupoksi BPBD kepada masyarakat	Internal	C	Informasi yang di ketahui masyarakat terbatas	Masyarakat & Personil	3	3	9		3,70	3,90	14,43
b	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Penalaman nilai-nilai adat dan budaya	Persentase pelaku adat dan budaya yang aktif	Belum semua cagar budaya yang telah ditetapkan dapat difasilitasi		Kepala Dinas	#REF!	#REF!	UC	#REF!	#REF!	4	4	16				Belum semua cagar budaya yang telah ditetapkan dapat difasilitasi		Kepala Dinas	#REF!	#REF!	UC	#REF!	#REF!	4	4	16		3,70	4,00	14,80
			Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya nilai yang terkandung dalam cagar budaya		Kepala Dinas	masyarakat belum menyadari pentingnya keberadaan sebuah cagar budaya	eksternal	UC	terabainya sebuah cagar budaya		4	4	16				Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya nilai yang terkandung dalam cagar budaya		Kepala Dinas	masyarakat belum menyadari pentingnya keberadaan sebuah cagar budaya	eksternal	UC	terabainya sebuah cagar budaya		4	4	16		3,67	4,00	14,67
			tidak tercapainya target penetapan terhadap cagar budaya yang direncanakan		Kepala Dinas	kurang lengkapnya bahan pendukung untuk pentapan	eksternal	UC	dugaan objek cagar budaya tidak bisa ditetapkan sebagai cagar budaya	masyarakat	4	4	16				tidak tercapainya target penetapan terhadap cagar budaya yang direncanakan		Kepala Dinas	kurang lengkapnya bahan pendukung untuk pentapan	eksternal	UC	dugaan objek cagar budaya tidak bisa ditetapkan sebagai cagar budaya	masyarakat	4	4	16		3,63	4,00	14,50
			Turunnya motivasi pelaku adat dalam pelaksanaan kegiatan tradisi adat		Kepala Dinas	Masih Kurang terfasilitasinya kegiatan tradisi	Eksternal	UC	Pelaksanaan kegiatan tradisi/adat kurang maksimal	Masyarakat	3	4	12				Turunnya motivasi pelaku adat dalam pelaksanaan kegiatan tradisi adat		Kepala Dinas	Masih Kurang terfasilitasinya kegiatan tradisi	Eksternal	UC	Pelaksanaan kegiatan tradisi/adat kurang maksimal	Masyarakat	3	4	12		3,57	4,00	14,29

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO		
			Risiko			Sebab				Dampak							Risiko			Sebab				Dampak							
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	CIUC	Uraian	Pihak yang terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	CIUC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
			Turunnya motivasi pelaku seni dan budaya dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian adat dan budaya		Kepala Dinas	Masih Kurang terfasilitasinya kegiatan pelestarian adat dan budaya	Eksternal	UC	Pelaksanaan kegiatan pelest kurang maksimalnya adat dan budaya	Masyarakat	3	4	12				Turunnya motivasi pelaku seni dan budaya dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian adat dan budaya		Kepala Dinas	Masih Kurang terfasilitasinya kegiatan pelestarian adat dan budaya	Eksternal	UC	Pelaksanaan kegiatan pelest kurang maksimalnya adat dan budaya	Masyarakat	3	4	12		3,67	4,00	14,29
MISI II : Peningkatan Perekonomian daerah yang berkelanjutan ekonomi berdasarkan potensi unggulan daerah yang ter-integrasi dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi																															
1	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Belum terpeliharanya prasarana pasar sesuai harapan	RSI 1	Walikota	Minimnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan prasarana pasar	Internal	C		Walikota, Masy	3	3	9	0	Tujuan: Meningkatkan perekonomian daerah						Eksternal	C	Rendahnya kualitas pelayanan kepada wisatawan	Walikota, Masy	5	4	20	1. Peningkatan Kompetensi SDM dalam bentuk pelatihan dan ukom jafungsional	3,67	4,00	14,67
a	Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan Berbasis potensi Unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB(ADHK)	Belum tersedianya prasarana berdagang untuk pedagang kaki lima (PKL)	RSI 2	Walikota	Belum tersedianya suatu tempat/ zona berdagang yg representatif bagi PKL untuk berdagang	Eksternal	UC		Walikota, Masy	4	3	12		Sasaran: berkembangnya ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah						Eksternal	C	peningkatan penegendangan pemelesan lambat					2. Membentuk Pokdarwis secara merata			
		Laju Pertumbuhan Sektor PariwisataTerhadap PDRB(ADHK)	Produk UMKM Kota Solok belum memiliki daya saing	RSI 3	Walikota	Kurangnya inovasi UMKM dalam memasarkan produknya	Eksternal	UC		Walikota, Masy	3	2	6									Internal	C	wisatawan masa berkunjung ulang					3. Meningkat sarana dan prasarana			
		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB(ADHK)				Minat konsumen untuk menggunakan produk lokal masih kurang	Eksternal	UC													Internal	C	Angka kunjungan wisata masih rendah	Pemda dan Masyarakat	4	4	16	1. Menyediakan instrumen monitoring yang di dalamnya terdapat data pengunjung, asal, dsb			
						Produk UMKM belum memiliki standardisasi	Eksternal	UC													Internal	C						2. Menetapkan indikator kinerja yang SMART			
	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas dan Pemberdaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1. Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	Lemahnya sistem manajemen koperasi	RSO1	Kadis, Kabid	Kompetensi SDM yang belum memadai	Eksternal	UC		Kadis, koperasi	2	3	6		Pertumbuhan Koperasi Berkualitas dan Pemberdaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas	Lemahnya sistem pengelolaan koperasi	RSO1	Kepala DPKUKM	Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus koperasi belum memadai	Eksternal	C	Mengurangi kinerjal produktivitas koperasi	Pengurus dan Anggota Koperasi	4	4	16		3,50	4,00	14,00
	Sasaran : Peningkatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)														Sasaran: Peningkatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)					Pembinaan oleh dinas belum optimal	Internal	C	Tidak tercapainya sasaran yang diinginkan	OPD dan Koperasi							
			Rendahnya daya saing koperasi	RSO2	Kepala Dinas	1. Terbatasnya SDM anggota koperasi	Eksternal	UC	Kesejahteraan anggota tidak meningkat	Pengurus Koperasi , Pelaku Usaha							Rendahnya daya saing koperasi	RSO2	Kepala Dinas	1. Terbatasnya SDM anggota koperasi	Eksternal	UC	Kesejahteraan anggota tidak meningkat	Pengurus Koperasi , Pelaku Usaha	3	4	12		3,40	4,00	13,60
						2. Budaya organisasi yang konservatif dan regulasi yang kelat	Eksternal	UC												2. Budaya organisasi yang konservatif dan regulasi yang kelaq	Eksternal	UC									
						3. Tidak mau mengambil resiko yang tinggi dan kurangnya kolaborasi dan jaringan dengan pihak lain	Eksternal	UC												3. Tidak mau mengambil resiko yang tinggi dan kurangnya kolaborasi dan jaringan dengan pihak lain	Eksternal	UC									
						4. Kurangnya inovasi koperasi	Eksternal	UC												4. Kurangnya inovasi koperasi	Eksternal	UC									
						5. Terbatasnya pembinaan/pendampingan oleh Dinas	Internal	C	Tidak tercapainya sasaran yang diinginkan	OPD dan Koperasi										5. Terbatasnya pembinaan/pendampingan dari Dinas	Internal	C	Tidak tercapainya sasaran yang diinginkan	OPD dan Koperasi							
		2. Persentase pertumbuhan umkm naik kelas	Produk UMKM Kota Solok belum memiliki daya saing sehingga kurang diminati	RSO3	Kepala Dinas	1. Kurangnya inovasi produk seperti kemasan, varian rasa	Eksternal	UC	Kesejahteraan pelaku Usaha tidak meningkat dan kurangnya nilai tambah dan daya saing UMKM sehingga UMKM belum mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (naik kelas)	Pelaku UMKM						2. Persentase pertumbuhan umkm naik kelas	Produk UMKM Kota Solok belum memiliki daya saing sehingga kurang diminati	RSO3	Kepala Dinas	1. Kurangnya inovasi produk seperti kemasan, varian rasa	Eksternal	UC	Kesejahteraan pelaku Usaha tidak meningkat dan kurangnya nilai tambah dan daya saing UMKM sehingga UMKM belum	Pelaku UMKM	3	4	12		3,75	4,00	15,00
						2. Persaingan yang ketat	Eksternal	UC												2. Persaingan yang ketat	Eksternal	UC									
						3. Kurangnya akses terhadap pasar yang lebih luas (pembiaan)	Eksternal	UC												3. Kurangnya akses terhadap pasar yang lebih luas (pembiaan)	Eksternal	UC									
						4. Pemanfaatan digitalisasi produk masih kurang	Eksternal	UC												4. Pemanfaatan digitalisasi produk masih kurang	Eksternal	UC									
			UKMKM belum menjadi lokomotif dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat	RSO4	Kepala Dinas	1. Keterbatasan sumber daya financial dan Skill SDM	Eksternal	UC	Kesejahteraan pelaku Usaha tidak meningkat dan kurangnya nilai tambah dan daya saing UMKM sehingga UMKM	Pelaku UMKM							UKMKM belum menjadi lokomotif dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat	RSO4	Kepala Dinas	1. Keterbatasan sumber daya financial dan Skill SDM	Eksternal	UC	Kesejahteraan pelaku Usaha tidak meningkat dan kurangnya nilai tambah dan	Pelaku UMKM	3	4	12		3,73	3,91	14,57
						2. Teknologi dan inovasi yang terbatas	Eksternal	UC												2. Teknologi dan inovasi yang terbatas	Eksternal	UC									
						3. Kondisi pasar yang tidak stabil	Eksternal	UC												3. Kondisi pasar yang tidak stabil	Eksternal	UC									
						4. Keterbatasan akses ke pasar global	Eksternal	UC												4. Keterbatasan akses ke pasar global	Eksternal	UC									
			Sulitnya untuk merekrut anggota koperasi baru	RSO2	Kadis, Kabid	Kesadaran untuk melaksanakan ekonomi masih kurang	Eksternal	UC		Kadis, koperasi	3	3	9			PAD sektor wisata	Capaian realisasi PAD sektor pariwisata masih rendah	RSO5	Kadis	Objek wisata, hotel sebagai sumber pendapatan sektor pariwisata sepi	Eksternal	C	Target PAD tidak tercapai	OPD dan Masyarakat	4	4	16	1. Penerikan retribusi masuk objek	3,83	3,92	15,01

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI												Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO		
			Risiko			Sebab			Dampak							Risiko			Sebab			Dampak								Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(10)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
						Adanya kepentingan pribadi dalam pengurusan koperasi	Internal	C												adanya intervensi dari beberapa pihak kepada pengunjung objek wisata	Eksternal	C						2. Peningkatan kompetensi SDM			
						Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengurus koperasi	Internal	C												Pengelolaan pariwisata belum efektif	Internal	C										
			Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pengurusan legalitas usaha	RSO3	Kadis, Kabid	Minimnya kepedulian pelaku usaha untuk mengurus legalitas usaha	Eksternal	UC		Kadis, UMKM	3	2	6		Pemenuhan aturan yang tidak sama dalam proses audit yang dilakukan oleh inspektorat	RO05	Kabid POW	Persepsi Auditor yang tidak sama atas suatu aturan	Eksternal	UC	Turunnya kepercayaan terhadap APIP		4	4	16	1. Peningkatan kompetensi SDM tentang aturan	3,05	4,00	15,38
						Kurangnya informasi dalam pengurusan legalitas usaha	Internal	C												Kesalahan yang sama namun mendapat perlakuan yang berbeda	Eksternal	UC						2. Meningkatkan koordinasi dengan APIP			
			Pengusaha pelaku usaha terhadap aplikasi pengurusan sertifikasi legalitas produk usaha masih minim	RSO4	Kadis, Kabid	Kompetensi SDM yang belum memadai	Eksternal	UC		Kadis, UMKM	3	3	9							Kurangnya penyiapan kepada auditor/desa dilengkapi dengan bukti	Internal	C										
			Minimnya modal yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro	RSO5	Kadis, Kabid	Kurangnya informasi terkait akses permodalan	Internal	C		Kadis, UMKM	3	3	9		Evaluasi dan pelaporan kegiatan belum yang dilakukan secara optimal	RO06		Evaluasi yang dilakukan secara fisik	Internal	C	Keberhasilan pelaksanaan kegiatan belum bisa diukur		4	4	16	1. Penyusunan Laporan melalui aplikasi	3,80	4,07	15,45
						Minat/motivasi pelaku usaha mikro dalam meningkatkan kualitas usaha masih kurang	Eksternal	UC												Laporan evaluasi belum terdokumentasikan dengan baik	Internal	C						2. Laporan hasil evaluasi didokumentasikan dengan baik			
															Pemenuhan dan sarana dan prasarana yang mengakomodir kebutuhan kaum difabilitas	RO07	Kabid POW	Kurangnya komitmen terhadap Pengarusutamaan Gender	Internal	C	persyaratan DTWU Sumber tidak terpenuh	OPD dan Masyarakat	4	4	16	1. Pengusulan rencana pembangunan sarana dan prasarana difabilitas di awal tahun	3,81	4,08	15,49
			Belum optimalnya pemanfaatan secara pertanian	RSO 1	Kepala Dinas Pertanian	Kurangnya kesadaran masyarakat akan Pendampingan Penggunaan	Eksternal		Tidak termanfaatnya secara optimal sarana pertanian untuk peningkatan produksi tanaman	Dinas, Masyarakat	4	4	16		Belum optimalnya pemanfaatan secara pertanian	RSO 1	Kepala Dinas	Kurangnya kesadaran masyarakat akan Pendampingan Penggunaan	Eksternal		Tidak termanfaatnya secara optimal sarana pertanian untuk peningkatan	Dinas, Masyarakat	4	4	16	Meningkatkan intensitas penyuluhan dan memperkenalkan dampak	3,81	4,13	15,73
						Rendahnya pemahaman masyarakat tentang dampak Penggunaan sarana Pendidikan/Pertanian			Tidak berkembangnya pemakaian sarana pertanian dikalangan masyarakat	Dinas, Masyarakat										Rendahnya pendidikan masyarakat yang akan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendidikan/pertanian			Tidak berkembangnya pemakaian sarana pertanian dikangan masyarakat	Dinas, Masyarakat	4	4	16	Meningkatkan peran aktif penyuluh dalam melakukan pendampingan	3,81	4,13	15,73
			Mahalnya harga benih bersertifikat di pasaran	RSO12	Kepala Dinas Pertanian	Harga pupuk yang tinggi di tingkat petani			Rendahnya pemakaian benih bersertifikat	Dinas, Masyarakat	4	4	16		Mahalnya harga benih bersertifikat di pasaran	RSO12	Kepala Dinas	Harga pupuk yang tinggi di tingkat petani			Rendahnya pemakaian benih bersertifikat	Dinas, Masyarakat	4	4	16	Meningkatkan sebaik benih melalui penangkar	3,81	4,19	15,98
						Jumlah benih pokok yang tersedia sikit banyak			Kualitas dan kuantitas hasil panen tidak sesuai yang diharapkan	Dinas, Masyarakat										Jumlah benih pokok yang tersedia lebih banyak			Kualitas dan kuantitas hasil panen tidak sesuai yang diharapkan	Dinas, Masyarakat	4	4	16	Meningkatkan sebaik benih melalui penangkar	3,81	4,19	15,98
			Gagal panen	RSO13	Kepala Dinas Pertanian	Faktor Alam (el nino, banjir,serangan OPT secara Eksplosif)			Turunnya produksi dan kualitas hasil	Dinas, Masyarakat	3	3	9		Gagal panen	RSO13	Kepala Dinas	Faktor Alam (el nino, banjir,serangan OPT secara Eksplosif)			Turunnya produksi dan kualitas hasil	Dinas, Masyarakat	3	3	9	Meningkatkan Kompetensi Penyuluh	3,75	4,19	15,70
			Penerapan teknologi budidaya pertanian yang kurang optimal	RSO 4	Kepala Dinas Pertanian	Metode penyuluhan yang kurang tepat sehingga tidak mencapai sasaran			Produksi tidak optimal	Dinas, Masyarakat	3	4	12		Penerapan teknologi budidaya pertanian yang kurang optimal	RSO 4	Kepala Dinas	Metode penyuluhan yang kurang tepat sehingga tidak mencapai sasaran			Produksi tidak optimal	Dinas, Masyarakat	3	4	12	Meningkatkan Kompetensi Penyuluh	3,81	4,31	16,44
			Pemanfaatan prasarana ekonomi kurang optimal	RSO14	Kepala Dinas Pertanian	Ketertarikan petani terhadap ekonomi masih rendah dikarenakan faktor sosial budaya masyarakat yang masih mempertahankan cara konvensional			Berkurangnya kuantitas dan kualitas hasil pertanian	Dinas, Masyarakat	4	4	16		Pemanfaatan prasarana ekonomi kurang optimal	RSO14	Kepala Dinas	Ketertarikan petani terhadap ekonomi masih rendah dikarenakan faktor sosial budaya masyarakat yang masih mempertahankan cara			Berkurangnya kuantitas dan kualitas hasil pertanian	Dinas, Masyarakat	4	4	16	Meningkatkan pendekatan penyuluh terhadap petani	3,80	4,35	16,90
			Pemanfaatan sarana produksi pupuk organik masih rendah	RSO15	Kepala Dinas Pertanian	Sarana kurangnya ketersediaan pupuk organik			Kualitas kesuburan tanah semakin menurun	Dinas, Masyarakat	4	4	16		Pemanfaatan sarana produksi pupuk organik masih rendah	RSO15	Kepala Dinas	Sarana kurangnya ketersediaan pupuk organik			Kualitas kesuburan tanah semakin menurun	Dinas, Masyarakat	4	4	16	Meningkatkan pendekatan penyuluh terhadap petani	3,80	4,35	16,90
						Kurang pentingnya pemanfaatan limbah ternak dan kotoran hewan sebagai kompos			Tidak termanfaatkannya potensi pupuk organik untuk mengembalikan kesuburan tanah	Dinas, Masyarakat										Kurang pentingnya pemanfaatan limbah ternak dan kotoran hewan sebagai kompos			Tidak termanfaatkannya potensi pupuk organik untuk mengembalikan	Dinas, Masyarakat	4	4	16	Meningkatkan pendekatan penyuluh terhadap petani	3,80	4,35	16,90
			Risiko Strategis Operasional												Risiko Strategis Operasional																	
			Lahan sawah semakin berkurang	RSO 8	pakisl	Kebutuhan pemukiman meningkat di Kota Sukh			Produktivitas tanaman pangan berkurang	Dinas, Masyarakat	4	5	20		Lahan sawah semakin berkurang	RSO 8	Kabid	Kebutuhan pemukiman meningkat di Kota Sukh			Produktivitas tanaman pangan berkurang	Dinas, Masyarakat	4	5	20	Perda LP2B (Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan)	3,80	4,35	16,90
			Bertani bukan pekerjaan utama tapi pekerjaan sambilan	RSO 9	pakisl	Pendapatan dari bertani saja tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup			Produktivitas tanaman pangan tidak optimal	Dinas, Masyarakat	4	4	16		Bertani bukan pekerjaan utama tapi pekerjaan sambilan	RSO 9	Kabid	Pendapatan dari bertani saja tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup			Produktivitas tanaman pangan tidak optimal	Dinas, Masyarakat	4	4	16	Meningkatkan harga pertanian	3,80	4,29	16,67
			Ketersediaan pupuk bersubsidi tidak mencukupi kebutuhan petani	RSO 10	pakisl	Alokasi pupuk bersubsidi dan kemampuan petani tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan kelompok tani			Tidak terpenuhi kebutuhan pupuk tanaman sesuai rekomendasi	Dinas, Masyarakat	3	5	15		Ketersediaan pupuk bersubsidi tidak mencukupi kebutuhan petani	RSO 10	Kabid	Alokasi pupuk bersubsidi dan kemampuan petani tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan kelompok tani			Tidak terpenuhi kebutuhan pupuk tanaman sesuai rekomendasi	Dinas, Masyarakat	3	5	15	Meningkatkan pemakaian pupuk organik	3,80	4,29	16,67

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI – Risiko – Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SETELAH EVALUASI – Risiko – Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO – Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
			Ketersediaan benih bersertifikat terbatas	BOO 11	Kabid	Kurangnya penangkar benih padi			Rendahnya pemakaian benih bersertifikat	Dinas, Masyarakat	4	4	16				Ketersediaan benih bersertifikat terbatas	BOO 11	Kabid	Kurangnya penangkar benih padi			Rendahnya pemakaian benih bersertifikat	Dinas, Masyarakat	4	4	16	Memberikan subsidi benih melalui penangkar	3,94	4,25	16,73
			Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian	BOO 12	Kabid	Kurangnya kesadaran masyarakat akan Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian			Belum termanfaatkannya sarana dan prasarana pertanian secara optimal	Dinas, Masyarakat	4	4	16				Rendahnya jumlah masyarakat yang ikut Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian	BOO 12	Kabid	Kurangnya kesadaran masyarakat akan Pendampingan Penggunaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pertanian			Belum termanfaatkannya sarana dan prasarana pertanian secara optimal	Dinas, Masyarakat	4	4	16	Penambahan jumlah penyuluh swadaya	4,00	4,19	16,75
			Usulan CPCL kegiatan kurang valid	BOO 13	Kabid	Data usulan CPCL yaitu kelompok pelaksana kegiatan kurang update sehingga tidak sesuai kondisi di lapangan			Penyusunan SK Penetapan kelompok pelaksana kegiatan menjadi terhambat	Dinas, Masyarakat	4	4	16				Usulan CPCL kegiatan kurang valid	BOO 13	Kabid	Data usulan CPCL yaitu kelompok pelaksana kegiatan kurang update sehingga tidak sesuai kondisi di lapangan			Penyusunan SK Penetapan kelompok pelaksana kegiatan menjadi terhambat	Dinas, Masyarakat	4	4	16	Bantuan benih sebar pada kelompok tani	4,00	4,20	16,80
			Pencapaian target pemurnian benih anak daro baru 30% dari target 50 % sehingga produksi padi anak daro belum tercapai	BOO 14	Kabid	kemarau panjang, rentan terjadi hama penyakit			rendahnya minat petani menggunakan padi anak daro	Dinas, Masyarakat	4	5	20				Pencapaian target pemurnian benih anak daro baru 30% dari target 50 % sehingga produksi padi anak daro belum tercapai	BOO 14	Kabid	kemarau panjang, rentan terjadi hama penyakit			rendahnya minat petani menggunakan padi anak daro	Dinas, Masyarakat	4	5	20	Peningkatan pendekatan penyuluh terhadap petani	4,00	4,21	16,88
			Produksi beras anak daro rendah	BOO 15	Kabid	keterbatasan lahan yang akan ditanami benih padi anak daro			kebutuhan beras anak daro belum terpenuhi	Dinas, Masyarakat	4	4	16				Produksi beras anak daro rendah	BOO 15	Kabid	keterbatasan lahan yang akan ditanami benih padi anak daro			kebutuhan beras anak daro belum terpenuhi	Dinas, Masyarakat	4	4	16	Penetapan area eksisting sawah	4,07	4,07	16,56
			rendahnya mendapatkan pupuk bersubsidi	BOO 16	Kabid	Alokasi pupuk bersubsidi setiap tahunnya berkurang			biaya produksi menjadi lebih tinggi	Dinas, Masyarakat	4	5	20				rendahnya mendapatkan pupuk bersubsidi	BOO 16	Kabid	Alokasi pupuk bersubsidi setiap tahunnya berkurang			biaya produksi menjadi lebih tinggi	Dinas, Masyarakat	4	5	20	Pembuatan pupuk organik	4,06	4,09	16,62
			daya saing beras anak daro rendah	BOO 17	Kabid	Alokasi pupuk bersubsidi setiap tahunnya berkurang			biaya produksi dari pembelian pupuk menjadi tinggi	Dinas, Masyarakat	4	4	16				daya saing beras anak daro rendah	BOO 17	Kabid	Alokasi pupuk bersubsidi setiap tahunnya berkurang			biaya produksi dari pembelian pupuk menjadi tinggi	Dinas, Masyarakat	4	4	16	Pembinaan anggota MPIG tentang produksi beras IG	4,08	4,00	16,31
			Pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menjadi objek temuan	BOO 18	Kabid	Adanya kekurangan volume pekerjaan dan spesifikasi			Menjadi temuan kasus hukum	Dinas, Masyarakat	3	4	12				Pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menjadi objek temuan	BOO 18	Kabid	Adanya kekurangan volume pekerjaan dan spesifikasi			Menjadi temuan kasus hukum	Dinas, Masyarakat	3	4	12	Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi terkait Pengadaan barang dan jasa	4,08	4,00	16,33
			Banyaknya pengoplosan (campuran) padi anak daro	BOO 19	Kabid	Tingkat pengetahuan masih rendah			kepercayaan masyarakat turun terhadap varietas unggulan	Dinas, Masyarakat	4	5	20				Banyaknya pengoplosan (campuran) padi anak daro	BOO 19	Kabid	Tingkat pengetahuan masih rendah			kepercayaan masyarakat turun terhadap varietas unggulan	Dinas, Masyarakat	4	5	20	Pendampingan yang lebih intensif pada pedagang beras	4,18	4,00	16,73
			Penggunaan pupuk organik oleh petani masih rendah sehingga ketergantungan pada pupuk bersubsidi masih tinggi	BOO 20	Kabid	Kesadaran petani masih rendah			Tingkat kesuburan lahan belum tercapai seperti yang diharapkan	Dinas, Masyarakat	4	5	20				Penggunaan pupuk organik oleh petani masih rendah sehingga ketergantungan pada pupuk bersubsidi masih tinggi	BOO 20	Kabid	Kesadaran petani masih rendah			Tingkat kesuburan lahan belum tercapai seperti yang diharapkan	Dinas, Masyarakat	4	5	20	memperbanyak demplot	4,18	3,91	16,35
			Faktor cuaca ekstrim (el nino, bencana alam, serangan hama dan penyakit)	BOO 21	Kabid	Faktor Alam			Terjadinya gangguan teknis budidaya tanaman	Dinas, Masyarakat	4	4	16				Faktor cuaca ekstrim (el nino, bencana alam, serangan hama dan penyakit)	BOO 21	Kabid	Faktor Alam			Terjadinya gangguan teknis budidaya tanaman	Dinas, Masyarakat	4	4	16	Menyebarkan informasi cuaca melalui media massa dan baliho	4,18	3,82	15,97
			Data yang diperoleh belum maksimal menggambarkan ketersediaan Bahan Pangan	RSO1	Kepala Dinas	kurangnya koordinasi dengan Distributor Resmi	Eksternal	UC	Kebijakan yang diambil dalam ketersediaan bahan pangan kurang tepat	Kepala Dinas	4	4	16	1. Memberikan edukasi kepada Pedagang 2. Menar[illegible] Petugas Survei	Tujuan: Meningkatkan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Energi Per Kapita	Data yang diperoleh belum maksimal menggambarkan ketersediaan Bahan Pangan	RSO1	Kepala Dinas	kurangnya koordinasi dengan Distributor Resmi	Eksternal	UC	Kebijakan yang diambil dalam ketersediaan bahan pangan kurang tepat	Kepala Dinas	4	4	16	1. Memberikan edukasi kepada Pedagang 2. Meningkatkan potensi Petugas Survei	4,20	3,80	15,98
																Ketersediaan Protein Per Kapita				kompetensi petugas pendataan belum memadai		C									
			Fluktuasi Harga Pangan	RSO3	Kepala Dinas	1. Kelangkaan bahan pangan 2. Monopoli harga dari Makelar 3. Peningkatan permintaan di waktu tertentu (HBKN)	Eksternal	UC	Naiknya harga pangan	Masyarakat	4	4	16	1. Melakukan Metode Kerjasama dengan Petani/Produsen untuk pelaksanaan Operasi Pasar 2. Melakukan Kerjasama dengan BUMN terkait Harga Pangan	Sasaran: Meningkatnya Ketersediaan Pangan		Fluktuasi Harga Pangan sulit dikendalikan	RSO3	Kepala Dinas	1. Kelangkaan bahan pangan, karna kurangnya produksi 2. Monopoli harga dari Makelar	Eksternal	UC	Naiknya harga pangan, sehingga daya beli masyarakat rendah	Masyarakat	4	4	16	1. Melakukan Metode Kerjasama dengan Petani/Produsen untuk pelaksanaan Operasi Pasar 2. Melakukan Kerjasama dengan BUMN terkait Harga Pangan	4,27	3,82	16,31
			Data Ketersediaan Bahan Pangan Tidak Valid	ROO1	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Kasi Ketersediaan Pangan	1. Pencatatan data ketersediaan pangan belum dilakukan secara rutin 2. Respon yang kurang baik dari kelompok pangan masyarakat	Eksternal	C	Analisis Data Kurang Akurat	Dinas	4	4	16	1. Memberikan edukasi kepada Pedagang 2. Menambah Petugas Survei			Data Ketersediaan Bahan Pangan Tidak Valid	ROO1	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Kasi Ketersediaan Pangan	1. Pencatatan data ketersediaan pangan belum dilakukan secara rutin 2. Respon yang kurang baik dari kelompok pangan	Eksternal	UC	Analisis Data Kurang Akurat	Dinas	4	4	16	1. Memberikan edukasi kepada Pedagang 2. Meningkatkan kompetensi Petugas Survei	4,27	3,82	16,31
																				3. Kompetensi Petugas pencatat data masih kurang	Internal	C									
			Pelaksanaan Operasi Pasar Penyalurannya Belum tepat Sasaran dan Belum Berdampak pada Pengendalian Fluktuasi Harga	ROO2	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Kasi Distribusi Pangan	1. Kurangnya penyebaran informasi 2. Intesitas pelaksanaan operasi pasar masih insidentil 3. Pemilihan lokasi yang tidak tepat	Eksternal	C	Penyaluran Bahan Pangan tidak Optimal	Masyarakat	4	4	16	Melakukan Metode Kerjasama dengan Kelurahan dan Dinas Sosial untuk Data Sasaran yang akurat			Pelaksanaan Operasi Pasar Penyalurannya Belum tepat Sasaran dan Belum Berdampak pada Pengendalian Fluktuasi Harga	ROO2	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Kasi Distribusi Pangan	1. Kurangnya penyebaran informasi 2. Intesitas pelaksanaan operasi pasar masih insidentil	Internal	C	Penyaluran Bahan Pangan tidak Optimal	Masyarakat	4	4	16	1. Melakukan Metode Kerjasama dengan Kelurahan dan Dinas Sosial untuk Data Sasaran yang akurat 2. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat	4,25	3,83	16,29
			Pertanggungjawaban pekerjaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan	ROO4	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Kasi Kerawanan Pangan	1. Adanya kekurangan volume dan spesifikasi 2. Harga pengadaan tidak wajar	Eksternal	C	tidak tercapainya target pengadaan	Dinas	4	4	16	Melakukan penyesuaian volume terhadap harga yang baru			Pertanggungjawaban pekerjaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai ketentuan	ROO4	Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Kasi Kerawanan Pangan	1. Adanya kekurangan volume dan spesifikasi 2. Harga pengadaan tidak wajar 3. Kompetensi PPTK dan	Internal	C	1. tidak tercapainya target pengadaan 2. Menjadi temuan aparat pengawasan	Dinas	4	4	16	Meningkatkan kompetensi PPTK dan PSK	4,33	3,83	16,61
			Keterlibatan Pimpinan OPD terkait pencapaian nilai evaluasi SAKIP belum optimal	RSP1	Walikota	1. Pengetahuan dan Komitmen Kepala OPD tentang SAKIP masih rendah	Internal	C	1. Gagal memperoleh DID 2. Target walikota tidak tercapai	Walikota, Masyarakat	5	3	15	1. Penerapan mekanisme reward dan punishment 2. Peningkatan kompetensi penyusun SAKIP			Keterlibatan Pimpinan OPD terkait pencapaian nilai evaluasi SAKIP belum optimal	RSP1	Walikota	1. Pengetahuan dan Komitmen Kepala OPD tentang SAKIP masih rendah	Internal	C	1. Gagal memperoleh DID 2. Target walikota tidak terwujud	Walikota, Masyarakat	5	3	15	1. Penerapan mekanisme reward dan punishment 2. Peningkatan kompetensi penyusun SAKIP	4,38	3,82	16,68
						2. Koordinasi antar OPD pengampu belum terlaksana dengan baik	Internal	C	Belum optimalnya kinerja kepala OPD sesuai tupoksi											2. Koordinasi antar OPD pengampu belum terlaksana dengan baik	Internal	C									
						3. Belum adanya mekanisme reward dan punishment	Internal	C	Belum optimalnya kinerja pegawai sesuai tupoksi											3. Belum adanya mekanisme reward dan punishment	Internal	C									
			Capaian Nilai IKM masih berada dibawah target yang diharapkan	RSP2	Walikota	Komitmen Kepala OPD untuk peningkatan kualitas layanan masih rendah	Internal	C	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat/ pengguna layanan terhadap kinerja pemerintah daerah	Walikota/ masyarakat	5	3	15	1. Membuat aplikasi e-SKM 2. Melakukan SKM secara mandiri			Capaian Nilai IKM masih berada dibawah target yang diharapkan	RSP2	Walikota	Komitmen Kepala OPD untuk peningkatan kualitas layanan masih rendah	Internal	C	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat/ pengguna layanan terhadap kinerja	Walikota/ masyarakat	5	3	15	1. Penerapan mekanisme reward dan punishment 2. Peningkatan kompetensi penyusun SAKIP	4,33	3,92	16,97

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI – Risiko – Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SETELAH EVALUASI – Risiko – Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO – Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
						Rencana Tindak Lanjut hasil SKM belum sepenuhnya dilaksanakan	Internal	C	Belum optimalnya pelayanan publik	Masyarakat										Rencana Tindak Lanjut hasil SKM belum sepenuhnya dilaksanakan	Internal	C									
																	Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan menjadi objek temuan Aparat pengawasan sehingga mempengaruhi kinerja kegiatan	ROO9	Kepala Bag Keuangan	1. Kebiasaan pembayaran	Internal	C	Tingkat akuntabilitas menjadi rendah	ASN	4	4	16	Meningkatkan kompetensi ASN dan menerapkan mekanisme reward dan punishment	4,25	3,92	16,65
																				2. Pengadaan belum sesuai aturan	Internal	C									
																				3. Bukti SPJ belum lengkap dan kurang valid											
b	Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha Untuk Melaporkan Permasalahan yang dihadapinya	BOO 1	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP	Kompetensi SDM Pelaku Usaha yang belum memadai dan Pelaku usaha tidak paham dengan Pelaporan Permasalahan yang dihadapinya			Nilai Realisasi Investasi PM tidak Tercapai	Pemerintah / Pelaku Usaha	4	4	16	Pengendalian Data berasal dari Koordinator Pengawasan untuk ditindak lanjuti			Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha Untuk Melaporkan Permasalahan yang dihadapinya	BOO 4	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kompetensi SDM Pelaku Usaha yang belum memadai dan Pelaku usaha tidak paham dengan Pelaporan Permasalahan yang dihadapinya			Nilai Realisasi Investasi PM tidak sesuai dengan seharusnya	Pemerintah / Pelaku Usaha	4	4	16	Pengendalian Data berasal dari Koordinator Pengawasan untuk ditindak lanjuti	4,25	3,92	16,65
			Pelaku Usaha tidak memahami Peraturan dan Perundangan yang berlaku terkait Penanaman Modal	BOO 2	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP	Belum efektifnya pelaksanaan Sosialisasi			Kegiatan menjadi tidak tepat sasaran dan efektif	Pemerintah / Pelaku Usaha	4	4	16	Melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas dan Lembaga Terkait			Pelaku Usaha tidak memahami Peraturan dan Perundangan yang berlaku terkait Penanaman Modal	BOO 5	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Belum efektifnya pelaksanaan Sosialisasi			Nilai Realisasi Investasi PM tidak Tercapai	Pemerintah / Pelaku Usaha	4	4	16	Melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas dan Lembaga Terkait	4,27	3,91	16,70
						Pelaku Usaha Tidak menghadiri Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan			Kegiatan menjadi tidak tepat sasaran dan efektif	Pemerintah / Pelaku Usaha				Menyusun konsep SOP pengawasan						Pelaku Usaha Tidak menghadiri Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan			Kegiatan menjadi tidak tepat sasaran dan efektif	Pemerintah / Pelaku Usaha				Menyusun konsep SOP pengawasan			
			Pengawasan terhadap perusahaan belum terlaksana dengan maksimal	BOO 3	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP	Kurangnya SDM Aparatur terkait Pelaksana Pengawasan dan Regulasi yang sering berubah			Lemahnya Pengawasan Kepada Pelaku Usaha	Pemerintah / Pelaku Usaha	4	4	16	Memberikan pemahaman yang terstruktur kepada calon peserta penyuluhan dan bimbingan jabatan			Pengawasan terhadap perusahaan belum terlaksana dengan maksimal	BOO 6	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kurangnya SDM Aparatur terkait Pelaksana Pengawasan dan Regulasi yang sering berubah			Lemahnya Pengawasan Kepada Pelaku Usaha	Pemerintah / Pelaku Usaha	4	4	16	Memberikan pemahaman yang terstruktur kepada calon peserta penyuluhan dan bimbingan jabatan	4,27	3,91	16,70
c	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja	RIO 4	Kepala Dinas DPMPTSP	Penawaran tenaga kerja yang tersedia dan kerja sama yang masih rendah			Angka pengangguran belum menurun sesuai dengan target	perusahaan dan masyarakat/pencaker	4	4	16	Menginventarisir dan evaluasi terkait usulan pelatihan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Tujuan RPJMD)/ 1. Peningkatan iklim Investasi; 2. Peningkatan penanaman investasi	1. Nilai Investasi 2. Jumlah Investor yang berminat	Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja	RIO 6	Kepala Dinas	Potensi tenaga kerja yang terbatas dan kerja sama yang masih rendah			Angka pengangguran belum menurun sesuai dengan target	perusahaan dan masyarakat/pencaker	5	4	20	Menginventarisir dan evaluasi terkait usulan pelatihan	4,30	3,90	16,77
			Rendahnya penilaian atas kualitas dan produktivitas tenaga kerja siap pakai	RIO 5	Kepala Dinas DPMPTSP	Kurangnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja siap pakai			Tidak tercapai target yang ditetapkan dalam pasar kerja	masyarakat/pencaker	4	4	16	Menginventarisir keterkaitan sesuai dengan kriteria dan kemampuan tenaga kerja yang siap pakai			Rendahnya penilaian atas kualitas dan produktivitas tenaga kerja siap pakai	RIO 7	Kepala Dinas	Kurangnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja siap pakai			Tidak tercapai target kualifikasi pekerja yang ditetapkan dalam pasar kerja	masyarakat/pencaker	4	4	16	Menginventarisir keterkaitan sesuai dengan kriteria dan kemampuan tenaga kerja yang siap pakai	4,22	3,89	16,42
			Jumlah Pencari Kerja yang memahami penyuluhan dan bimbingan jabatan yang diberikan masih rendah	RIO 6	Bidang PA NAKER	Jumlah pencari kerja yang secara mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan yang diberikan masih rendah			Capaian tujuan penyuluhan dan bimbingan jabatan belum maksimal	siswa/masyarakat/pencaker	4	4	16	Mengefektifkan pengantar kerja untuk pendekatan ke perusahaan dalam memenuhi kewajiban WLL			Jumlah Pencari Kerja yang memahami penyuluhan dan bimbingan jabatan yang diberikan masih rendah	RIO 8	Bidang PA NAKER	Jumlah pencari kerja yang secara mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan yang diberikan masih rendah			Capaian tujuan penyuluhan dan bimbingan jabatan belum maksimal	siswa/masyarakat/pencaker	4	4	16	Mengefektifkan pengantar kerja untuk pendekatan ke perusahaan dalam memenuhi kewajiban WLL	4,22	3,89	16,42
			Jumlah tenaga kerja belum dapat diprediksi dapat ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL secara keseluruhan	RIO 7	Bidang PA NAKER	Jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan sangat tergantung dari kebutuhan perusahaan			Belum maksimalnya penempatan jumlah tenaga kerja melalui layanan AKAD dan AKL	masyarakat/pencaker	4	4	16	Seleksi pelatihan yang lebih ketat dan terukur			Jumlah tenaga kerja belum dapat diprediksi dapat ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL secara keseluruhan	RIO 9	Bidang PA NAKER	Jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan sangat tergantung dari kebutuhan perusahaan			Belum maksimalnya penempatan jumlah tenaga kerja melalui layanan AKAD dan AKL	masyarakat/pencaker	4	4	16	Seleksi pelatihan yang lebih ketat dan terukur	4,26	3,89	16,47
			Penilaian peserta pelatihan tidak tepat	RIO 8	Bidang PA NAKER	Unsur peserta yang dipilih tidak sesuai dengan kriteria			Tidak tercapai kompetensi peserta yang diharapkan	masyarakat/pencaker	4	4	16	Seleksi pelatihan yang lebih ketat dan terukur			Penilaian peserta pelatihan tidak tepat	RIO 11	Bidang PA NAKER	Unsur peserta yang dipilih tidak sesuai dengan kriteria			Tidak tercapai kompetensi peserta yang diharapkan	masyarakat/pencaker	5	4	20	Seleksi pelatihan yang lebih ketat dan terukur	4,29	3,86	16,53
Misi II : Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial																															
1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)																													
a	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan hidup	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan	RSP1	Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan	SDM Kesehatan belum berkualitas dan sarana/prasarana belum memadai termasuk RSUD	Internal	C	AKI/AKB tinggi, kejadian stunting meningkat dan UHH menurun	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	5	4	20	1. Melengkapi sarana dan prasarana 2. Evaluasi kualitas pelayanan kesehatan	Sasaran : Mewujudkan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Kapasitas dan kualitas pelayanan belum sesuai standar	RSP1	Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan	SDM Kesehatan belum berkualitas dan sarana/prasarana belum memadai termasuk RSUD	Internal	C	AKI/AKB tinggi, kejadian stunting meningkat dan UHH menurun	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	5	4	20	1. Melengkapi sarana dan prasarana 2. Evaluasi kualitas pelayanan kesehatan	4,13	3,85	15,98
		Prevalensi stunting (Pendek dan sangat pendek) pada balita	Belum optimalnya intervensi penurunan stunting	RSP3	Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan	Belum optimalnya koordinasi LS	Internal dan Eksternal	1. UC	AKI/AKB tinggi, kejadian stunting meningkat dan UHH menurun	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	4	4	16	Konvergensi penurunan stunting			Rendahnya intervensi penurunan stunting	RSP3	Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan	Belum optimalnya koordinasi LS	Internal dan Eksternal	1. UC	AKI/AKB tinggi, kejadian stunting meningkat dan UHH menurun	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	4	4	16	Konvergensi penurunan stunting	4,00	3,86	15,43
															Tujuan : Mewujudkan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat																
			Tenaga kesehatan memberikan pelayanan belum sesuai dengan SPM	ROP2	Kepala Dinas dan masyarakat	Kompetensi tenaga kesehatan tentang APN (bidan, dokter), tentang SDIDTK, MTBS, neonatal esensial rendah	Internal	C	efektivitas pelayanan rendah	dinas kesehatan, masyarakat	4	4	16	Monitoring dan Evaluasi secara berkala pemeriksaan kualitas dan kuantitas pelayanan selama masa kehamilan	Sasaran : Mewujudkan Kesehatan keluarga	AKI = 75 AKB = 7	Tenaga kesehatan memberikan pelayanan tidak sesuai dengan SPM	ROP2	Kepala Dinas dan masyarakat	Kompetensi tenaga kesehatan tentang APN (bidan, dokter), tentang SDIDTK, MTBS, neonatal esensial rendah	Internal	C	efektivitas pelayanan rendah	dinas kesehatan, masyarakat	4	3	12	Monitoring dan Evaluasi secara berkala pemeriksaan kualitas dan kuantitas pelayanan selama masa kehamilan	4,00	3,86	15,43
			Belum optimalnya penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar	ROP5	Kepala Dinas	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri secara rutin setiap bulan	Eksternal	C	Tidak terpantaunya tekanan darah penderita hipertensi	dinas kesehatan, masyarakat	4	4	16	1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi per triwulan terhadap capaian program hipertensi	Sasaran: Menurunkan angka Kesakitan	Capaian penurunan angka kesakitan	Tidak terdatanya penderita hipertensi	ROP5	Dinas Kesehatan, masyarakat	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri secara rutin setiap bulan	Eksternal	UC	Tidak terpantaunya tekanan darah penderita hipertensi	dinas kesehatan, masyarakat	4	4	16	1. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi per triwulan terhadap capaian program hipertensi	4,00	4,00	16,00
						Ketersediaan alat pemeriksaan yang akurat	Internal							2. Melaksanakan refresh ilmu tentang pelayanan hipertensi terhadap petugas						Ketersediaan alat pemeriksaan yang akurat	Internal	C						2. Melaksanakan refresh ilmu tentang pelayanan hipertensi terhadap petugas			
						Penyampaian informasi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala belum optimal	Internal							3. Meningkatkan kerjasama dengan Posyandu Jejaring dalam rangka penemuan kasus baru penderita penyakit hipertensi						Penyampaian informasi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala belum optimal	Internal	C						3. Meningkatkan kerjasama dengan Posyandu jejaring dalam rangka penemuan kasus baru penderita penyakit hipertensi			

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI													SETELAH EVALUASI																RATA-RATA NILAI RISIKO		
			Risiko		Sebab				Dampak									Risiko		Sebab				Dampak										
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
			Belum optimalnya penderita TB mendapat pelayanan sesuai standar	R016	Kepala Dinas	penjaringan kasus oleh rumah sakit dan puskesmas,	Internal	C	Tidak terpantaunya penderita baru/kambuh	dinas kesehatan, masyarakat	4	4	16	Monitoring dan Evaluasi secara berkala dalam pemantauan pengobatan pasien sampai tuntas			Tidak terpantaunya penderita TB	R016	Dinas Kesehatan, masyarakat	penjaringan kasus oleh rumah sakit dan puskesmas,	internal	C		dinas kesehatan, masyarakat	4	4	16	Monitoring dan Evaluasi secara berkala dalam pemantauan pengobatan pasien sampai tuntas	4,00	4,00	16,00
						tidak adanya modifikasi strategi penemuan kasus TB anak,	Internal	C												tidak adanya modifikasi strategi penemuan kasus TB anak,	Internal	C									
						investigasi kontak tidak maksimal dan tidak adanya keterlibatan kader	Eksternal	C												investigasi kontak tidak maksimal dan tidak adanya keterlibatan kader	Eksternal	C									
			Belum optimalnya ketika membagikan kondom	R017	Kepala Dinas	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri secara rutin setiap bulan	eksternal	C	Meningkatnya penyakit akibat tidak diketahuinya balita	dinas kesehatan, masyarakat	4	3	12				masih adanya balita yang tidak diketahui	R017	Kepala Dinas	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri kesehatan sebagai bagian dari Posyandu/Posbindu/Posbindu	eksternal	C	Meningkatnya penyakit akibat tidak di ketahuinya balita	dinas kesehatan, masyarakat	4	4	16	Pembentukan kader kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan	4,00	4,00	16,00
						Ketersediaan vaksin yang tidak mencukupi	eksternal	C												Ketersediaan vaksin yang tidak mencukupi	eksternal	C						Menyediakan stock vaksin untuk kebutuhan			
															Tujuan: Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam Pembangunan																	
			Pemuda yang berwirausaha belum terdata dengan baik	RSO 1	Kepala Dinas	Belum adanya database kepemudaan	Internal	C	Rendahnya jumlah wirausaha muda yang terdata di Kota Solok	pemuda	4	4	16	Pembentukan tim pengelola data kepemudaan	Sasaran: 1. Peningkatan Kemandirian Pemuda	Persentase wirausaha muda	Pemuda yang berwirausaha belum terdata dengan baik	RSO 1	Kepala Dinas	Belum adanya database kepemudaan	Internal	C	Pembinaan terhadap wirausaha muda belum efektif	OPD dan masyarakat	4	4	16	1. Pembentukan tim pengelola data kepemudaan 2. Meningkatkan kompetensi SDM	4,29	3,86	16,53
						Masih rendahnya dukungan SDM dalam mengolah data yang telah dikumpulkan	Internal	C												Masih rendahnya dukungan SDM dalam mengolah data yang telah dikumpulkan	Internal	C									
			Kemitraan antar pihak dalam kegiatan organisasi kepemudaan belum optimal	RSO 2	Kepala Dinas	Belum disusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan di Kota Solok	Internal	C	Rendahnya jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kota Solok	Organisasi pemuda	4	4	16	Pembentukan tim penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan	Sasaran: 2. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Kemitraan antar pihak dalam mendukung organisasi kepemudaan belum optimal	RSO 2	Kepala Dinas	Belum disusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan di Kota Solok	Internal	C	Lambatnya pembentukan organisasi kepemudaan	OPD dan masyarakat	4	4	16	1. Pembentukan tim penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan 2. Meningkatkan kompetensi SDM	4,14	3,71	15,39
						Masih rendahnya kompetensi SDM dalam memahami Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Internal	C												Masih rendahnya kompetensi SDM dalam memahami Indek Pembangunan Pemuda (IPP)	Internal	C									
															Tujuan: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga																	
			Sarana dan prasarana olahraga yang tersedia belum memenuhi standar teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan	RSO 3	Kepala Dinas	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga masih terbatas	Internal	C	Terhambatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas kebugaran	Atlet, Cabor, Masyarakat Kota Solok	4	4	16	Rencana Anggaran dan Biaya yang ada telah disusun dalam kondisi matang	Sasaran: 1. Peningkatan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase partisipasi Masyarakat dalam aktivitas kebugaran	Sarana dan prasarana olahraga yang tersedia belum memenuhi standar teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan	RSO 3	Kepala Dinas	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga masih terbatas	Internal	C	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas kebugaran	OPD dan masyarakat	4	4	16	1. Rencana Anggaran dan Biaya yang ada telah disusun dalam kondisi matang 2. Meningkatkan kompetensi SDM	4,14	3,86	15,96
						Masih rendahnya kompetensi SDM yang menguasai standar teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan														Masih rendahnya kompetensi SDM yang menguasai standar teknis kecabangan, kesehatan, dan keselamatan	Internal	C									
			Pembinaan atlet muda yang tidak berkelanjutan	RSO 4	Kepala Dinas	Belum memiliki Dokumen Desain Olahraga Daerah	Internal	C	Rendahnya pembinaan terhadap atlet muda di Kota Solok	Atlet, Cabor	4	4	16	Penyusunan Dokumen Desain Olahraga Daerah	Sasaran: 2. Peningkatan Pembinaan Olahraga	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Pembinaan atlet muda yang tidak berkelanjutan	RSO 4	Kepala Dinas	Belum memiliki Dokumen Desain Olahraga Daerah	Internal	C	Kaderisasi atlet muda berprestasi tidak berjalan	OPD dan masyarakat	4	4	16	1. Penyusunan Dokumen Desain Olahraga Daerah 2. Meningkatkan kompetensi SDM pelatih	4,14	3,71	15,39
						Masih rendahnya kompetensi pelatih atlet muda	Internal	C												Masih rendahnya kompetensi pelatih atlet muda	Internal	C									
						Tidak adanya agenda kejuaraan tahunan yang diselenggarakan oleh pengurus cabang olahraga di tingkat propinsi dan pusat	Eksternal	C												Tidak adanya agenda kejuaraan tahunan yang diselenggarakan oleh pengurus cabang olahraga di tingkat propinsi dan pusat	Eksternal	C									
			Pembangunan Stadion H. Marah Adin tidak dapat dilanjutkan	RSO 3	Kepala Bidang	Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Stadion H. Marah Adin belum matang	Internal	C	Stadion H. Marah Adin belum dapat digunakan	Atlet, cabang olahraga	4	4	16	Penyusunan DED Stadion H. Marah Adin			Pembangunan Stadion H. Marah Adin tidak dapat dilanjutkan	RSO 3	Kepala Bidang	Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Stadion H. Marah Adin belum matang	Internal	C	Stadion belum memiliki standar	OPD dan masyarakat	4	4	16	1. Penyusunan DED Stadion H. Marah Adin 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	4,14	3,57	14,80
						Luas lahan saat perencanaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini	Internal	C												Luas lahan saat perencanaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini	Internal	C									
						Rancangan perubahan DED belum ada	Internal	C												Rancangan perubahan DED belum ada	Internal	C									
						Bantuan Keuangan Khusus untuk pembiayaan pembangunan stadion dari propinsi dan pusat belum terealisasi	External	C												Bantuan Keuangan Khusus untuk pembiayaan pembangunan stadion dari propinsi dan pusat belum terealisasi	External	C									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO		
			Risiko			Sebab			Dampak						Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak								
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
			Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi sehingga angka pernikahan dini masih tinggi	RSO1	Kadis, Kabid	Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai pernikahan usia anak	Internal	C	Angka kematian Ibu dan Anak masih tinggi	Kadis, Masyarakat	5	3	15		Tujuan: Terwujudnya Keluarga Kecil Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga : 56,73 dan TFR : 2,37	Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi sehingga angka pernikahan dini masih tinggi	RSO1	Kadis, Kabid	Kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai pernikahan usia anak	Internal	C	Angka kematian Ibu dan Anak masih tinggi	Kadis, Masyarakat	5	3	15		4,13	3,50	14,44
						Belum optimalnya peran Forum GenRe	Internal	C							Sasaran:					Belum optimalnya peran Forum GenRe	Internal	C									
			Kurangnya penerapan fungsi keluarga	RSO1	Kadis, Kabid	Kurangnya pengawasan dari orang tua	Eksternal	UC			3	2	6		Meningkatkan Ketahanan Keluarga	Angka Kelahiran Remaja Perempuan Usia 15 s/d 19 Tahun (ASFR 15-19)	Kelahiran prematur, berat badan bayi rendah (BBLR), pernikahan dini/hamil	RSO1	Kepala (Dinas KB	- Tingginya peluang perkembangan informasi dan publikasi hal-hal negatif seperti pornografi dan pornoaksi - Perselingkuhan bebas	Eksternal	C	- Terganggunya kesehatan fisik (reproduksi) remaja, pelaku maupun korbannya - Pernikahan dini	- Masyarakat - Anak - Remaja	5	4	20		4,00	3,57	14,29
																	Belum optimalnya koordinasi OPD terkait dalam pembinaan kader masyarakat keluarga sasaran bagi atasi stunting	RSO2	Kepala (Dinas KB	Belum adanya komitmen OPD dalam pembinaan kader	Eksternal	C	Kurangnya pengetahuan, ketampilan dan kesadaran kader dan keluarga sasaran dalam	Unsur Dan Ka, Dinkes, Dinsos, Kemenag, Kelurahan, PKK, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan	3	3	9		3,83	3,60	13,42
						Tidak ada kontrol masyarakat terhadap perilaku negatif remaja	Eksternal	UC							Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Wanita				Tidak ada kontrol masyarakat terhadap perilaku negatif remaja	Eksternal	UC									
			Konselor Sebaya Kelompok PIK R tidak berperan maksimal	RO01	Kadis, Kabid	Siswa belajar secara daring karena Pandemi Covid- 19	Internal	C	Tingkat pemahaman remaja kurang		2	3	6		Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera		Belum memadai sarana prasarana yang pada Kelompok BKR (Bina Keluarga Balita)	RSO3	Kepala (Dinas KB	- Penyandi tempat bermainnya bagi atau pakian BKR dan BKL banyak yang belum milik sendiri, sehingga kegiatan	Internal	C	BKB-KR, BKL-KR Bkar dan KIE, ATK, pencatatan dan pelaporan bisa tersimpan dengan	Dispreduk-KB dan PU	4	5	20		4,00	3,60	14,40
			Kurangnya Dukungan Sekolah untuk memfasilitasi kegiatan PIK R	RO02	Kadis, Kabid	Pembinaan dilakukan pada jam pembelajaran	Eksternal	UC	Kurangnya pemahaman remaja tentang PKBR		3	3	9		Program Pembinaan KB					Belum optimal memanfaatkan sosial media sebagai alat infokom	Internal	C									
			Kurangnya Minat Remaja	RO03	Kadis, Kabid	Tidak tersedianya akomodasi	Internal	C	Kelidakahauan remaja tentang Generasi Berencana								Belum optimalnya peran sekolah memfasilitasi kegiatan PIK R sehingga belum berpengaruh signifikan menambah	RSO2	Kadis, Kabid	Pengetahuan tentang PIK R belum dimasukan dalam kurikulum PBM	Eksternal	UC	Kurangnya pemahaman remaja tentang PKBR		4	3	12		3,83	3,17	12,14
																				Sekolah hanya bersifat pasif menunggu dorongan dari Dinas	Eksternal	UC									
																				Koordinasi dengan Dinas dan pihak terkait belum berjalan baik	Internal	C									
																	Sosialisasi KB belum terlaksana secara efektif sehingga pengetahuan peserta belum meningkat	RSO3	Kadis, Kabid	Narasumber kurang komunikatif	Internal	C	Kesadaran masyarakat tentang KB masih rendah	Kadis, Masyarakat miskin	4	3	12		3,75	3,13	11,72
																				Belum ada posttest atau evaluasi atas pelaksanaan sosialisasi	Internal	C									
																				Peserta kurang antusias	Internal	C									
																	Purus sang belum pria dalam ber KB masih rendah sehingga ketimpangan gender dalam program KB masih tinggi	RSO4	Kadis, Kabid	Pengetahuan dan kesadaran pria untuk menjadi akseptor masih rendah	Internal	C	Program KB belum berhasil memenuhi segala kelompok	Kadis, Masyarakat miskin	4	3	12		3,88	3,13	12,11
																				Insentif yang diberikan belum efektif mendorong peningkatan jumlah akseptor	Internal	C									
																	Pertanggung jawaban kegiatan masyarakat tidak sesuai pengawasan	RSO5	Kadis, Kabid	Proses pengadaan belum sesuai Perpres	Internal	C	Akuntabilitas keuangan rendah	Kadis, Masyarakat miskin	4	4	16		3,88	3,14	12,12
																		Internal/ Eksternal		Bukti pertanggung jawaban belum lengkap	Internal	C									
																				Pembayaran matdik slender	Internal	C									
			Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program Bangga Kencana	RSO4	Walikota, masyarakat	Faktor sosial budaya dan agama (pentingnya kelerdaan anak perempuan di suku Minang)	Eksternal	UC	Laju pertumbuhan penduduk meningkat	Masyarakat	3	2	6																		
									Program KB tidak berjalan																						
									Bonus demografi tidak tercapai																						

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI												Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO		
			Risiko			Sebab		CAUC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		CAUC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
2	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)																		Sertifikasi guru SD baru 64,5% dan guru SMP 72,0%	Internal	C	Daya saing kota di bidang pendidikan menjadi tertinggal dibanding daerah lain					Peningkatan sertifikasi bagi guru			
		Harapan Lama Sekolah (HLS)																		Kompetensi guru SD dan SMP yang belum merataI	Internal	C						Peningkatan kompetensi Guru			
		Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP	Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP	R001	Kepala Dinas Pendidikan	Daya Tampung Sekolah Belum MerataI, Kemiskinan Penduduk, dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan	Internal	C	Banyak remajan yang drop out, anak tidak bersekolah dan layanan Pendidikan yang tidak merataI	Kepala dinas pendidikan, Siswa dan guru	3	3	9		Meningkatkan kompetensi pendidik	Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP	Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP	R0046	Kepala Dinas	Daya Tampung Sekolah Belum MerataI, Kemiskinan Penduduk, dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan	Internal	C	Banyak remajan yang drop out, anak tidak bersekolah dan layanan Pendidikan	Kepala dinas pendidikan, Siswa dan guru	4	4	16		3,89	3,22	12,55
																				Pemampatan jumlah siswa pada sekolah sekolah tertentu	Internal	C	Rombongan belajar melebihi dari ketentuan yang seharusnya	Kepala dinas pendidikan, Siswa dan guru							
			Belum tersedianya data yang akurat mengenai masyarakat usia sekolah	R002	Kepala Dinas Pendidikan	Belum dilakukan pendataan secara kondisfnyan	Internal	C	Belum terpenuhinya hak pendidikan masyarakat	Kepala dinas pendidikan, Siswa dan guru	3	2	6				Belum tersedianya data yang akurat mengenai masyarakat usia sekolah	R002	Kepala Dinas	Belum dilakukan pendataan secara kondisfnyan	Internal	C	Belum terpenuhinya hak pendidikan masyarakat	Kepala dinas pendidikan, Siswa dan guru	3	2	6		3,88	3,13	12,11
		Angka Putus Sekolah SD dan SMP	Pola pikir tidak sesuai dengan fase perkembangan	R003	Kepala Dinas Pendidikan	Kurang Motivasi untuk bersekolah, faktor intra keluarga, dan faktor lingkungan sekitar tempat tinggal	Eksternal	UC	pengangguran, kriminalitas, kenakalan dan kematalan remaja	Siswa dan Masyarakat	4	3	12			Angka Putus Sekolah SD dan SMP	Pola pikir tidak sesuai dengan fase perkembangan	R003	Kepala Dinas	Kurang Motivasi untuk bersekolah, faktor intra keluarga, dan faktor lingkungan sekitar tempat tinggal	Eksternal	UC	pengangguran, kriminalitas, kenakalan dan kematalan remaja	Siswa dan Masyarakat	4	3	12		4,00	3,29	13,14
			Program pendidikan Nonformal/Kesetaraan belum berjalan sesuai standar	R004	Kepala Dinas Pendidikan	Sumber daya yang belum mencukupi, kurikulum pendidikan dan informasi serta pemahaman tentang Pendidikan PNF masih kurang	Eksternal	UC	Tingginya angka pengangguran yang tidak berpendidikan	Kepala dinas pendidikan, Siswa dan guru	4	3	12				Program pendidikan Nonformal/Kesetaraan belum berjalan sesuai standar	R004	Kepala Dinas	Sumber daya yang belum mencukupi, kurikulum pendidikan dan informasi serta pemahaman tentang Pendidikan PNF masih	Eksternal	UC	Tingginya angka pengangguran yang tidak berpendidikan	Kepala dinas pendidikan, Siswa dan guru	4	3	12		4,00	3,33	13,33
			Program pendidikan inklusif belum berjalan sesuai standar	R005	Kepala Dinas Pendidikan	Masih sangat kurang jumlah Pendidik yang memiliki kompetensi untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus	Internal	C	Anak berkebutuhan khusus belum dapat dididik dengan setara	Kepala dinas pendidikan, Siswa dan guru	3	3	9				Program pendidikan inklusif belum berjalan sesuai standar	R005	Kepala Dinas	Masih sangat kurang jumlah Pendidik yang memiliki kompetensi untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus	Internal	C	Anak berkebutuhan khusus belum dapat dididik dengan setara	Kepala dinas pendidikan, Siswa dan guru	3	3	9		4,00	3,50	14,00
						Belum adanya sarana penunjang untuk anak berkebutuhan khusus	Internal	C	Anak yang berkebutuhan khusus tidak terlayani dengan baik	Masyrakat										Belum adanya sarana penunjang untuk anak berkebutuhan khusus	Internal	C	Anak yang berkebutuhan khusus tidak terlayani dengan baik	Masyrakat							
			Motivasi dan prestasi belajar peserta didik yang rendah	R001	Kadis, Kabid	Kondisi keluarga yang tidak kondusif, minat pendidikan orang tua	Eksternal	UC	Angka mengulang Sekolah Dasar tinggi	Kadis, Masyarakat	1	1	1	Pengadaan peningkatan peserta didik			Motivasi dan prestasi belajar peserta didik yang rendah	R001	Kabid	Kondisi keluarga yang tidak kondusif, minat pendidikan orang tua	Eksternal	UC	Angka mengulang Sekolah Dasar tinggi	Kadis, Masyarakat	5	3	15	Optimalisasi peran Guru Konseling	4,20	3,60	15,12
						Faktor ekonomi keluarga yang rendah	Eksternal	UC						Edukasi pola asuh kepada orang tua peserta didik terkait parenting						Faktor ekonomi keluarga yang rendah	Eksternal	UC						Prioritas dana BOS untuk siswa miskin			
						Perundungan pada peserta didik	Internal	C						Optimalisasi pelaksanaan regulasi terkait perundungan pada tingkat satuan pendidikan						Perundungan pada peserta didik	Internal	C						Optimalisasi pengawasan dan edukasi terkait perundungan			
						Metode pengajaran yang tidak komunikatif dan menarik	Internal	C						Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan (GTK)						Metode pengajaran yang tidak komunikatif dan menarik	Internal	C						Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan (GTK)			
																	Masih ada lembaga pendidikan swasta belum memenuhi persyaratan minimal standar pendidikan, dengan dampak signifikan terhadap	R002	Kabid	Sekolah swasta lebih mengprioritaskan aspek sosial dan ekonomi tanpa memperhatikan standar nasional pendidikan	Eksternal	UC	Kualitas pendidikan Kota masih rendah	Masyarakat	4	4	16	Peningkatan pembinaan dan pengawasan bagi sekolah swasta	4,00	3,67	14,67
																				Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan Dinas karena belum dilakukan tindaklanjut oleh sekolah swasta	Internal	C									
																	Belum adanya sekolah yang bisa melaksanakan PBM untuk anak berkebutuhan khusus secara utuh sehingga program sekolah inklusif belum berjalan	R003	Kabid	Masih sangat kurang jumlah Pendidik yang memiliki kompetensi untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus	Internal	C	Kesetaraan pendidikan bagi kaum disabilitas belum terwujud	Masyarakat	4	4	16	Program sekolah inklusif	4,00	3,60	14,40
																				Belum adanya sarana penunjang untuk anak berkebutuhan khusus	Internal	C									
																	Distribusi guru yang belum merata sehingga ada sekolah yang kekurangan dan kelebihan guru	R004	Kadis, Kabid	Penerapan Kebijakan Zonasi belum optimal	Internal	C	Kualitas pendidikan masyarakat belum merata	Masyarakat	4	3	12	Optimalisasi kebijakan Zonasi dan pemerataan kualitas sekolah	4,00	3,50	14,00
																				Pemahaman masyarakat tentang sekolah favorit	Eksternal	UC									
																	PBM dilaksanakan sebagian kecil saja sehingga suasana belajar kurang menarik	R005	Kabid	Minimnya pemanfaatan TI karena baik sekolah guru cakap dalam pemanfaatan teknologi	Internal	C	Tingkat kreatifitas anak menjadi rendah	Sekolah, Masy	4	4	16	Efektifitas fungsi pengawasan dan pembinaan internal (Pengawas)	4,00	3,50	14,00
																				Kurangnya kreatifitas guru dan metode pembelajaran masih fokus pada pemenuhan akademik	Internal	C									
																				Guru lebih fokus dalam pemenuhan sertifikasi	Internal	C									
																	Kurangnya kompetensi Kepala Sekolah dan Guru sehingga PBM belum sesuai standar	R006	Kabid	Kurangnya kompetensi kepribadian, sosial, supervisi, manajerial, kewirausahaan	Internal	C	Standar proses berdampak kepada standar lulusan	Sekolah, Masy	4	3	12	Efektifitas Program pengembangan kompetensi	4,00	3,50	14,00

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO		
			Risiko			Sebab			Dampak								Risiko			Sebab			Dampak								
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	CAUC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	CAUC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
																				Program pengembangan kompetensi belum efektif	Internal	C									
	Tujuan: Terwujudnya Budaya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				Lokasi perpustakaan tidak strategis	Internal	C						Melakukan survey kepuasan layanan perpustakaan	Sasaran : Peningkatan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Perpustakaan yang ada belum sepenuhnya memenuhi Perpustakaan	RSO.24.23.25.01	Kepala Dinas	1. Keterbatasan jumlah koleksi perpustakaan	Internal	c	Perpustakaan kurang maksimal melaksanakan tugasnya dalam meningkatkan	Masyarakat/pengunjung	4	4	16		4,00	3,60	14,40
	Sasaran : Peningkatan literasi masyarakat																			2. Keterbatasan SDM berlatar pendidikan ilmu perpustakaan		uc									
																				3. Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan		c									
																				4. Belum maksimalnya melaksanakan layanan perpustakaan		c									
																				5. Layanan belum memanfaatkan teknologi informasi		c									
																	Kurangnya Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	RSO.24.23.25.02	Kepala dinas	Kurangnya promosi/sosialisasi perpustakaan	Internal	c	Rendahnya jumlah pengunjung dari masyarakat umum	DPK	4	3	12		3,83	3,33	12,78
																				Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM dalam mengelola Promosi dan sosialisasi	Internal	c									
																	Rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	RSO.24.23.25.03	Kepala dinas	1. Kecenderungan pemakaian medsos yang tinggi	eksternal	UC	Rendahnya aktivitas literasi membaca	DPK	4	4	16		3,80	3,40	12,92
																				2. Keterbatasan jumlah koleksi perpustakaan	Internal	C									
																				3. Lokasi kurang strategis	Internal	C									
						Perpustakaan belum memenuhi standar	Internal	C						Mengajukan pemindahan perpustakaan ke lingkungan Terminal Barat Bojok		Tingkat frekuensi, durasi dan jumlah buku	Indeks Kepuasan yang dperoleh belum menunjukan kondisi sebenarnya sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja	RS02	Kadis, Kabid	Masyarakat yang dilurvey kurang memahami pertanyaan survey	Internal	C	Merasa sudah puas dengan apa yang dicapai dan minim inovasi	Kadis, Kabid dan Masyarakat	4	4	16	Perbaikan atas pelaksanaan Survey	3,63	3,50	13,42
						Dominasi gadget dalam masyarakat pada tingkat umur tertentu	Eksternal	UC						Optimalisasi perpustakaan keliling dan buku bergulir		Hasil kepuasan dimustakan (97,47%)				Metode survey dan pemilihan sample kurang tepat	Internal	C									
														Mengikuti direktasi pustaka			Pengadaan koleksi buku belum sesuai dengan kebutuhan pembaca sehingga buku yang ada kurang bermanfaat	RS03	Kadis, Kabid	Identifikasi kebutuhan tidak didukung dengan data yang berasal dari pembaca	Internal	C	Pelaksanaan program belum efektif dalam meningkatan IPLM	Kadis, Kabid dan Masyarakat	4	3	12	Mengumpulkan data kebutuhan pembaca	3,80	3,40	12,92
														Penyediaan buku elektronik (e-book) pada playstore Bojok Membaca						Keterbatasan anggaran pengadaan buku yang berkualitas	Internal	C						Melakukan skala prioritas dan secara bertahap berusaha melengkapi koleksi buku			
																	Pengelolaan pustaka belum sesuai standar sehingga tingkat kenyamanan pembaca masih rendah	RS04	Kadis, Kabid	Pelayan kurang ramah dan komunikatif	Internal	C	Pelaksanaan program belum efektif dalam meningkatan IPLM	Kadis, Kabid dan Masyarakat	3	3	9		3,60	3,40	12,24
																				Penataan ruang dan ketersediaan fasilitas yang belum sesuai standar	Internal	C									
																				Minimnya pemanfaatan teknologi	Internal	C									
			Naskah kuno masih menjadi kepemilikan pribadi masyarakat														Banyaknya naskah kuno dan bukti sejarah yang hilang sehingga generasi mendatang tidak mengetahui kejadian dimasa lampau	RS04	Kadis, Kabid	Pengetahuan masyarakat tentang naskah kuno dan bersejarah masih rendah	Eksternal	UC	Generasi mendatang tidak bisa belajar dari kondisi masa lalu	Kadis, Kabid dan Masyarakat	4	3	12	Melakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat	3,80	3,40	12,92
																				Sosialisasi yang dilakukan belum efektif	Internal	C									
																				Masih minimnya upaya penyelamatan naskah kuno dan bukti sejarah	Internal	C									
																	Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pelestarian dan penyelamatan naskah kuno	RS04	Kadis, Kabid	Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi tentang terjemahan dan repliasi	Internal	C	Aset yang tak ternilai harganya tersebut menjadi mubazir	Kadis, Kabid dan Masyarakat	4	4	16	Kerjasama dengan lembaga terkait seperti Perpusnas, ANRI	3,67	3,50	12,83

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI: Risiko: Uraian	Risiko: Kode Risiko	Sebab: Pemilik	Sebab: Uraian	Sebab: Sumber	C/UC	Dampak: Uraian	Dampak: Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Meningkatnya Perlindungan Sosial masyarakat	Angka Kemiskinan	Proses pendataan masyarakat penerima bantuan belum dilakukan secara terpadu sehingga data dan informasi yang dihasilkan masih berbeda	RSP 1	Walikota	Kurang maksimalnya Verifikasi dan validasi Data baik tingkat daerah maupun pusat	Eksternal	C	Masyarakat miskin belum memadapatkan bantuan tepat sasaran dan tepat waktu	Walikota, Masyarakat miskin	3	3	9	
		Persentase penurunan Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Motivasi lembaga swasta belum maksimal dalam penangan masalah sosial sehingga CSR lembaga swasta belum dirasakan oleh masyarakat Kota Solok	RSP 2	Walikota	Masih kurangnya Komunikasi, Koordinasi dan kebijakan daerah dengan lembaga swasta dalam tanggung jawab CSR nya	Internal	C	Belum maksimal kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan	Walikota, Masyarakat miskin	4	3	12	
			Kualitas PPKS masih kurang memadai sehingga dalam melaksikan pendataan belum optimal	RSP 3	Walikota	Belum maksimalnya Bimtek dan pelatihan yang diberikan kepada SDM yang ada	Internal	C	Belum maksimalnya penanganan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat miskin	Walikota, Masyarakat miskin	3	2	6	
			Penanganan masalah PPKS belum efektif, efisien dan belum menyentuh langsung terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga hasilnya belum optimal	RSO1	Kepala Dinas Sosial	Rendahnya kepedulian sosial masyrakat	Eksternal	U/C						
					Kepala Dinas Sosial	Rendahnya sinergitas penyelenggaraan pelayanan sosial oleh pemerintah	Internal	C			2	3	6	
					Kepala Dinas Sosial	Rendahnya sinergitas penyelenggaraan pelayanan sosial oleh swasta	Eksternal	U/C			3	3	9	
					Kepala Dinas Sosial	Ketersedaan sarana dan prasarana pelayanan sosial belum memadai	Internal	C						
			Proses pendataan masyarakat penerima bantuan belum dilakukan secara terpadu sehingga data dan informasi yang dihasilkan masih berbeda	RSO1	Kepala Dinas Sosial	DTKS di tingkat pusat belum di mutakhirkan	Eksternal	C						
						Terjadinya wabah atau pandemi (bencana sosial)	Internal	C						
					Kepala Dinas Sosial	Partisipasi masyarakat belum aktif dalam mengawasi pelaksanaan pendataan					3	2	6	
			Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran sehingga jumlah PPKS yang tertangani tidak sesuai target	RSO1	Kepala Dinas Sosial	Data penerima bantuan yang belum terintegrasi	Internal	C						
					Kepala Dinas Sosial	PSM dalam melaksukan pendataan belum bekerja maksimal	Internal	C						
			Masih adanya penyandang disabilitas dan lunta sosial yang belum mendapatkan pelayanan sehingga belum terlaksanaya fungsi sosial terhadap pemulihan dan pengembangan kemampuan penyandang	RSO2	Kepala Dinas Sosial	Terbatasnya sarana prasarana serta operasional pelayanan terhadap penyandang disabilitas dan lunta sosial dan Terbatasnya kapasitas Balai Rehabilitasi Sosial milik Dinas Sosial	Internal	C			3	3	9	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SETELAH EVALUASI: Risiko: Uraian	Risiko: Kode Risiko	Risiko: Pemilik	Sebab: Uraian	Sebab: Sumber	C/UC	Dampak: Uraian	Dampak: Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO: Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
						Sarana dan prasarana yang belum memadai	Internal	C									
			Kondisi peralatan/ menyatap banyak yang rusak, robek, dan tidak terawat	R004	Kadis, Kabid	Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi tentang penanganan masalah sosial	Internal	C	Aset yang tak terlihat harganya tersebut menjadi mubadir	Kadis, Kabid dan Masyarakat	4	4	16	Kerjasama dengan lembaga terkait seperti Perguruan, AMPI	3,67	3,60	12,83
						Ruang penyimpanan yang tidak standar	Internal	C									
						Minimnya kegiatan pengawasan	Internal	C									
			Pengelolaan arsip di OPD belum tertib sehingga dokumen penting rawan hilang dan rusak	R004	Kadis, Kabid	Pemahaman OPD tentang Arsip masih rendah	Eksternal	UC	Data dan dokumen penting sebagai bukti sejarah dan dokumen hukum kurang valid	Kadis, Kabid dan Masyarakat	3	3	9	Melakukan sosialisasi yang efektif kepada OPD	3,88	3,57	13,78
						Sosialisasi yang dilakukan belum efektif	Internal	C									
			Pemanfaatan arsip bagi kegiatan penelitian/ kajian masih rendah sehingga hasil kajian kurang valid dan membutuhkan waktu lama	R004	Kadis, Kabid	Sosialisasi pemanfaatan arsip yang dilakukan belum efektif	Internal	C	Peran dan fungsi Dinas belum dirasakan oleh masyarakat	Kadis, Kabid dan Masyarakat	4	3	12	Melakukan sosialisasi yang efektif kepada mahasiswa dan peneliti	4,25	3,75	15,94
						Dinas hanya bersifat pasif dan menunggu	Internal	C									
	Tujuan: Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat		Proses pendataan masyarakat penerima bantuan belum dilakukan secara terpadu sehingga perbedaan data masih terjadi	RSP 1	Walikota	Kurang maksimalnya Verifikasi dan validasi Data baik tingkat daerah maupun pusat	Eksternal	C	Jumlah masyarakat miskin masih banyak	Walikota, Masyarakat miskin	3	3	9	Meningkatkan koordinasi dan perbaikan data	4,25	3,88	16,47
	Sasaran:					Data dukung belum valid dan lengkap	Internal	C									
	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	Persentase PPKS yang tertangani/ menerima bantuan	Motivasi lembaga swasta belum maksimal dalam penangan masalah sosial sehingga CSR lembaga swasta belum dirasakan oleh masyarakat	RSP 2	Walikota	Kurangnya koordinasi dan kepercayaan lembaga swasta	Internal	C	Jumlah masyarakat miskin masih banyak	Walikota, Masyarakat miskin	4	4	16	Meningkatkan koordinasi dan kepercayaan	4,38	4,00	17,50
	Menurunnya Jumlah Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Tertangani/ Menerima Bantuan	Penanganan masalah PPKS belum efektif efisiensi dan belum menyentuh langsung terhadap permasalahan yang dihadapi			Belum optimalnya program bersama antara pemerintah dan swasta dalam pengentasan kemiskinan	Internal	C									
		Persentase PPKS yang Tertangani/ Menerima Bantuan	Penanganan masalah PPKS belum efektif efisiensi dan belum menyentuh langsung terhadap permasalahan yang dihadapi	RSO1	Kepala Dinas	Rendahnya kepedulian sosial masyarakat	Internal	UC	Belum terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam penanganan	Kepala Dinas dan Masyarakat	4	4	16		4,38	4,00	17,50
	Program: Pemberdayaan sosial		Penanganan masalah PPKS belum efektif efisiensi dan belum menyentuh langsung terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga hasilnya belum optimal	RSO1	Kadis, Kabid	Rendahnya sinergitas penyelenggaraan pelayanan sosial oleh swasta	Eksternal	UC	Kesenjangan sosial masih tinggi	Kadis, Masyarakat miskin	4	4	16		4,25	3,88	16,47
				RSO1	Kepala Dinas	Ketersedaan sarana dan prasarana pelayanan sosial belum memadai	Internal	C									
			Proses pendataan masyarakat penerima bantuan belum dilakukan secara terpadu	RSO2	Kepala Dinas	Kewenangan pemutakhiran DTKS dilakukan oleh pusat	Eksternal	UC	1. Masyarakat miskin belum mendapatkan bantuan tepat sasaran	Kepala Dinas dan Masyarakat	5	4	20		4,13	3,75	15,47
						Ketersedaan sarana dan prasarana pelayanan sosial belum memadai	Internal	C									
			Proses pendataan masyarakat penerima bantuan belum dilakukan secara terpadu	RSO2	Kadis	Partisipasi masyarakat belum aktif dalam mengawasi pelaksanaan pendataan	Eksternal	UC			5	4	20		4,00	3,63	14,00
	Sasaran: Menurunnya Jumlah Penerima pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang Tertangani/ Menerima Bantuan	Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran	RSO3		Proses verval data belum memadai	Internal	C	Peningkatan kesejahteraan sosial tidak tercapai	Kepala Dinas dan PPKS	5	4	20		3,88	3,57	13,78
						Adanya subjektifitas pendataan oleh pilar sosial	Eksternal/Internal	UC/C									
			Masih adanya PPKS yang belum mendapatkan pelayanan	RSO3	Kadis	Terbatasnya sarana dan prasarana terhadap PPKS	Internal	C	Kurang maksimalnya jumlah PPKS yang ditangani	Kepala Dinas dan PPKS	4	4	16		3,67	3,50	12,83
			Masih adanya PPKS yang belum mendapatkan pelayanan	RSO4	Kepala Dinas	sinergitas antar lembaga/ instansi belum berjalan dengan baik	Eksternal	UC									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	SESUDAH EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO		
			Risiko			Sebab			Dampak								Risiko			Sebab			Dampak							
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
			Masih banyak Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang belum mendapatkan pelatihan/ Bimtek sehingga Kemampuan Menjalankan PSKS belum meningkat	RSO3	Kepala Dinas Sosial	dalam adanya dukungan dana yang maksimal	Internal	C									Rendahnya Kompetensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	RSO5	Kepala Dinas	Terbatasnya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi PSKS	Internal	C	Data PPKS yang disajikan kurang valid	Kepala Dinas, PPKS dan PSKS	4	4	16		3,50	3,33	11,67
			Upaya pencegahan dan penanganan risiko dari guncangan dan kerentanan sosial korban bencana belum maksimal	RSO4	Kepala Dinas Sosial	Sarana dan prasarana yang kurang memadai serta kurangnya peran masyarakat terhadap upaya perlindungan dari bahaya bencana	Internal	C			2	3	6				Upaya pencegahan dan penanganan risiko dari guncangan dan kerentanan sosial korban bencana belum maksimal	RSO6	Kepala Dinas	Sarana dan prasarana yang kurang memadai serta kurangnya peran masyarakat terhadap upaya perlindungan dari bahaya bencana	Internal	C	Masyarakat terdampak bencana alam belum maksimal tertangani	Kepala dinas dan korban bencana	4	4	16		3,40	3,20	10,88
																	Upaya pencegahan dan penanganan risiko dari guncangan dan kerentanan sosial korban bencana belum maksimal	RSO6	Kepala Dinas	Edukasi penanganan bencana kepada masyarakat belum memadai	Internal	C									
			Belum semua PPKS dapat tertangani secara optimal sehingga kualitas kehidupan sosialnya masih rendah	RSO5	Kadis, Kabid	sinergitas antar OPD belum berjalan dengan baik	Internal	C			2	2	4				Masih banyak Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang belum mendapatkan pelatihan/ Bimtek sehingga Kemampuan Menjalankan PSKS belum	RSO5	Kadis, Kabid	Belum adanya dukungan dana yang maksimal	Internal	C	Bantuan belum tepat sasaran	Kadis, Masyarakat miskin	3	3	9		3,20	3,00	9,60
																				Bimtek yang dilaksanakan belum efektif	Internal	C									
																	Upaya pencegahan dan penanganan risiko dari guncangan dan kerentanan sosial korban bencana belum maksimal	RSO6	Kadis, Kabid	Kurangnya peran masyarakat terhadap upaya perlindungan dari bahaya bencana	Internal	C	Kerawanan sosial masih tinggi	Kadis, Masyarakat miskin	3	3	9		3,25	3,00	9,75
																				Sarana dan prasarana yang kurang memadai	Internal	C									
																	Belum semua PPKS dapat tertangani secara optimal sehingga kualitas kehidupan sosialnya masih rendah	RSO7	Kadis, Kabid	sinergitas antar OPD belum berjalan dengan baik	Internal	C	Kerawanan sosial masih tinggi	Kadis, Masyarakat miskin	4	3	12		3,33	3,00	10,00
			Tidak semua anak terlantar terehabilitasi	RSO5	Walikota, masyarakat	Anak terlantar tidak terdata	Internal	C	Kematian anak-anak dan remaja meningkat	Masyarakat	4	3	12	Melakukan verifikasi dan validasi data secara lebih intensif																	
						Fasilitas rehabilitasi anak terlantar belum memenuhi standar	Internal	C	Tingkat kesehatan anak-anak dan remaja rendah					Pengadaan alat peraga untuk berkesebutas anak pada rumah singgah																	
						Jumlah pendamping rumah singgah belum mencukupi dan belum memenuhi kompetensi	Internal	C						Rekrutmen khusus pendamping rumah singgah																	
														Pelatihan bagi pendamping rumah singgah																	
	Sasaran: Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan		Rendahnya OPD yang berkomitmen melaksanakan pengarusutamaan gender melalui PPRG	RSO3	Kepala DPMPPA	SDM Perencana OPD yang belum memiliki kemampuan melaksanakan PPRG	Internal	C		Kadis, Masyarakat	4	3	12		Sasaran: Meningkatnya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG (%)	Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender belum terlaksana dengan optimal	RSO4	Kepala Dinas	SDM Perencana OPD yang belum memiliki kemampuan melaksanakan PPRG	Internal	C	Rendahnya pelaksanaan PPRG di OPD	OPD	3	3	9		4,00	3,75	15,00
						Keterbatasan anggaran melaksanakan pengarusutamaan gender	Internal	C									Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender belum terlaksana dengan optimal	RSO4	Kepala Dinas	Dokumen GAP dan GBS belum menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran	Internal	C	Rendahnya pelaksanaan PPRG di OPD	OPD							
						Kurangnya regulasi kebijakan tentang PPRG	Internal	C									Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender belum terlaksana dengan optimal	RSO4		Belum adanya Pelwako tentang PPRG	Internal	C	Rendahnya pelaksanaan PPRG di OPD	OPD							
			Belum terlaksanaya kegiatan organisasi perempuan secara optimal	RSO4	Kepala DPMPPA	Terjadinya perubahan pimpinan/ pengurus	Eksternal	UC		Kadis, Masyarakat	4	3	12			Persentase organisasi perempuan yang aktif (%)	Belum terlaksanaya kegiatan organisasi perempuan secara optimal	RSO5	Kepala Dinas	Terjadinya perubahan pimpinan/ pengurus	Eksternal	C	Peran serta kontribusi organisasi perempuan dalam	Kadis, Masyarakat	3	3	9		4,33	4,00	17,33
						Rangkap jabatan diberbagai organisasi	Eksternal	UC												Rangkap jabatan diberbagai organisasi	Eksternal	UC									
																				Usulan program kerja yang diajukan oleh organisasi perempuan belum secara menunjang program	Eksternal	UC									
			Masih tingginya angka tunggakan kredit sehingga penyaluran kredit menjadi tidak merata dan optimal	RSO6	Kepala DPMPPA	Belum adanya anggaran operasional untuk pengurus dalam meragih ke lapangan	Internal	C		Kadis, Masyarakat	5	4	20				Masih tingginya angka tunggakan kredit sehingga penyaluran kredit menjadi tidak merata dan optimal	RSO6	Kepala Dinas	Belum adanya anggaran operasional untuk pengurus dalam meragih ke lapangan	Internal	C		Kadis, Masyarakat	5	4	20		4,67	4,33	20,22
						Belum efektifnya kegiatan survey dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas	Internal	C												Belum efektifnya kegiatan survey dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas	Internal	C									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI												Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI														Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO		
			Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko			Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
						Paradigma masyarakat yang menganggap pinjaman adalah hibah yang tidak perlu dikembalikan	eksternal	UC													Paradigma masyarakat yang menganggap pinjaman adalah hibah yang tidak perlu dikembalikan	eksternal	UC									
	Tujuan: Penegakkan hukum bagi perempuan dan anak		Minimnya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	RSP1	Walikota	Kurangnya keterbukaan dan keberanian korban untuk melaporkan kasus kekerasan	Eksternal	UC	Rendahnya perlindungan perempuan dan anak	Walikota, Masyarakat	5	3	15			Tujuan: Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani (%)	Minimnya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	RSO1	Kepala Dinas	Kurangnya keterbukaan dan keberanian korban untuk melaporkan kasus kekerasan	Eksternal	c	Rendahnya perlindungan perempuan dan anak	Pelaku Korban Kekerasan	5	5	25		4,00	4,00	16,00
						Kurangnya SDM tertatih dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Internal	C								Sasaran: Strategis: Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak					Kurangnya SDM tertatih dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Internal	C									
						Belum tersosialisasinya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Internal	C								0	#REF!				Belum tersosialisasinya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	Internal	C									
						Belum maksimalnya fungsi Pokja Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan	Eksternal	C								0	#REF!				Belum maksimalnya fungsi Pokja Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan	Eksternal	C									
						Budaya ditengah masyarakat bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak adalah aib	Eksternal	UC									#REF!				Budaya ditengah masyarakat bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak adalah aib	Eksternal	UC									
			Keterlibatan OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindugan Khusus Anak belum maksimal	RSO1	Kepala Dinas	Belum semua OPD, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa mendapatkan pengetahuan tentang Konvensi Hak Anak (konvensi internasional) yang	Eksternal	C		Media, Masyarakat	5	3	15				Nilai Evaluasi Kota Layak Anak (KLA)	Keterlibatan OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindugan Khusus Anak	RSO1	Kepala Dinas	Belum semua stakeholder mendapatkan pengetahuan tentang Konvensi Hak Anak	Eksternal	C	Rendahnya perlindungan anak dan hak anak untuk tumbuh dan berkembang	Anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan	4	4	16		3,67	3,67	13,44
						Kurangnya pemahaman OPD, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat tentang KLA	Eksternal	C								0	#REF!				Kurangnya pemahaman OPD, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat tentang KLA	Eksternal	C									
						Kurangnya pengetahuan keluarga masyarakat dan lembaga masyarakat dalam memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak	Eksternal	C								0	#REF!				Kurangnya pengetahuan keluarga masyarakat dan lembaga masyarakat dalam memenuhi hak anak dan perlindungan	Eksternal	C									
						Belum optimalnya (belum proporsional) media massa dalam pembelitaan isu anak dan belum terintegrasi/koordinasi dengan anak	Eksternal	C													Belum optimalnya (belum proporsional) media massa dalam pembelitaan isu anak dan belum	Eksternal	C									
						Belum optimalnya dunia usaha/perusahaan yang perspektif anak (produk yang ditujukan aman bagi anak) dan belum berkontribusi dalam pemenuhan hak anak	Eksternal	C								Program:					Belum optimalnya dunia usaha/perusahaan yang perspektif anak (produk yang ditujukan aman bagi anak) dan belum	Eksternal	C									
						Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi KLA antar OPD, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa	Internal	C								0					Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi KLA antar OPD, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa	Internal	C									
			Kebijakan/regulasi pendukung KLA di masing-masing OPD, Dunia usaha, Lembaga Masyarakat belum maksimal	RSO2	Kepala DPMPPA	Isu anak dianggap tidak penting bagi stakeholder dalam menyusun program kegiatan dilapangan	Eksternal	C		Media, Masyarakat	4	3	12			0		Kebijakan/regulasi pendukung KLA di masing-masing OPD, Dunia usaha, Lembaga Masyarakat belum maksimal	RSO3	Kepala Dinas	Isu anak dianggap tidak penting bagi stakeholder dalam menyusun program kegiatan dilapangan	Eksternal	C		Anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan	3	3	9		3,75	3,75	14,06
						Belum optimalnya komitmen pemangku kepentingan/pengambil kebijakan tentang Kota Layak Anak (KLA)	Internal	C								0					Belum optimalnya komitmen pemangku kepentingan/pengambil kebijakan tentang Kota Layak Anak (KLA)	Internal	C		Anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan							
						Belum berfungsi dengan baik Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)	Internal	C								0					Belum berfungsi dengan baik Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)	Internal	C		Anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan							
						Belum optimalnya keterlibatan Forum Anak Daerah (FORDA) dalam perencanaan daerah yang terkait anak	Internal	C								0					Belum optimalnya keterlibatan Forum Anak Daerah (FORDA) dalam perencanaan daerah yang terkait anak	Internal	C		Anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan							
Misi IV Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Kota Berwawasan Lingkungan																																	
1	Terwujudnya Tata Ruang dan Infrastruktur Kota Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur	Terhambatnya investasi karena RTRW yang belum mendukung	RSP1	Walikota	Pembangunan terkendala kebijakan ruang hijau yang diatur di RTRW	Internal	C	Pertumbuhan ekonomi rendah yang berdampak pada kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat	Investor, Masyarakat	4	4	16	Optimalisasi Pembahasan Ranperda		Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	Terhambatnya investasi karena RTRW yang belum mendukung	RSP1	Walikota	Pembangunan terkendala kebijakan ruang hijau yang diatur di RTRW	Internal	C	Pertumbuhan ekonomi rendah yang berdampak pada kesempatan kerja dan	Investor, Masyarakat	4	4	16	Optimalisasi Pembahasan Ranperda RTRW	4,00	4,00	16,00
a	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW				Perubahan Perda RTRW membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang	Eksternal	UC								Tujuan : Meningkatkan bangunan gedung yang layak fungsi					Perubahan Perda RTRW membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang	Eksternal	UC									
			Ketersediaan MCK yang standar bagi masyarakat belum terpenuhi	RSP3		Faktor ekonomi belum memadai	Eksternal	UC	Kualitas kesehatan masy rendah dimana angka stunting tinggi.		4	4	16	1. Sosialisasi dengan masyarakat 2. Koordinasi dengan PDAM		Sasaran : (2) Meningkatnya inovasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang menjangkau layanan pengolahan air limbah domestik	Ketersediaan MCK yang standar bagi masyarakat belum terpenuhi	RSP3	Walikota	Faktor ekonomi belum memadai	Eksternal	UC	Kualitas kesehatan masy rendah dimana angka stunting tinggi.	Masyarakat	4	4	16	1. Sosialisasi dengan masyarakat 2. Koordinasi dengan PDAM	4,00	4,00	16,00
						Tingkat Pengetahuan dan budaya PHBS masih rendah	Eksternal	UC													Tingkat Pengetahuan dan budaya PHBS masih rendah	Internal	C									
						MCK komunal masih terbatas	Internal	C													MCK komunal masih terbatas	Internal	C									
						Ketersediaan air bersih belum tersedia	Internal	C													Ketersediaan air bersih belum tersedia	Internal	C									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO		
			Risiko			Sebab			Dampak						Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak								
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
			Ketersediaan air bersih bagi Rumah Tangga belum terpenuhi secara merata dan optimal	RSP4	Walikota	Jaringan instalasi PDAM yang masih terbatas		C	Kualitas kesehatan masy rendah karena keterbatasan air bersih		4	4	16	1. Meningkatkan perluasan jaringan Perpipaan 2. Melakukan Pembangunan Embung untuk air baku	Sasaran: (3) Meningkatnya jaringan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Pelayanan Air Bersih	Ketersediaan air bersih bagi Rumah Tangga belum terpenuhi secara merata dan optimal	RSP4	Walikota	Jaringan instalasi PDAM yang masih terbatas	Internal	C	Kualitas kesehatan masy rendah karena keterbatasan air bersih	Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan perluasan jaringan Perpipaan 2. Melakukan Pembangunan Embung untuk air baku	4,00	4,00	16,00
						Ketersediaan air baku yang belum memadai									Tujuan : meningkatkan sumber daya air dalam kondisi baik						Ketersediaan air baku yang belum memadai	Internal	C									
			Pelaksanaan tidak menyenangkan dan pelanggar pemanfaatan ruang kepada petugas sehingga menghambat komunikasi ketika akan disampaikan teguran secara baik	RSO9	Kadis PUPR	1. Kemampuan petugas dalam berkomunikasi dengan masyarakat masih kurang			Terjadinya penyimpangan terkait pemanfaatan ruang yang bermuara pada tidak terlaksananya tujuan RTRW yang telah	Kadik, Masyarakat	4	4	16	1. Memberikan surat teguran 2. Melakukan pengawasan langsung			Pelaksanaan tidak menyenangkan dan pelanggar pemanfaatan ruang kepada petugas sehingga menghambat komunikasi ketika akan disampaikan teguran	RSO9	Kadik	1. Kemampuan petugas dalam berkomunikasi dengan masyarakat masih kurang	Internal	C	Terjadinya penyimpangan terkait pemanfaatan ruang yang bermuara pada	Kadis, Masyarakat	4	4	16	1. Memberikan surat teguran 2. Melakukan pengawasan langsung	4,00	4,00	16,00
						2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan penataan ruang															2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan penataan ruang	Eksternal	UC									
						3. Banyak pelanggaran pemanfaatan ruang yang belum dikesekusi															3. Banyak pelanggaran pemanfaatan ruang yang belum dikesekusi	Eksternal	UC									
			Penegakan aturan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang belum optimal sehingga belum bisa menekan angka pelanggaran	RSO10	Kadis	1. Perda yang ada sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang dan sulit untuk diterapkan			Terjadinya penyimpangan terkait pemanfaatan ruang yang bermuara pada tidak terlaksananya tujuan RTRW yang telah	Kadik, Masyarakat	4	4	16	1. Memberikan surat teguran 2. Melakukan pengawasan langsung			Penegakan aturan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang belum optimal sehingga belum bisa menekan angka pelanggaran	RSO10	Kadik	1. Perda yang ada sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang dan sulit untuk diterapkan	Eksternal	UC	Terjadinya penyimpangan terkait pemanfaatan ruang yang bermuara pada	Kadis, Masyarakat	4	4	16	1. Memberikan surat teguran 2. Melakukan pengawasan langsung	4,00	4,00	16,00
						2. Belum ada melaksanakan reward dalam bentuk insentif bagi masyarakat yang sukarela bersedia menyerahkan tanahnya demi kepentingan Kendal														2. Belum ada melaksanakan reward dalam bentuk insentif bagi masyarakat yang sukarela bersedia menyerahkan tanahnya demi	Internal	C									
						3. Birokasi administrasi belum memberikan efek jera bagi masyarakat															3. Birokasi administrasi belum memberikan efek jera bagi masyarakat	Internal	C									
						4. Masih adanya intervensi terhadap penegakan aturan baik dari internal maupun eksternal															4. Masih adanya intervensi terhadap penegakan aturan baik dari internal maupun eksternal	Internal	C									
			Proses pelaporan dan pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan tidak tepat waktu sehingga berdampak terhadap keterlambatan penatausahaan keuangan	ROO 2		Waktu pelaksanaan pekerjaan fisik tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan			Menghambat kelancaran transportasi dan menciptakan ekonomi biaya tinggi serta berpengaruh terhadap		4	4	16	SPJ belum dilayarkan sebelum melengkapi administrasi dan bukti pendukung lainnya			Proses pelaporan dan pertanggung jawaban (SPJ) kegiatan tidak tepat waktu sehingga berdampak terhadap keterlambatan penatausahaan	ROO 2	Kadik	Waktu pelaksanaan pekerjaan fisik tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan	Internal	C	Menghambat kelancaran transportasi dan menciptakan ekonomi biaya	Masyarakat	4	4	16	1. SPJ belum dilayarkan sebelum melengkapi administrasi dan bukti pendukungnya 2. Meningkatkan kompetensi PPTK dan Bukha	4,00	4,00	16,00
						Penyusunan jadwal perencanaan pekerjaan tidak memperhitungkan waktu yang tersedia															Penyusunan jadwal perencanaan pekerjaan tidak memperhitungkan waktu yang tersedia	Internal	C									
						Beban kerja diakhir tahun yang tinggi															Beban kerja diakhir tahun yang tinggi	Internal	C									
						Kompetensi tenaga penatausahaan dan keuangan masih belum memadai (Kuantitas dan Kualitas)															Kompetensi tenaga penatausahaan dan keuangan masih belum memadai (Kuantitas dan Kualitas)	Internal	C									
						Peralatan (laptop) kurang memadai	Internal	UC													Peralatan (laptop) kurang memadai	Internal	C									
						Pejabat keberadaannya sering diluar kantor															Pejabat keberadaannya sering diluar kantor	Internal	C									
			Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek teknis. Sehingga mutu pekerjaan tidak maksimal	ROO 3	Kadis	Penyedia tidak mempunyai tenaga teknis dan administrasi yang memadai	Eksternal	UC	Umur ekonomis konstruksi tidak sesuai dengan standar dan cendrung cepat rusak	Kadik, Masyarakat	4	4	16	Sebelum pekerjaan dilaksanakan dilakukan tes sesuai dengan aplik teknis			Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spek teknis. Sehingga mutu pekerjaan tidak maksimal	ROO 4	Kadis	Penyedia tidak mempunyai tenaga teknis dan administrasi yang memadai	Eksternal	UC	Umur ekonomis konstruksi tidak sesuai dengan standar dan cendrung cepat	Kadis, Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan kompetensi pengawas 2. Meningkatkan kualitas SPI	4,00	4,00	16,00
						Pengawas dari segi jumlah dan kompetensi teknis kurang memadai															Pengawas dari segi jumlah dan kompetensi teknis kurang memadai	Internal	C									
						Manajemen mutu belum dilaksanakan															Manajemen mutu belum dilaksanakan	Internal	C									
						Terjadinya Kolusi (kecurangan) antara penyedia dan pengawas															Terjadinya Kolusi (kecurangan) antara penyedia dan pengawas	Internal	C									
						Lemahnya penegakan sanksi atas kelalaian yang dilakukan penyedia	Internal	C													Lemahnya penegakan sanksi atas kelalaian yang dilakukan penyedia	Internal	C									
			Master Plan pembangunan dan pemeliharaan sungai yang menjaga kawasan kota belum tersedia			Penetapan alokasi anggaran pemeliharaan belum sesuai kebutuhan			Umur ekonomis konstruksi tidak sesuai dengan standar dan cendrung cepat rusak		4	4	16	Adanya data teknis lapangan yang akurat			Master Plan pembangunan dan pemeliharaan sungai yang menjaga kawasan kota belum tersedia	ROO 6	Kadis	Penetapan alokasi anggaran pemeliharaan belum sesuai kebutuhan	Internal	C	Umur ekonomis konstruksi tidak sesuai dengan standar dan cendrung cepat	Kadis, Masyarakat	4	4	16	Adanya data teknis lapangan yang akurat	4,00	4,00	16,00
						Intervensi terhadap kebijakan															Intervensi terhadap kebijakan	Internal	C									
						Alokasi anggaran penyusunan master plan belum tersedia															Alokasi anggaran penyusunan master plan belum tersedia	Internal	C									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI – Risiko – Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Pekerjaan pengerukan sedimen sungai belum optimal sehingga volume sedimen yang ditangani masih terbatas			Alokasi anggaran terbatas			Kelancaran aliran sungai jadi terganggu sehingga potensi banjir masih tinggi terutama pada kondisi curah hujan yang ekstrim		4	4	16	Monitoring lapangan dan evaluasi secara berkala terhadap sungai
						Peralatan (Excavator Long) Belum memadai								
						Metode kerja masih secara manual								
			Keterlambatan pemeliharaan sehingga kerusakan banteran menjadi lebih tinggi			Ketiadaan data banteran sungai dalam kondisi rusak			Kelancaran aliran sungai jadi terganggu sehingga potensi banjir masih tinggi terutama pada kondisi curah hujan yang ekstrim		4	4	16	Monitoring lapangan dan evaluasi secara berkala
						Belum optimalnya survey secara berkala terhadap banteran sungai								
						Peristiwa bencana alam yang sulit diprediksi yang berpengaruh pada perencanaan								
			Pekerjaan pembuangan sedimen dan pemeliharaan saluran irigasi belum optimal sehingga berpengaruh pada debit air yang disalurkan			Alokasi anggaran terbatas			Produktifitas hasil pertanian dan perkebunan rendah dan berdampak pada kesejahteraan petani		4	4	16	Monitoring lapangan dan evaluasi secara berkala terhadap saluran irigasi
						Peralatan tidak memadai								
						Metode kerja masih secara manual								
			Keterlambatan pemeliharaan sehingga kerusakan irigasi menjadi lebih tinggi			Ketiadaan data banteran sungai dalam kondisi rusak			Produktifitas hasil pertanian dan perkebunan rendah dan berdampak pada kesejahteraan petani		4	4	16	Monitoring lapangan dan evaluasi secara berkala terhadap fisik yang rusak
						Belum optimalnya survey secara berkala terhadap banteran sungai								
						Peristiwa bencana alam yang sulit diprediksi yang berpengaruh pada perencanaan								
						Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Internal	C						
						Pemakaian material tidak sesuai dengan spek teknis	Internal	C						
						APH belum berkoordinasi dengan APIP	Eksternal	UC						
			Kecelakaan Kerja, sehingga menimbulkan korban	RSO10	Kadis, Kabid Pengairan, Subkor	Peralatan pengamanan yang digunakan tidak sesuai standar	Internal	C	Kerugian materil dan non materil	Masyarakat	5	3	15	
						Rendahnya kesadaran penyedia terkait manajemen K3	Internal	C						
						Metode kerja yang salah	Internal	C						
			Master Plan pembangunan dan pemeliharaan sungai yang menjadi kewenangan kota belum tersedia	RSO11	Kadis, Kabid Pengairan, Subkor	Penetapan alokasi anggaran pemeliharaan belum sesuai kebutuhan	Internal	C	Program tidak efektif dan efisien	Masyarakat	4	4	16	
						Intervensi terhadap kebijakan	Eksternal	UC						
						Alokasi anggaran penyusunan master plan belum tersedia	Internal	C						
			Mekanisme reward dan punishment belum diterapkan sehingga tingkat kinerja masih rendah	RSO12	Kadis, Kabid Pengairan, Subkor	Belum adanya kebijakan terkait reward	Internal	C	Kualitas pelayanan rendah	Masyarakat	4	3	12	

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SETELAH EVALUASI – Risiko – Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO – Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
		Pekerjaan pengerukan sedimen sungai belum optimal sehingga volume sedimen yang ditangani masih terbatas	ROO 7	Kabid	Alokasi anggaran terbatas	Internal	C	Kelancaran aliran sungai jadi terganggu sehingga potensi banjir masih tinggi terutama	Masyarakat	4	4	16	Monitoring lapangan dan evaluasi secara berkala terhadap sungai	4,00	4,00	16,00
					Peralatan (Excavator Long) Belum memadai	Eksternal	UC									
					Metode kerja masih secara manual	Internal	C									
		Keterlambatan pemeliharaan sehingga kerusakan banteran menjadi lebih tinggi	ROO 8	Kabid	Ketiadaan data banteran sungai dalam kondisi rusak	Internal	C	Kelancaran aliran sungai jadi terganggu sehingga potensi banjir masih tinggi terutama	Masyarakat	4	4	16	Monitoring lapangan dan evaluasi secara berkala	4,25	3,75	15,94
					Belum optimalnya survey secara berkala terhadap banteran sungai	Internal	C									
					Peristiwa bencana alam yang sulit diprediksi yang berpengaruh pada perencanaan	Eksternal	UC									
		Pekerjaan pembuangan sedimen dan pemeliharaan saluran irigasi belum optimal sehingga berpengaruh pada debit air yang disalurkan	ROO 9	Kabid	Alokasi anggaran terbatas	Internal	C	Produktifitas hasil pertanian dan perkebunan rendah dan berdampak pada kesejahteraan	Petani, Masyarakat	4	4	16	Monitoring lapangan dan evaluasi secara berkala terhadap saluran irigasi	4,25	3,75	15,94
					Peralatan tidak memadai	Internal	C									
					Metode kerja masih secara manual	Internal	C									
		Keterlambatan pemeliharaan sehingga kerusakan irigasi menjadi lebih tinggi	ROO 10	Kabid	Ketiadaan data banteran sungai dalam kondisi rusak	Internal	C	Produktifitas hasil pertanian dan perkebunan rendah dan berdampak pada kesejahteraan	Petani, Masyarakat	4	4	16	Monitoring lapangan dan evaluasi secara berkala terhadap fisik yang rusak	4,25	3,50	14,88
					Belum optimalnya survey secara berkala terhadap banteran sungai	Internal	C									
					Peristiwa bencana alam yang sulit diprediksi yang berpengaruh pada perencanaan	Eksternal	UC									
					Keterlambatan penyelesaian pekerjaan	Internal	C									
					Pemakaian material tidak sesuai dengan spek teknis	Internal	C									
					APH belum berkoordinasi dengan APIP	Eksternal	UC									
		Kecelakaan Kerja, sehingga menimbulkan korban	RSO10	Kadis, Kabid Pengairan, Subkor	Peralatan pengamanan yang digunakan tidak sesuai standar	Internal	C	Kerugian materil dan non materil	Masyarakat	5	3	15	Penerapan manajemen K3 secara konsisten	4,50	3,50	15,75
					Rendahnya kesadaran penyedia terkait manajemen K3	Internal	C									
					Metode kerja yang salah	Internal	C									
		Master Plan pembangunan dan pemeliharaan sungai yang menjadi kewenangan kota belum tersedia	RSO11	Kadis, Kabid Pengairan, Subkor	Penetapan alokasi anggaran pemeliharaan belum sesuai kebutuhan	Internal	C	Program tidak efektif dan efisien	Masyarakat	4	4	16	Menyusun master plan pembangunan sungai	4,33	3,67	15,89
					Intervensi terhadap kebijakan	Eksternal	UC									
					Alokasi anggaran penyusunan master plan belum tersedia	Internal	C									
		Mekanisme reward dan punishment belum diterapkan sehingga tingkat kinerja masih rendah	RSO12	Kadis, Kabid Pengairan, Subkor	Belum adanya kebijakan terkait reward	Internal	C	Kualitas pelayanan rendah	Masyarakat	4	3	12	Menerapkan mekanisme reward dan punishmen bagi pegawai	4,33	3,67	15,89

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI – Risiko – Uraian	Risiko – Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SETELAH EVALUASI – Risiko – Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO – Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
			Kepadatan lalu lintas masih terjadi pada waktu tertentu sehingga potensi kemacetan masih tinggi	RSO 1	Kepala Dinas Perhubungan	Perlintasan jalan nasional	Eksternal	UC	Angka kecelakaan masih tinggi	Pengguna Jalan	5	4	20	1. koordinasi dengan OPD guna peningkatan sarana dan prasarana jalan. 2. melakukan penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana jalan. 3. membuat usulan penambahan petugas.	Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas	V/C Ratio (0,47)	Kepadatan lalu lintas masih terjadi pada waktu tertentu sehingga potensi kemacetan masih tinggi	RSO 1	Kepala Dinas	Perlintasan jalan nasional	Eksternal	UC	Angka kecelakaan masih tinggi	pengguna kendaraan	5	4	20	1. Koordinasi pada OPD terkait untuk peningkatan sarana dan prasarana pada jalan yang rawan kemacetan. 2. melakukan penambahan perbaikan sarana dan prasarana. [illegible]	4,33	4.00	17,33
						Banyak jalan simpul	Eksternal	UC	Waktu tempuh menjadi lebih lama											Banyak jalan simpul	Eksternal	UC	Waktu tempuh menjadi lebih lama	pengguna kendaraan							
						Bersamaannya jadwal masuk dan pulang sekolah	Eksternal	UC	Ekonomi biaya tinggi											Bersamaannya jadwal masuk dan pulang sekolah	Eksternal	UC	intensitas kepadatan jalan	pengguna kendaraan							
						Parkir di badan jalan	Internal	C	Kemacetan terjadi											Parkir di badan jalan	Internal	C	Kemacetan terjadi	pengguna kendaraan							
						Angkutan barang masih bisa masuk kota	Internal	C	Kerusakan pada jalan, karena tidak sesuai dengan berat yang di izinkan											Angkutan barang masih bisa masuk kota	Internal	C	Kerusakan pada jalan, karena tidak sesuai dengan berat yang di izinkan	pengguna kendaraan							
						Pedagang kaki lima yang memanfaatkan badan jalan	Eksternal	UC	Timbul hambatan samping pada ruas jalan											Pedagang kaki lima yang memanfaatkan badan jalan	Eksternal	UC	Timbul hambatan samping pada ruas jalan	pengguna kendaraan							
						Rambu-rambu yang belum memadai	Internal	C	Faktor keselamatan pengguna jalan berkurang											Rambu rambu yang belum memadai	Internal	C	Faktor keselamatan pengguna jalan berkurang	pengguna kendaraan							
			Tingkat kepatuhan pengguna jalan masih rendah sehingga angka kecelakaan masih tinggi	RSO 2	Kepala Dinas Perhubungan	Sosialisasi masih minim	Internal	C	Faktor keselamatan pengguna jalan berkurang	Masyarakat sebagai pengguna jalan	4	4	16	1. Sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada semua lapisan masyarakat		Rasio Kejadian Kecelakaan (0,0068)	Tingkat kepatuhan pengguna jalan masih rendah sehingga angka kecelakaan masih tinggi	RSO 2	Kepala Dinas	Edukasi keselamatan lalu lintas kurang menarik bagi masyarakat.	Internal	C	Faktor keselamatan pengguna jalan berkurang	Masyarakat sebagai pengguna jalan	4	4	16	1. sosialisasi keselamatan berlalu lintas kpd semua lapisan masyarakat. 2. Adanya diklat PPNS	4,00	4.00	16,00
						Rambu-rambu yang belum memadai	Internal	C	Faktor keselamatan pengguna jalan berkurang											Rambu rambu yang belum memadai	Internal	C	Faktor keselamatan pengguna jalan berkurang	Masyarakat sebagai pengguna jalan							
						Jumlah PPNS masih minim	Internal	C						1. Adanya diklat PPNS						Jumlah PPNS masih minim	Internal	C	Terbatasnya SDM PNS.	masyarakat kurang edukasi mengenai tert berlalu lintas							
			Keterlambatan penyelesaian dokumen RAK (Rencana Aksi Keselamatan)	RSO 3	Kepala Dinas/ Kabid LLJ	Nilai pagu anggaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tidak mencukupi	Internal	C	Penyelesaian dokumen terlambat		4	4	16	Dilakukan koordinasi dengan pihak provinsi maupun kementerian untuk penetapan standart teknis penyusunan RAK			Keterlambatan penyelesaian dokumen RAK (Rencana Aksi Keselamatan)	RSO 3	Kepala Dinas/ Kabid LLJ	Nilai pagu anggaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tidak mencukupi	Internal	C	Penyelesaian dokumen terlambat	Pelaksanaan kegiatan tidak maksimal	4	4	16	dilakukan koordinasi dengan pihak terkait baik di provinsi dan kementerian untuk penetapan standart teknis penyusunan RAK	4,00	4.00	16,00
						Proses penunjukan tenaga ahli tidak selektif	Eksternal	C																							
						Pengumpulan data yang memakan waktu lama	Internal	C																							
			Belum terdatanya titik-titik parkir potensial	RSO 5	Kepala Dinas / Kepala UPTD Terminal dan Perparkiran	Adanya konflik kepentingan lahan parkir dengan masyarakat umum	Internal	C	Tidak optimalnya jumlah titik parkir		4	4	16	Adanya aturan penagihan untuk pengelolaan parkir yang tidak menerapkan perwako.			potensi lahan parkir yang strategis belum terdata	RSO 5	Kepala Dinas / Kepala UPTD Terminal dan Perparkiran	Adanya konflik kepentingan lahan parkir dengan masyarakat umum	Internal	C	Tidak optimalnya jumlah titik parkir	tidak tertata dengan baik titik lahan parkir yang kondusif	4	4	16	Diberlakukan aturan penagihan untuk pengelolaan parkir sesuai perwako yang berlaku	4,00	4.00	16,00
						Data dukung belum valid dan lengkap																									
			Pemrosesan belum sesuai dengan capaian, pengemudi sebagaian besar belum memiliki kompetensi mengemudi	RSO 12	Kepala Dinas/ Kabid LLJ	Pengemudi banyak yang belum memahami tentang berkeselamatan berlalu lintas sehingga pelaksanaan terpadu kurang maksimal	Eksternal	C	Faktor keselamatan berkendara berkurang		4	4	16	1. Pemasangan rambu dilokasi yang tepat. 2. Pemilihan metode sosialisasi yang lebih menarik.			Pemrosesan belum sesuai dengan capaian, pengemudi sebagaian besar belum memiliki kompetensi mengemudi	RSO 12	Kepala Dinas/ Kabid LLJ	Pengemudi banyak yang belum memahami tentang berkeselamatan berlalu lintas sehingga pelaksanaan terpadu kurang maksimal	Eksternal	C	Faktor keselamatan berkendara berkurang	pengguna kendaraan di jalan	4	4	16	1. Pemasangan rambu dilokasi yang tepat. 2. Pemilihan metode sosialisasi yang lebih menarik.	4,11	4.00	16,44
			Kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas	RSO 13	Kepala Dinas/ Kabid LLJ	Tidak tertibnya pengguna jalan	Internal	C	Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas		4	4	16				Kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas	RSO 13	Kepala Dinas/ Kabid LLJ	Tidak tertibnya pengguna jalan	Internal	C	Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas	pengguna kendaraan di jalan	4	4	16	1. Diadakan sosialisasi jemput bola dipangan oleh petugas secara langsung di lapangan	4,11	4.00	16,44
						Kurang sosialisasi mengenai keselamatan berlalu lintas	Internal	C	Faktor keselamatan berkendara berkurang																						
			Perlengkapan jalan pada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan yang ada	RSO 22	Kepala Dinas/Kabid SPAJ	Data perlengkapan jalan belum terinventarisasi dengan baik	Eksternal	C	Penentuan jumlah perlengkapan jalan tidak valid		4	4	16	Melakukan pengadaan perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan			Perlengkapan jalan pada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan yang ada	RSO 22	Kepala Dinas/Kabid SPAJ	Data perlengkapan jalan belum terinventarisasi dengan baik	Eksternal	C	Penentuan jumlah perlengkapan jalan tidak valid	pengguna kendaraan	4	4	16	Melakukan pengadaan perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan	4,13	4.00	16,50
			Penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan kurang tepat	RSO 23	Kepala Dinas/Kabid SPAJ	SOP yang ada sudah tidak sesuai dengan kebutuhan	Internal	C	Pemasangan perlengkapan jalan tidak sesuai dengan kebutuhan		4	4	16	Melakukan penyesuaian kembali lokasi pemasangan perlengkapan jalan			Penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan kurang tepat	RSO 23	Kepala Dinas/Kabid SPAJ	SOP yang ada sudah tidak sesuai dengan kebutuhan	Internal	C	Pemasangan perlengkapan jalan tidak sesuai dengan kebutuhan	pengguna kendaraan dijalan	4	4	16	Melakukan penyesuaian kembali lokasi pemasangan perlengkapan jalan	4,13	4.00	16,50
			Siklus dari traffic light tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	RSO 26	Kepala Dinas/Kabid SPAJ	Volume kendaraan meningkat	Eksternal	C	Arus lalu lintas menjadi tidak lancar dan berpotensi terjadinya kecelakaan	Masyarakat	4	4	16	Melakukan penyesuaian kembali siklus traffic light sesuai dengan volume kendaraan			Siklus dari traffic light tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	RSO 26	Kepala Dinas/Kabid SPAJ	belum ada data kebutuhan rambu/survey kebutuhan rambu	Eksternal	C	Arus lalu lintas menjadi tidak lancar dan berpotensi terjadinya kecelakaan	pengguna kendaraan dijalan	4	4	16	Melakukan penyesuaian kembali siklus traffic light sesuai dengan volume kendaraan	4,14	4.00	16,57
						Belum tersedianya fly over di persimpangan yang padat	Internal	C																							

No	SEBELUM EVALUASI														SETELAH EVALUASI														RATA-RATA NILAI RISIKO		
	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko: Uraian	Risiko: Kode Risiko	Risiko: Pemilik	Sebab: Uraian	Sebab: Sumber	C/UC	Dampak: Uraian	Dampak: Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko: Uraian	Risiko: Kode Risiko	Risiko: Pemilik	Sebab: Uraian	Sebab: Sumber	C/UC	Dampak: Uraian	Dampak: Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
			Banyaknya prasarana jalan yang rusak / hilang	ROO 27	Kepala Dinas/Kabid SPAJ	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prasarana jalan	Eksternal	C	Kurang terjaminnya keselamatan bagi pengguna jalan yang melintasi lokasi	Masyarakat	4	4	16	1. Melakukan penggantian prasarana jalan yang rusak/ hilang 2. Pembaruan SOP			Banyaknya prasarana jalan yang rusak / hilang	ROO 27	Kepala Dinas/Kabid SPAJ	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prasarana jalan	Eksternal	C	Kurang terjaminnya keselamatan bagi pengguna jalan yang melintasi lokasi	pengguna kendaraan dijalan	4	4	16	1. Melakukan penggantian prasarana jalan yang rusak/ hilang 2. Pembaruan SOP	4,14	4,00	16,57
						Intensitas pengawasan ke lapangan masih minim	Internal	C																							
						Belum tersedianya marka jalan yang memadai	Internal	C																							
			Banyaknya perlengkapan jalan yang rusak / hilang	ROO 30	Kepala Dinas/Kabid SPAJ	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlengkapan jalan	Internal	C	Kurang terjaminnya keselamatan bagi pengguna jalan yang melintasi lokasi	Masyarakat	4	4	16	1. Melakukan penggantian perlengkapan jalan yang rusak / hilang 2. Pembaruan SOP			Banyaknya perlengkapan jalan yang rusak / hilang	ROO 30	Kepala Dinas/Kabid SPAJ	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlengkapan jalan	Internal	C	Kurang terjaminnya keselamatan bagi pengguna jalan yang melintasi lokasi	pengguna kendaraan	4	4	16	1. Melakukan penggantian perlengkapan jalan yang rusak / hilang 2. Pembaruan SOP	4,11	4,13	16,98
			Penerangan jalan belum mencakup semua ruas jalan	ROO 31	Kepala Dinas/Kabid SPAJ	Belum adanya penerangan jalan yang memadai	Internal	C	Kurangnya penerangan jalan mengakibatkan berbagai resiko yang besar bagi pengguna jalan	Masyarakat	4	4	16	1. Melakukan double cross check terhadap daerah yang belum terlayani penerangan jalan 2. Pembaruan SOP			Penerangan jalan belum mencakup semua ruas jalan	ROO 31	Kepala Dinas/Kabid SPAJ	Belum adanya penerangan jalan yang memadai	Internal	C	Kurangnya penerangan jalan mengakibatkan berbagai resiko yang besar bagi	pengguna jalan	4	4	16	1. Melakukan double cross check terhadap daerah yang belum terlayani penerangan jalan 2. Pembaruan SOP	4,11	4,13	16,98
			Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor terhambat	ROO 37	Kepala Dinas/Kepala UPTD PKB	Pemeliharaan sarana dan prasarana tidak dilakukan secara berkala	Internal	C	Kurang optimalnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Masyarakat	5	4	20	1. Harus ada pemeliharaan dan kalibrasi alat yang rutin. 2. Kompetensi SDM dalam pengoperasian alat uji. 3. Adanya diklat penguji			Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor terhambat	ROO 37	Kepala Dinas/Kepala UPTD PKB	Pemeliharaan sarana dan prasarana tidak dilakukan secara berkala	Internal	C	Rendahnya pencapaian target jumlah kendaraan bermotor yang diuji.	masyarakat yang berkendaraan	5	4	20	1. Harus ada pemeliharaan dan kalibrasi alat yang rutin. 2. Kompetensi SDM dalam pengoperasian alat uji. 3. Adanya diklat penguji	4,13	4,14	17,09
b	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup	Keterlambatan penyelesaian Ranperda RPPLH Kota Solok	RSO01	Kepala Dinas lingkungan hidup	Proses penyelesaian Perda di DPRD	Eksternal	UC	Penyelesaian Perda RPPLH terlambat	Kota Solok	4	4	16	Mengajukan Telaahan Staf ke Wali Kota untuk percepatan pembahasan			Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Keterlambatan penyelesaian Ranperda RPPLH Kota Solok	RSO01	Kepala Dinas	Proses penyelesaian Perda di DPRD	Eksternal	UC	Penyelesaian Perda RPPLH terlambat	4	4	4	16	4,00	4,14	16,57
						Proses harmonisasi di Kemenkumham memakan waktu yang lama	Eksternal	UC													Proses harmonisasi di Kemenkumham memakan	Eksternal	UC								
			Keterlambatan penyelesaian dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	RSO02	Kepala Dinas lingkungan hidup	Proses pengolahan data tidak sesuai jadwal yang direncanakan	Internal	C	Penyelesaian dokumen KLHS terlambat	DLH	4	4	16	Mengadakan rapat bersama tim teknis penyusunan dokumen KLHS RPJPD/RPJMD				Keterlambatan penyelesaian dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	RSO02	Kepala Dinas	Proses pengolahan data tidak sesuai jadwal yang	Internal	C	Penyelesaian dokumen KLHS terlambat	4	4	4	16	4,00	4,14	16,57
						Lambatnya Penyampaian dari OPD pengumpul data	Internal	C													Lambatnya Penyampaian dari OPD pengumpul data	Internal	C								
			Tidak tersedianya data kualitas Lingkungan Hidup yang berkualitas	RSO03	Kepala Dinas lingkungan hidup	Minimnya pemantauan kualitas lingkungan hidup karena minimnya anggaran	Internal	C	Data kualitas lingkungan tidak mewakili kondisi sebenarnya dilapangan	DLH	4	4	16	Mengajukan telaahan staf untuk pengajuan penambahan anggaran			IKA IKU IKT	Tidak tersedianya data kualitas Lingkungan Hidup yang berkualitas	RSO03	Kepala Dinas	Minimnya pemantauan kualitas lingkungan hidup karena	Internal	C	Data kualitas lingkungan tidak mewakili kondisi sebenarnya dilapangan	4	4	4	16	4,00	4,17	16,67
																		Nilai IKA rendah		Kepala Dinas	Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai	Eksternal	UC	Kualitas air tidak baik	4	5	3	15	4,00	4,20	16,80
			Belum tersedianya data base sumber emisi GRK yang akurat	RSO04	Kepala Dinas lingkungan hidup	Kurangnya kapasitas SDM pegawai, Kurangnya pengetahuan terkait sumber emisi GRK	Internal	C	Data base sumber emisi GRS tidak akurat	DLH	4	4	16	Mengajukan telaahan staf untuk pengajuan anggaran kontrak/pelatihan				Belum tersedianya data base sumber emisi GRK yang akurat	RSO04	Kepala Dinas	Kurangnya kapasitas SDM pegawai, Kurangnya pengetahuan	Internal	C	Data base sumber emisi GRS tidak akurat	4	4	4	16	4,00	4,00	16,00
						Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang jenis bahan perusak lapisan ozon yang tidak diperbolehkan/ dilarang perdagangannya	Eksternal	UC	Berbahaya bagi lingkungan apabila bekas kemasannya dibuang sembarangan (bisa menyebabkan ledakan)	Masyarakat											Kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang jenis bahan	Eksternal	UC	Berbahaya bagi lingkungan apabila bekas kemasannya dibuang sembarangan (bisa	4						
			Menurunnya kualitas udara	RSO06	Kepala Dinas lingkungan hidup	Pembakaran jerami sehingga meningkatnya jumlah karbon dioksida di udara	Eksternal	C	Berbahaya bagi kesehatan	Masyarakat	4	4	16	Mengajukan telaahan staf untuk pengajuan anggaran sosialisasi				Menurunnya kualitas udara	RSO06	Kepala Dinas	Pembakaran jerami sehingga meningkatnya jumlah	Eksternal	C	Berbahaya bagi kesehatan	4	4	4	16	4,00	4,00	16,00
			Sedikitnya jumlah laporan UKL/UPL yang diberikan ke DLH	RSO12	Kepala Dinas lingkungan hidup	Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan	Internal	C	Sedikitnya pelaporan UKL/UPL oleh pelaku usaha	DLH	4	4	16	Mengajukan draft perwako terkait sanksi bagi pelaku usaha ke bagian hukum			Persentase pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan PJ/U LH yang diterbitkan	Sedikitnya jumlah laporan UKL/UPL yang diberikan ke DLH	RSO12	Kepala Dinas	Kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha yang memiliki	Internal	C	Sedikitnya pelaporan UKL/UPL oleh pelaku usaha	4	4	4	16	4,00	4,00	16,00
						Kurangnya kesadaran pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan	Eksternal	UC		DLH											Kurangnya kesadaran pelaku usaha yang memiliki izin	Eksternal	UC		4						
						Kurang tegasnya pemberian sanksi oleh DLH kepada pelaku usaha yang tidak melaporkan UKL/UPL		C													Kurang tegasnya pemberian sanksi oleh DLH kepada		C								
			Sulitnya penerapan sanksi upaya dan rencana PPLHD	RSO13	Kepala Dinas lingkungan hidup	Keterandalan regulasi daerah belum ada dalam penerapan sanksi upaya rencana PPLHD	Internal	C	Terjadinya pelanggaran PPLHD	Masyarakat/ Pelaku Usaha	4	4	16	Mengajukan draft perwako terkait rencana terkait penerapan sanksi dan rencana PPLHD				Sulitnya penerapan sanksi upaya dan rencana PPLHD	RSO13	Kepala Dinas	Keterandalan regulasi daerah belum ada dalam penerapan	Internal	C	Terjadinya pelanggaran PPLHD	4	4	4	16	4,00	4,00	16,00

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO		
			Risiko			Sebab		CiUC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko				Risiko			Sebab		CiUC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
						Metode pembiasaan kebiasaan adaptasiyang belum optimal dilakukanoleh oleh BLH	Internal	C													Metode pembiasaan kebiasaan adaptasiyang belum	Internal	C									
						Kurangnya peran dinas pendidikan dalam mendukung program PHLIS	Eksternal	UC													Kurangnya peran dinas pendidikan dalam mendukung	Eksternal	UC									
																	Kelola kinerja pengelolaan sampah														
																	persentasi pilah sampah berbeda														
			Pelaksanaan operasional rumah kompos tidak optimal	R0020	Kepala Dinas pangkepangan hidup	Kurangnya pembiayaan dari BLH terhadap PHL (pengawai harian lepas) dalam mengolah sampah menjadi kompos	Internal	C	Pengolahan sampah organik skala kota belum optimal	Kota Bitok	4	4	16	Melakukan pembiayaan yang intensif kepada PHL untuk melakukan pemilahan sampah mulai dari sampah yang ada di pasar dan sampah yang dianggkut dari rumah tangga			Persentasi dikelolanya sampah yang dianggkut di TPA Widyah Bcik	Rs020	Kepala Dinas	PHL (pegawai harian lepas) belum memilah sampah yang	Internal	C	Timbunan sampah yang dikelola pada TPA meningkat	4	4	4	16	4,00	4,00	16,00
						Belum adanya pemilihan secara khusus untuk barang organik yang dianggkut															Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah										
																					kurangnya sarana yang mendukung untuk meningkatkan										
																	Indeks kualitas Lahan (IKL)														
			Hilangnya kolekti flora dan fauna dikawasan kehati	R0026	Kepala Dinas pangkepangan hidup	Tidak adanya petugas kawasan di taman kehati	Internal	C	Berkurangnya koleksi flora dan fauna di taman kehati	BLH	4	4	16	Melakukan penjagaan yang lebih intensif			Persentasi pasien RTH publik	Rs024	Kepala Dinas	Tidak adanya petugas kawasan di taman kehati	Internal	C	Berkurangnya koleksi flora dan fauna di taman kehati	4	4	4	16	4,00	4,00	16,00
c	Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Indeks Kualitas Permukiman	Risiko Strategis													Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Indeks Kualitas Permukiman	Risiko Strategis														
	Sasaran: Terpenuhinya Kebutuhan rumah Layak huni		Persepsi publik kualitas permukiman masih rendah		Walikota											Sasaran: Terpenuhinya Kebutuhan rumah Layak huni		Persepsi publik kualitas permukiman masih rendah		Walikota										
			Risiko Strategis OPD:															Risiko Strategis OPD:													
			Persentase KK yang belum memiliki rumah layak huni sesuai standar Permen PUPR masih tinggi	RSO 1	Kepala Dinas PUPR	tidak ada validasi data dan informasi KKMBR (yang belum memiliki RLH) dalam suatu aplikasi yang terusterintegrasi (data flasa)	internal	C	Penanganan RTLH tidak tepat sasaran, karena pemberian bantuan RLH tidak berdasarkan database	Masyarakat pemohon RLH	4	5	20	eksrasi database RTLH dengan menggunakan aplikasi yang terusterintegrasi dan bisa diakses langsung oleh masyarakat			Persentase KK yang belum memiliki rumah layak huni sesuai standar Permen PUPR masih tinggi	RSO 1	Kepala Dinas	tidak ada validasi data dan informasi KKMBR (yang belum memiliki RLH) dalam suatu aplikasi yang terusterintegrasi (data flasa)	internal	C	Penanganan RTLH tidak tepat sasaran, karena pemberian bantuan RLH tidak berdasarkan	Masyarakat pemohon RLH	4	5	20	ekrasi database RTLH dengan menggunakan aplikasi yang terusterintegrasi dan bisa diakses langsung oleh masyarakat	4,00	7,50	30,00
						adanya penambahan jumlah KK yang tergolong MBR di Kota Bitok	eksternal	UC	Jumlah KK MBR meningkat	Masyarakat pemohon RLH																					
						Masyrakat MBR Pemohon RLH tidak mampu melegkapi persyratan utama mengajukan RLH	eksternal	UC	Penanganan RTLH belum maksimal	masyarakat pemohon RLH																					
			Masih ada lingkungan hunian yang belum terfasilitasi PSU yang memadai	RSO2	Kepala Dinas PUPR	Belum ada pembagian tanggungjawab penyediaan PSU antara Pemda dan Developer	internal	C	kualitas lingkungan pemukiman menjadi rendah	Pemda/OPD dan Masyarakat pemukiman	4	5	20	Materplas dan Perda PSU perumahan (termasuk pembagian tanggungjawab penyediaan PSU antara Pemda dan Developer)			Masih ada lingkungan hunian yang belum terfasilitasi PSU yang memadai	RSO2	Kepala Dinas	Belum ada pembagian tanggungjawab penyediaan PSU antara Pemda dan Developer	internal	C	kualitas lingkungan pemukiman menjadi rendah	Pemda/OPD dan Masyarakat pemukiman	4	5	20	Materplas dan Perda PSU perumahan (termasuk pembagian tanggungjawab penyediaan PSU antara Pemda dan Developer)	4,00	10,25	41,00
						tidak ada database perumahan yang prioritas untuk dutanakan pembangunan/pemeliharaan PSUnya	internal	C	tidak ada prioritas penyaluran PSU	Pemda/OPD dan masyarakat perumahan											tidak ada database perumahan yang prioritas untuk dutanakan pembangunan/pemeliharaan	internal	C	tidak ada prioritas penyaluran PSU	Pemda/OPD dan masyarakat perumahan									
			Risiko Operasional OPD: Dinas																												
			Terlambat memulai pekerjaan/konstruksi	RO04	Pabid PSU																										
			Kualitas/mutu pekerjaan konstruksi masih rendah	RO06	Pabid PSU	Julah dan tingkat SDM pengawasan lapangan yang kurang	Internal	C	Kwltas/mutu pekerjaan rendah	Dinas Perumahan dan Permukiman dan Lingkungan	4	4	16	1. Merekrut tenaga pengawas dari bidang lain 2. melakukakan pelatihan untuk tenaga pengawas yang ada			Kualitas/mutu pekerjaan konstruksi masih rendah	RO06	Kabid PSU	Julah dan tingkat SDM pengawasan lapangan yang kurang	Internal	C	Kwltas/mutu pekerjaan rendah	Dinas Perumahan dan Permukiman dan Lingkungan	4	4	16	1. Merekrut tenaga pengawas dari bidang lain 2. melakukakan pelatihan untuk tenaga pengawas yang ada	4,00	13,00	52,00
						kurangnya kesadaran kontraktor dalam memberikan mutu sesuai kontrak	Eksternal	C	Kwltas/mutu pekerjaan rendah	Dinas Perumahan dan Permukiman dan Lingkungan																					
			RAP tidak sesuai dengan RAB perencanaan (addendum pekerjaan)	RO09	Pabid PSU																										
Misi V Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan masyarakat yang bersih, efektif dan efisien																															
a	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Pelayanan Publik	Pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat (SKM) belum bisa di ukur tingkat keberhasilannya	RSO 2	Kepala Dinas	Belum dilakukan evaluasi internal atas hasil Survey Kepuasan Masyarad (SKM)	Internal	C	Peningkatan kualitas pelayanan belum optimal	OPD, masyarakat	4	4	16	Evaluasi Survey Kepuasan Masyarak (SKM) sudah dilakukan secara mandiri di OPD	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Tata Kerja Pemerintahan Yang Baik	Pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat (SKM) belum bisa di ukur tingkat	RSO 2	Kepala Dinas	Belum dilakukan evaluasi internal atas hasil Survey Kepuasan Masyarad (SKM)	Internal	C	Peningkatan kualitas pelayanan belum	OPD, masyarakat	4	4	16	Melakukan evaluasi atas hasil SKM sudah	4,00	16,00	64,00
						Belum tersedia kelemahan yang harus diperbaiki data perencanan tahun mendatang	Internal	C							Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pelayanan Publik						Kompetensi SDM yang belum memadai	Internal	C						Menyusun Drjen terkait izin akses			

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO		
			Risiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko					Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena								Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
			Pengadaan atas Barang Milik Daerah (BMD) belum optimal	RSO 3	Kepala Dinas	Inventarisasi BMD belum dilaksana sehingga letak/ posisi BMD tidak diketahui secara cepat	Internal	C	BMD berpotensi hilang (tidak termanfaatkan)	OPD	4	4	16	Melaksana Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)		Pengadaan atas Barang Milik Daerah (BMD) belum optimal	RSO 3	Kepala Dinas	Inventarisasi BMD belum dilaksana sehingga letak/ posisi BMD tidak diketahui secara	Internal	C	BMD berpotensi hilang (tidak termanfaatkan	OPD	4	4	16	Melaksana Inventarisasi, kodefikasi		4,00	16,00	64,00
						KIR belum diperbarui	Internal	C												KIR belum diperbarui	Internal	C						Program jemput bola ke sekolah, Klinik, RSIA, dan pelayanan mobil keliling			
						Kode-Kasi belum terpasang pada semua BMD	Internal	C												Kodefikasi belum terpasang pada semua BMD	Internal	C									
			Identifikasi masalah dan peluang belum dilakukan sehingga perencanaan belum fokus pada pencapaian tujuan/sasaran	RSO 1	Sekretaris/ Kabid	Daftar inventarisir Masalah (DIM) belum disusun	Internal	C	Masalah prioritas dan bukan penanganan segera dan urgen tidak berhasil teratasikan	OPD	4	4	16			Identifikasi masalah dan peluang belum dilakukan sehingga perencanaan belum fokus pada	RSO 1	Sekretaris/ Kabid	Daftar inventarisir Masalah (DIM) belum disusun	Internal	C	Masalah prioritas dan bukan penanganan segera	OPD	4	4	16	Menyusun Daftar inventarisir / Masalah (DIM) dan	Melaksanakan pelayanan KTA-si secara optimal	4,00	16,00	64,00
						Perencanaan danggap rutinitas, tidak semua tidak teknokratik dan enan ada melakukana perubahan	Internal	C												Perencanaan danggap rutinitas, tidak semua tidak teknokratik dan enan ada	Internal	C									
						Evaluasi belum dilakukan atau data evaluasi belum dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan.	Internal	C												Evaluasi belum dilakukan yaitu data evaluasi belum dimanfaatkan dalam perbaikan	Internal	C									
						Perencanaan belum berbasis risiko	Internal	C												Perencanaan belum berbasis risiko	Internal	C									
			Perencanaan sering telah dan tidak menyajikan metode kerja yang baru dan lebih efektif	RSO 6	Sekretaris/ Kabid	Tidak dilakukan revisi berjenjang	Internal	C	Perencanaan belum optimal dalam pemanfaatan	OPD	4	4	16			Perencanaan sering telah dan tidak menyajikan metode kerja yang baru dan lebih efektif	RSO 6	Sekretaris/ Kabid	Tidak dilakukan revisi berjenjang	Internal	C	Perencanaan belum optimal dalam	OPD	4	4	16	Melakukan revisi secara berjenjang dan		4,00	16,00	64,00
						Hasil study banding tidak efektif dijadikan bahan perbaikan perencanaan	Internal	C												Hasil study banding tidak efektif dijadikan bahan perbaikan perencanaan	Internal	C									
						Perencanaan danggap rutinitas, tidak semua tidak teknokratik dan enan ada melakukana perubahan	Internal	C												Perencanaan danggap rutinitas, tidak semua tidak teknokratik dan enan ada	Internal	C									
			Evaluasi atas hasil perencanaan belum dilakukan sehingga aspek pengauran atas keberhasilan dan perbaikan atas perencanaan belum terwujud	RSO 7	Sekretaris/ Kabid	Kualitas rekomendasi hasil evaluasi terpaksa oleh Bappeda, Inspektorat belum efektif memperbaiki perencanaan	Eksternal	UC	Perencanaan belum dipandang sebagai proses yang tanpa henentus dan butuh perbaikan secara berkelanjutan.	OPD	Minimnya partisipasi dan transparansi data dalam	RS05	4			Evaluasi atas hasil perencanaan belum dilakukan sehingga aspek pengauran atas keberhasilan	RSO 7	Sekretaris/ Kabid	Kualitas rekomendasi hasil evaluasi terpaksa oleh Bappeda, Inspektorat belum	Eksternal	UC	Perencanaan belum dipandang sebagai	OPD	4	4	16	Memenuhi seluruh rekomendasi aparat		4,00	11,40	45,60
						Rekomendasi belum ditindaklanjuti secara optimal	Internal	C												Rekomendasi belum ditindaklanjuti secara optimal	Internal	C									
						Kompetensi SDM yang belum memadai	Internal	C												Kompetensi SDM yang belum memadai	Internal	C									
			Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang belum dilakukan secara optimal	RSO 14	Sekretaris/ Kabid	Evaluasi hanya dilakukan hanya secara tian	Internal	C	Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan belum bisa diukur	OPD	Operasional SIAK belum berjalan optimal	RS012	4			Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang belum dilakukan secara optimal	RSO 14	Sekretaris/ Kabid	Evaluasi hanya dilakukan hanya secara tian	Internal	C	Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan	OPD	4	4	16	Mendokumentasikan laporan hasil evaluasi		4,00	9,00	36,00
						Laporan hasil evaluasi belum terdokumentasikan dengan ba	Internal	C												Laporan hasil evaluasi belum terdokumentasikan dengan ba	Internal	C									
			Pertanggung jawaban keuangan (SPj) menjadi temuan aparat pengawasan	RSO 15	Sekretaris/ Kabid	Kelebihan pembayaran	Internal	C	Tingkat akuntabilitas keuangan rendah	OPD	Penyusunan Rencana Profit Perkembangan Keuangan	RS013	4			Pertanggung jawaban keuangan (SPj) menjadi temuan aparat pengawasan	RSO 15	Sekretaris/ Kabid	Kelebihan pembayaran	Internal	C	Tingkat akuntabilitas keuangan rendah	OPD	4	4	16	Meningkatkan kompetensi pegawai dan		4,00	6,60	26,40
						Pengadaan tidak sesuai kontrak	Internal	C												Pengadaan tidak sesuai kontrak	Internal	C									
						Administrasi kurang lengkap	Internal	C												Administrasi kurang lengkap	Internal	C									
			Masih rendahnya inovasi yang dilakukan OPD	RSO1	Kepala Bidang	Tidak ada kewajiban di tingkat yang lebih tinggi untuk melakukan inovasi	eksternal	6	Belum maksimalnya							Masih rendahnya inovasi yang dilakukan OPD	RSO1	Kabid	Tidak ada kewajiban di tingkat yang lebih tinggi untuk melakukan inovasi	eksternal	6	Belum maksimalnya									
			Masih rendahnya Inovasi yang dilakukan oleh OPD	RSO1	Kepala Bidang	Tidak adanya kewajiban di tingkat yang lebih tinggi untuk melakukan inovasi	Eksternal	C	Belum maksimalnya pelayanan kepada masyarakat	Kepala Bidang dan Kepala OPD	4	4	16	Sosialisasi RANPERDA tentang Inovasi Daerah		Masih rendahnya Inovasi yang dilakukan oleh OPD	RSO1	Kabid	Tidak adanya kewajiban di tingkat yang lebih tinggi untuk melakukan inovasi	Eksternal	C	Belum maksimalnya pelayanan kepada masyarakat	Kepala Bidang dan Kepala OPD	4	4	16	Sosialisasi RANPERDA tentang Inovasi Daerah		4,00	4,17	16,67
						Belum efektifnya Pelaksanaan Kegiatan	Internal	C	Masih rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat					Memberikan pembinaan kepada OPD tentang Pentingnya Inovasi sesuai tugas OPD						Belum efektifnya Pelaksanaan Kegiatan	Internal	C	Masih rendahnya kualitas pelayanan kepada masyarakat					Memberikan pembinaan kepada OPD tentang Pentingnya Inovasi sesuai tugas OPD				
			Inovasi belum dilaksana secara berkelanjutan	RSO2	Kepala Bidang	Hanya mengandalkan pada pelayan yang bertugas saat itu	Eksternal	C	Inovasi belum bisa meningkatkan Kinerja	OPD dan Masyarakat	4	5	20	1. Sosialisasi RANPERDA tentang inovasi Daerah		Inovasi belum dilaksana secara berkelanjutan	RSO2	Kabid	Hanya mengandalkan pada pelayan yang bertugas saat itu	Eksternal	C	Inovasi belum bisa meningkatkan Kinerja	OPD dan Masyarakat	4	5	20	1. Sosialisasi RANPERDA tentang Inovasi Daerah		4,29	4,14	17,76

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI: Risiko			Sebab			Dampak					Rencana Tindak Pengendalian	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SETELAH EVALUASI: Risiko			Sebab			Dampak					Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
						Inovasi belum menjadi Kebijakan OPD dan belum diinstalisasikan pada seluruh Pegawai	Internal	C												Inovasi belum menjadi Kebijakan OPD dan belum diinstalisasikan pada seluruh Pegawai	Internal	C									
			Inovasi yang dilakukan OPD belum memenuhi standar kelitbangan	RSO3	Kepala Balitbang	Standar Kelitbangan Belum dijadikan dokumen sebagai acuan dalam bekerja	Eksternal	UC	Kegagalan dalam peningkatan Kinerja	Masyarakat	4	4	16	1. Menyusun RANPERDA tentang Inovasi Daerah 2. Membuat SK Tim Koordinasi Percepatan Inovasi Pemerintahan di Daerah	1,63	1,5	Inovasi yang dilakukan OPD belum memenuhi standar kelitbangan	RSO3	Kaban	Standar Kelitbangan belum dijadikan dokumen sebagai acuan dalam bekerja	Eksternal	UC	Kegagalan dalam peningkatan Kinerja	Masyarakat	4	4	16	1. Menyusun RANPERDA tentang Inovasi Daerah 2. Membuat SK Tim Koordinasi Percepatan Inovasi Pemerintahan di Daerah	4,33	4,00	17,33
						Kompetensi SDM yang belum memadai	Internal	C												Kompetensi SDM yang belum memadai	Internal	C									
			Belum ditindaklanjuti hasil kajian yang telah dilakukan oleh OPD	RSO7	Kabid	Hasil kajian masih tersimpan sebagai dokumen belum diterapkan	Eksternal	C	Terjadinya pemborosan keuangan Daerah	Masyarakat	4	4	16	1. Komitmen Kepala Daerah 2. Menyusun Pakta Integritas 3. Melakukan Kajian Terapan dalam penerapan Inovasi antara lain : pelaksanaan inovasi daerah dan evaluasi hasil penerapan inovasi daerah			Belum ditindaklanjuti hasil kajian yang telah dilakukan oleh OPD	RSO7	Kabid	Hasil kajian masih tersimpan sebagai dokumen belum diterapkan	Eksternal	C	Terjadinya pemborosan keuangan Daerah	Masyarakat	4	4	16	1. Komitmen Kepala Daerah 2. Menyusun Pakta Integritas 3. Melakukan Kajian Terapan dalam penerapan Inovasi antara lain : pelaksanaan inovasi daerah dan	4,40	4,00	17,00
						Rekomendasi belum didukung dengan alokasi anggaran	Eksternal	C												Rekomendasi belum didukung dengan alokasi anggaran	Eksternal	C									
						Hasil Kajian tidak di aplikasikan oleh OPD Pengguna	Internal	C												Hasil Kajian tidak di implementasikan oleh OPD Pengguna	Internal	C									
			Keterlibatan stake holder bidang pengembangan pariwisata belum maksimal	RO01	Kabid	Keterlibatan stake holder menjadi rendah	Eksternal	UC	Kajian belum termanfaatkan dengan baik	OPD dan Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan intensitas komunikasi antara Tim Ahli dengan stake holder 2. Personil yang ditatus OPD memiliki kompetensi kajian			Keterlibatan stake holder bidang pengembangan pariwisata belum maksimal	RO01	Kabid	Keterlibatan stake holder menjadi rendah	Eksternal	UC	Kajian belum termanfaatkan dengan baik	OPD dan Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan intensitas komunikasi antara Tim Ahli dengan stake holder 2. Personil yang ditatus OPD memiliki kompetensi kajian	4,50	4,00	18,00
						Kurangnya kesadaran Stake Holder untuk terlibat dalam Pengembangan Kepariwisataan	Eksternal	UC												Kurangnya kesadaran Stake Holder untuk terlibat dalam Pengembangan Kepariwisataan	Eksternal	UC									
1	Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi																													
			OPD belum maksimal dalam pengembangan pariwisata Kota Solok dalam pemberian informasi dan data	RO02	Kabid	Kajian menjadi kurang menjawab kebutuhan	Eksternal	C	Kajian tidak kekinian	OPD dan Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan intensitas komunikasi antara Tim Ahli dengan stake holder 2. Personil yang ditatus OPD memiliki kompetensi kajian			OPD belum maksimal dalam pengembangan pariwisata Kota Solok dalam pemberian informasi dan data	RO02	Kabid	Kajian menjadi kurang menjawab kebutuhan	Eksternal	C	Kajian tidak kekinian	OPD dan Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan intensitas komunikasi antara Tim Ahli dengan stake holder 2. Personil yang ditatus OPD memiliki kompetensi kajian	4,50	4,00	18,00
			Utusan OPD yang diundang dalam pembahasan pengkajian dan penelitian selalu berganti-ganti sehingga informasi tidak berkelanjutan	RO03	Kabid	Informasi yang diberikan tidak konsisten	Eksternal	C	Kajian kadang tidak tepat sasaran	OPD dan Masyarakat	5	4	20	1. Meningkatkan intensitas komunikasi antara Tim Ahli dengan stake holder 2. Personil yang ditatus OPD memiliki kompetensi kajian			Utusan OPD yang diundang dalam pembahasan pengkajian dan penelitian selalu berganti-ganti sehingga informasi tidak berkelanjutan	RO03	Kabid	Informasi yang diberikan tidak konsisten	Eksternal	C	Kajian kadang tidak tepat sasaran	OPD dan Masyarakat	5	4	20	1. Meningkatkan intensitas komunikasi antara Tim Ahli dengan stake holder 2. Personil yang ditatus OPD memiliki kompetensi kajian	4,67	4,00	18,67
			Hasil Kajian tidak segera ditindaklanjuti	RO04	Kabid	Kajian hanya menjadi dokumen	Eksternal	UC	Kajian tidak termanfaatkan	OPD dan Masyarakat	5	4	20	1. Komitmen Kepala Daerah 2. Menyusun Pakta Integritas			Hasil Kajian tidak segera ditindaklanjuti	RO04	Kabid	Kajian hanya menjadi dokumen	Eksternal	UC	Kajian tidak termanfaatkan	OPD dan Masyarakat	5	4	20	1. Komitmen Kepala Daerah 2. Menyusun Pakta Integritas	4,33	4,00	17,33
		Indeks profesionalitas ASN	Pencapaian IP ASN Kota Solok masih rendah sehingga target kinerja OPD dan Walikota belum tercapai	RSP1	Walikota	Persepsi peringkatan kompetensi masih dengan metode klasikal	Internal dan eksternal	UC	Kualitas pelayanan ke masyarakat rendah	Walikota, Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan 2. Memberikan insentif bagi pegawai 3. Meningkatkan pelaksanaan webinar, pelatihan kantor sendiri (PKS) di semua OPD	Tujuan: Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Pencapaian IP ASN Kota Solok masih rendah sehingga target kinerja OPD dan Walikota belum tercapai	RSP1	Walikota	Persepsi peringkatan kompetensi masih dengan metode klasikal	Internal dan eksternal	UC	Kualitas pelayanan ke masyarakat rendah	Walikota, Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan 2. Menerapkan mekanisme reward dan punishment 3. Meningkatkan pelaksanaan	4,00	4,00	16,00
						Penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	Internal	C	Belum optimalnya kinerja pegawai sesuai tupoksi						Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	Indeks Profesionalitas ASN				Penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	Internal	C									
						Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai belum disusun sesuai standar dan kebutuhan	Internal	C	Pengembangan kompetensi ASN menjadi tidak tepat sasaran											Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai belum disusun sesuai standar dan kebutuhan	Internal	C									
						Pelaporan dan penilaian IP ASN belum terlaksana secara berjenjang dimulai dari individu pegawai, unit kerja (OPD) sampai pada tingkat instansi	eksternal	UC	Terlambatnya rekapan pelaporan IP ASN Kota Solok ke BKN											Pelaporan dan penilaian IP ASN belum terlaksana secara berjenjang dimulai dari individu pegawai, unit kerja (OPD) sampai pada	eksternal	UC									
			Penerapan Sistem Merit pada indikator pengembangan karir dan indikator promosi dan mutasi belum optimal sehingga pengembangan karir dan penempatan pegawai belum sesuai	RSP3	Walikota	Belum adanya kebijakan promosi, mutasi secara objektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan Talent Pool	eksternal	UC	Tingkat profesionalitas ASN rendah	Walikota, Masyarakat	4	4	16	Menyusun Perwako tentang kebijakan pengembangan karier yang berbasis manajemen talenta	Tujuan: Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Penerapan Sistem Merit pada indikator pengembangan karir dan indikator promosi dan mutasi belum optimal sehingga pengembangan karir dan	RSP3	Walikota	Belum adanya kebijakan promosi, mutasi secara objektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja	eksternal	UC	Tingkat profesionalitas ASN rendah	Walikota, Masyarakat	4	4	16	Menyusun Perwako tentang kebijakan pengembangan karier yang berbasis manajemen talenta dan menetapkan mekanisme reward dan punishment	4,00	4,00	16,00
						Belum adanya kebijakan pengembangan karier yang berbasis manajemen talenta			Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai kompetensi (the right man on the place)						Sasaran Strategis					Belum adanya kebijakan pengembangan karier yang berbasis manajemen talenta	Internal	C									
															Meningkatnya pengelolaan penempatan ASN sesuai standar	Persentase Penempatan Aparatur sesuai kompetensi dan syarat jabatan				Belum menerapkan mekanisme reward dan punishment	Internal	C									
			Masih rendahnya capaian nilai IP ASN pada dimensi kompetensi	RSO1	Kaban	Rencana pengembangan kompetensi pegawai belum terimplementasi dengan optimal	Internal	C	Peningkatan pengetahuan kemampuan, keterampilan dan kepribadian profesional ASN masih rendah	ASN dan Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan anggaran Diklat 2. Mempedomani Renbangkom dalam perencanaan keg diklat 3. Mendorong pelaksanaan Bangkom Non Klasikal	Meningkatnya Manajemen Kinerja aparatur	Persentase pegawai berkinerja baik (>80)	Masih rendahnya capaian nilai IP ASN pada dimensi kompetensi	RSO1	Kaban	Rencana pengembangan kompetensi pegawai belum terimplementasi dengan optimal	Internal	C	Rendahnya kinerja pegawai	ASN dan Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan anggaran Diklat (dinaikkan) 2. Mempedomani Renbangkom dalam perencanaan keg diklat 3. Mendorong pelaksanaan	4,00	4,00	16,00
						Minimnya pelaksanaan pengembangan kompetensi secara non klasikal (webinar, pelatihan mandiri, coaching dan mentoring)	Internal	C							Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat				Minimnya pelaksanaan pengembangan kompetensi secara non klasikal (webinar, pelatihan mandiri, coaching dan mentoring)	Internal	C									
			Pengembangan Kompetensi ASN belum tepat sasaran	RSO3	Kaban	Peta pengembangan kompetensi belum disusun	Internal	C	Peningkatan pengetahuan kemampuan, keterampilan dan kepribadian profesional ASN masih rendah	ASN dan Masyarakat	4	4	16	1. Menyusun Peta Kompetensi 2. Menyusun standar kompetensi pada semua jabatan	Program		Pengembangan Kompetensi ASN belum tepat sasaran	RSO3	Kaban	Peta pengembangan kompetensi belum disusun	Internal	C	Rendahnya kinerja pegawai	ASN dan Masyarakat	4	4	16	1. Menyusun Peta Kompetensi 2. Menyusun standar kompetensi pada semua jabatan	4,00	4,00	16,00
						Belum optimalnya hasil analisa kebutuhan diklat	Internal	C							Penunjang Urusan Pemda	Cakupan pemenuhan kebutuhan kantor				Belum optimalnya hasil analisa kebutuhan diklat	Internal	C									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI – Risiko – Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI – Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko – Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO – Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
						Belum semua jabatan memiliki standar kompetensi	Internal	C							Kepegawaian Daerah	Cakupan pelkepeg melalui aplikasi				Belum semua jabatan memiliki standar kompetensi	Internal	C									
			Pertanggungjawaban kegiatan menjadi temuan aparat pengawasan	ROO5	Kabid PPA	Kelebihan pembayaran	Internal	C	Tingkat akuntabilitas menjadi rendah	ASN	4	4	16	1. Melakukan pembinaan terkait pertanggung jawaban keuangan 2. Menerapkan sanksi yang sesuai		Ketersediaan SIM Penilaian kinerja	Pertanggungjawaban kegiatan menjadi temuan aparat pengawasan	ROO5	Kabid PPA	Kelebihan pembayaran	Internal	C	Tingkat akuntabilitas menjadi rendah	ASN	4	4	16	1. Meningkatkan kompetensi SDM 2. Menerapkan mekanisme reward dan punishment	4,00	4.00	16,00
						Pengadaan tidak sesuai kontrak	Internal	C								% Keterisian jabatan				Pengadaan tidak sesuai kontrak	Internal	C									
						Administrasi tidak lengkap	Internal	C								% Pelanggaran displin				Administrasi tidak lengkap	Internal	C									
			Evaluasi kegiatan belum dilakukan	ROO6	Kabid PPA	Evaluasi baru dilakukan secara lisan dan tidak terdokumentasi	Internal	C	Keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja tidak bisa diukur	ASN	4	4	16	1. Melakukan pembinaan terkait peningkatan implementasi SAKIP 2. Menerapkan sanksi yang sesuai		% Pel kepeg tepat waktu	Evaluasi kegiatan belum dilakukan	ROO6	Kabid PPA	Evaluasi baru dilakukan secara lisan dan tidak terdokumentasi	Internal	C	Keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja tidak bisa diukur	ASN	4	4	16	1. Melakukan pembinaan terkait peningkatan implementasi SAKIP 2. Menerapkan mekanisme reward dan punishment	4,00	4,00	16,00
						Kompetensi SDM yang belum memadai	Internal	C								% Spesifikasi pendidikan sesuai spesifikasi jabatan				Kompetensi SDM yang belum memadai	Internal	C									
						Tidak mempedomani aturan atau SOP yang sudah dibuat	Internal	C							Pengembangan SDM	% Pengembangan kompetensi pegawai				Tidak mempedomani aturan atau SOP yang sudah dibuat	Internal	C									
			Pengembangan kompetensi hanya dianggap sebagai diklat yang dilakukan secara klasikal	ROO9	Kabid MPA	Persepsi bahwa pengembangan kompetensi butuh anggaran yang besar	Internal	C	Peningkatan keahlian profesional ASN belum terwujud	ASN dan Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan anggaran Diklat 2. Mempedomani Renbangkom dalam perencanaan keg diklat 3. Mendorong pelaksanaan Bangkom Non Klasikal			Pengembangan kompetensi hanya dianggap sebagai diklat yang dilakukan secara klasikal	ROO9	Kabid MPA	Persepsi bahwa pengembangan kompetensi butuh anggaran yang besar	Internal	C	Peningkatan pengetahuan dan keahlian ASN belum terwujud	ASN dan Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan anggaran Diklat (dtiangkan) 2. Mempedomani Renbangkom dalam perencanaan keg diklat 3. Mendorong pelaksanaan	4,00	4.00	16,00
						Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan kompetensi	Internal	C												Kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam pengembangan kompetensi	Internal	C									
						Kecendrungan diklat secara klasikal bisa menambah penghasilan pegawai	Internal	C												Kecendrungan diklat secara klasikal bisa menambah penghasilan pegawai	Internal	C									
			Minimnya upaya pengembangan kompetensi melalui jalur non klasikal	ROO10	Kabid MPA	Belum terbiasanya pelaksanaan pelatihan secara mandiri	Internal	C	Peningkatan keahlian profesional ASN belum terwujud		4	4	16	1. Meningkatkan anggaran Diklat 2. Mempedomani Renbangkom dalam perencanaan keg diklat 3. Mendorong pelaksanaan Bangkom Non Klasikal			Minimnya upaya pengembangan kompetensi melalui jalur non klasikal (bahasa penyebab)	ROO10	Kabid MPA	Belum terbiasanya pelaksanaan pelatihan secara mandiri	Internal	C	Peningkatan pengetahuan dan keahlian ASN belum terwujud		4	4	16	1. Meningkatkan anggaran Diklat (dtiangkan) 2. Mempedomani Renbangkom dalam perencanaan keg diklat 3. Mendorong pelaksanaan	4,00	4.00	16,00
						Kecendrungan diklat secara non klasikal tidak menambah penghasilan pegawai	Internal	C												Kecendrungan diklat secara non klasikal tidak menambah penghasilan pegawai	Internal	C									
			Aparatur yang ditugaskan mengikuti Diklat belum efektif dalam peningkatan keahlian ASN	ROO11	Kabid MPA	Belum adanya kebijakan yang mengharuskan pegawai yang telah mengikuti diklat melakukan transfer ilmu ke pegawai lain	Internal	C	Peningkatan keahlian profesional ASN belum terwujud	ASN dan Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan anggaran Diklat 2. Mempedomani Renbangkom dalam perencanaan keg diklat 3. Menyusun Perwako Tentang Bangkom			Aparatur yang ditugaskan mengikuti Diklat belum efektif dalam peningkatan keahlian ASN	ROO11	Kabid MPA	Belum adanya kebijakan yang mengharuskan pegawai yang telah mengikuti diklat melakukan transfer ilmu ke pegawai lain	Internal	C	Peningkatan pengetahuan dan keahlian ASN belum terwujud	ASN dan Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan anggaran Diklat (dtiangkan) 2. Mempedomani Renbangkom dalam perencanaan keg diklat 3. Mendorong pelaksanaan	4,00	4,00	16,00
						Peserta diklat kurang serius dalam mengikuti diklat	Internal	C												Peserta diklat kurang serius dalam mengikuti diklat	Internal	C									
						Usulan nama peserta dan pemilihan jenis diklat belum mempedomani rencana pengembangan kompetensi individu dan organisasi.	Internal	C												Usulan nama peserta dan pemilihan jenis diklat belum mempedomani rencana pengembangan kompetensi individu dan organisasi.	Internal	C									
			Pertanggungjawaban kegiatan menjadi temuan aparat pengawasan	ROO13	Kabid MPA	Kelebihan pembayaran	Internal	C	Tingkat akuntabilitas menjadi rendah	ASN	4	4	16	1. Melakukan pembinaan terkait pertanggung jawaban keuangan 2. Menerapkan sanksi yang sesuai			Pertanggungjawaban kegiatan menjadi temuan aparat pengawasan (risiko ini sudah ada di ROO5)	ROO13	Kabid MPA	Kelebihan pembayaran	Internal	C	Tingkat akuntabilitas menjadi rendah	ASN	4	4	16	1. Melakukan pembinaan terkait pertanggung jawaban keuangan 2. Menerapkan sanksi yang sesuai	4,00	4,00	16,00
						Administrasi tidak lengkap	Internal	C												Administrasi tidak lengkap	Internal	C									
b	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Terjadinya pencairan SP2D yang tidak sesuai dengan nilai fisik yang dibelanjakan	RSO8	Walikota, Kaban	Lemahnya pengendalian terhadap kesesuaian nilai belanja barang/jasa dengan harga perolehan	Internal	C			2	3	6	Dilakukannya pengendalian terhadap kesesuaian harga dan nilai barang/jasa yang diperoleh																	
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EKPPD)	Dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak dapat menjadi acuan	RSO7	Walikota, Kaban	Proses penyusunan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Internal	C	Visi dan misi Walikota tidak tercapai	Walikota, Masyarakat	5	4	20	Menyusun pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tingkat kota dan perangkat daerah																	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlambatnya penyusunan RKPD		Kepala BKD									Pembekalan perencana di Bappeda dan perangkat daerah terkait perencanaan pembangunan di tingkat kota dan perangkat daerah	Tujuan : Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan BMD yang Tertib, Transparan dan Akuntabel	- Hasil Pengukuran IPKD nilai A															
															Sasaran : Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai aturan yang berlaku	Kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan aturan yang berlaku	Tidak sesuainya dokumen perencanaan dengan penganggaran	RSO 1	Kepala BKD	tidak sesuainya nilai pagu perencanaan dengan penganggaran	Eksternal, Internal	UCP	Penganggaran Keuangan Daerah tidak tertib dan akuntabel	Kepala BKD Kepala Bappeda	4	4	16		4,00	3,50	14,00
																				tidak sesuainya nomenklatur program perencanaan dengan penganggaran	Eksternal, Internal	UCP		Kepala BKD Kepala Bappeda							
																				Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mengakomodir pagu perencanaan	Internal	C		Kepala BKD							

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI												Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI															RATA-RATA NILAI RISIKO		
			Risiko			Sebab				Dampak									Risiko			Sebab				Dampak							
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko			Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
																	Pengalokasian Belanja dalam APBD	Rendahnya capaian indeks pengelolaan belanja dalam APBD	RISO.2	Kepala BKD	Pengalokasian belanja tidak memenuhi mandatory spending	Internal	C	tidak terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam	Kepala BKD, OPD urusan wajib pelayanan dasar	4	3	12		4,00	4,00	16,00
																					keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mengakomodir semua belanja karena besarnya	Internal	C									
																					Petunjuk teknis pengalokasian belanja dalam APBD	Internal	C									
																	Transparansi pengelolaan keuangan daerah	Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah yang rendah	RISO.3	Kepala BKD dan Kepala Kominfo	Informasi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dibuka dan diakses oleh masyarakat/publik	Internal	C	Pengelolaan Keuangan yang tidak transparan	Kepala BKD dan publik	4	5	20		4,00	4,67	18,67
																					terlambatnya update data informasi pengelolaan keuangan daerah pada website pemda kota solok	Internal	C									
																	Penyerapan Anggaran	Rendahnya indeks penyerapan anggaran	RISO.4	Kepala BKD	Petunjuk teknis pengalokasian struktur anggaran belanja dalam APBD	Internal	C	Penundaan/peng unangan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat	Kepala BKD, OPD sekota Solok	4	4	16		4,00	4,33	17,33
																					serapan belanja Anggaran belanja operasional, Anggaran belanja modal, Anggaran belanja tidak terdiga dan	Eksternal, Internal	UCAP									
																					Keterbatasan waktu dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai struktur belanja dalam APBD	Eksternal, Internal	UCAP									
																	Kondisi Keuangan Daerah	Rendahnya Indeks Kondisi Keuangan Daerah	RISO.5	Kepala BKD	kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah dan PAD sangat rendah, hal ini karena pengalokasi	Internal / eksternal	CAUP	ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dana transfer pusat	Kepala BKD, Masyarakat	4	5	20		4,00	4,00	16,00
																					aset yang dimiliki belum mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang serta	Internal / eksternal	CAUP									
																	Opini BPK atas pemeriksaan LKPD	Turunnya opini BPK atas pemeriksaan LKPD	RISO.6	Kepala BKD	penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan SAP	Internal / eksternal	UC	Pengelolaan keuangan daerah tidak tertib dan akuntabel	Kepala BKD, Kepala Bappeda dan inspektorat	4	4	16		4,00	3,67	14,67
																					Rendahnya sistem pengendalian intern atas pengelolaan keuangan daerah											
																		Kejadian kalah proses pelaksanaan dan penilaian IPKD	RISO.7	Kepala BKD	Kerusakan sistem/petangkat/jaringan pada aplikasi IPKD	Eksternal	UC	Rendahnya penilaian kinerja atas IKU BKD	Kepala BKD	4	3	12		4,00	3,67	14,67
																					Keterbatasan kemampuan SDM pengguna dan pengelola aplikasi IPKD	Eksternal	UC									
																					tidak dinilainya indikator pada dimensi IPKD	Eksternal	UC									
																		Keterlambatan penerbitan standar satuan harga, kurang lengkapnya standar satuan harga sehingga tidak mengakomodir seluruh		Kabid Aset	Terlambatnya data / usulan dari OPD	Eksternal	UC	Tidak tersedianya pedoman penyusunan RKA	Kepala BKD	4	4	16		4,00	4,00	16,00
																					Tim Penyusun SSH tidak melakukan survey harga pasar	Internal	C	Anggaran tidak bisa direalisasikan karena tidak sesuai standar	Kepala BKD							
																Sasaran : Pengelolaan BMD sesuai aturan yang berlaku	Kesesuaian pengelolaan BMD dengan aturan yang berlaku	Tidak sesuaiknya jumlah pelaporan BMD dengan fisik BMD	RISO.8	Kepala BKD	belum dilaksanakannya inventarisasi BMD	Internal	C	Pengelolaan BMD tidak tertib dan akuntabel sehingga tidak mendapatkan	Kepala BKD	4	4	16		4,00	4,00	16,00
																					Tidak melaporkan atau mencatat BMD yang hilang	Internal	C									
																		belum diadakannya standar barang milik daerah dan dokumen standar kebutuhan barang milik daerah	R08.2	Kabid Aset	belum adanya acuan untuk penyusunan standar barang milik daerah dan dokumen standar kebutuhan	Eksternal	UC	Pengadaan BMD di OPD tidak sesuai standar barang milik daerah dan	Kepala BKD	4	4	16		4,00	4,00	16,00
																Sasaran : Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kesesuaian pengelolaan pendapatan daerah dengan aturan yang	Rendahnya capaian realisasi PAD	RISO.9	Kepala BKD	kurang optimal dalam penggalian potensi sumber- sumber PAD	Internal	C	kemandirian keuangan daerah rendah karena daerah tidak sepenuhnya	Kepala BKD	4	4	16		4,50	3,50	15,75
																					kurang optimal dalam pemungutan PAD	Internal	C									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI – Risiko: Uraian	Risiko: Kode Risiko	Pemilik	Sebab: Uraian	Sebab: Sumber	C/UC	Dampak: Uraian	Dampak: Pihak yang terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP												
		Indeks SPBE	Implementasi SPBE oleh OPD belum terarah dan terintegrasi	RSP1	Walikota	Perwako turunan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang SPBE masih belum ada	Internal	C	Inefisiensi penyelenggaraan SPBE dan integrasi layanan SPBE susah dicapai	Pemda	5	3	15	Mengusulkan Peraturan Walikota turunan Perda dan/atau Surat Edaran Walikota
														Surat Edaran Walikota tentang koordinasi penyelenggaraan SPBE
														Kerjasama Pemanfaatan Sumber Daya SPBE Nasional berbagi pakai (Pusat Data Nasional)
														Pengadaan ASN oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian
			Pemanfaatan Layanan elektronik OPD tidak berlanjut	RSO1	Kepala Dinas	Belum tersedianya regulasi/kebijakan terkait layanan elektronik yang diselenggarakan oleh OPD	eksternal	UC	Layanan elektronik tidak berjalan secara efektif dan efisien	OPD Penyelenggara Layanan SPBE	5	3	15	Fasilitasi pelatihan ulang pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun di OPD Pemilik Aplikasi
						Perubahan kebutuhan layanan elektronik OPD seiring waktu	eksternal	UC						Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi / Aplikasi serta Dokumentasi Perubahannya
						Adanya aturan dari pusat khususnya peralihan ke pemanfaatan aplikasi umum dari pusat di daerah	eksternal	UC						Penyediaan kebijakan pemanfaatan aplikasi oleh OPD penyelenggara layanan elektronik
			Terganggunya Layanan SPBE	RSO2	Kepala Dinas	Sarana dan prasarana terbatas	internal	C	Layanan elektronik terhenti	OPD Penyelenggara Layanan SPBE	5	3	15	Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pusat Data Nasional saat down (ada masalah) melalui Zoom Meeting / online
						SDM Penyelenggara Layanan SPBE terbatas	internal	C						Penyampaian informasi layanan helpdesk Diskominfo via WA
						Adanya gangguan layanan eksternal (akses internet dan pasokan daya listrik)	eksternal	UC						
			Layanan SPBE masih belum optimal	RSO1	Kepala Dinas	Berakhirnya kebijakan pemanfaatan data atau sumber daya berbagi pakai oleh pemilik data/ sumber daya	eksternal	UC						
			Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kota Solok tidak sesuai SOP PPID yang telah ditetapkan Walikota	RSO3	Kepala Dinas	SDM Pengelola layanan informasi dan dokumentasi publik OPD belum sepenuhnya memahami SOP dan aturan terkait PPID yang berlaku	internal	C	Tidak terpenuhinya hak masyarakat atas informasi dan dokumentasi publik dan tuntutan hukum (sengketa informasi)	Instansi Pemda, Pengguna informasi dan dokumentasi	4	4	16	Pengusulan Ulang Penandatanganan Pakta Integritas Kepala OPD dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik
						Kurangnya sarana dan prasarana layanan informasi dan dokumentasi publik OPD	internal	C						Sosialisasi PPID
						Kurang tersedianya informasi dan dokumentasi publik oleh OPD sesuai standar	internal	C						Rehab kantor berupa penyediaan front office PPID
			Jaringan Komputer LAN/WAN terputus dan lambat	ROO 2	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Gangguan/ kerusakan perangkat jaringan	internal	C	Layanan elektronik tidak dapat diakses	Instansi Pemda	5	5	25	Backup data konfigurasi dan monitoring jaringan secara berkala
						Gangguan pasokan dan jaringan listrik PLN	Eksternal	UC						Upgrade peralatan jaringan
						Gangguan ketersediaan akses internet dari ISP (penyedia)	Eksternal	UC						
						Bencana alam berupa badai/ petir/ banjir/ gempa bumi	Eksternal	UC						
			Pencurian dan pengrusakan infrastruktur TIK	ROO 4	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Kurangnya sarana pengamanan infrastruktur	internal	C	Kerugian material dan layanan elektronik tidak dapat diakses	Instansi Pemda	5	4	20	Peralatan outdoor dengan box pengamanan dipasang di posisi di luar jangkauan / tinggi
						Belum adanya jaminan asuransi atas barang TIK terutama aset strategis seperti Server, penyimpan data	internal	C						Meningkatkan keamanan ruang server sesuai standar keamanan

SETELAH EVALUASI – Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko: Uraian	Risiko: Kode Risiko	Pemilik	Sebab: Uraian	Sebab: Sumber	C/UC	Dampak: Uraian	Dampak: Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO: Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
					Belum terlaksananya digitalisasi PAD	Internal	C									
					Belum optimal dalam menerapkan sanksi atas pelanggaran pajak	Internal	C									
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks SPBE	Implementasi SPBE oleh OPD belum terarah dan terintegrasi	RSP1	Walikota	Perwako turunan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang SPBE masih belum ada	Internal	C	Target smartcity lambat tercapai	Pemda dan masyarakat	5	3	15	1. Mengusulkan Perwako turunan Perda dan/atau Surat Edaran Walikota 2. Meningkatkan monitoring dan pembinaan kepada OPD	5,00	3,00	15,00
					Belum efektifnya monitoring dan pembinaan oleh DISKOMINFO	Internal	C									
		Pemanfaatan Layanan elektronik OPD tidak berlanjut	RSO1	Kepala Dinas	Belum tersedianya regulasi/kebijakan terkait layanan elektronik yang diselenggarakan oleh OPD	Internal	C	Layanan elektronik tidak berjalan secara efektif dan efisien	OPD Penyelenggara Layanan SPBE	5	3	15	Fasilitasi Pelatihan ulang pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun di OPD Pemilik Aplikasi	5,00	3,00	15,00
					Perubahan kebutuhan layanan elektronik OPD seiring waktu	eksternal	UC						Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi / Aplikasi serta Dokumentasi Perubahannya			
					Adanya aturan dari pusat khususnya peralihan ke pemanfaatan aplikasi umum dari pusat di daerah	eksternal	UC						Penyediaan kebijakan pemanfaatan aplikasi oleh OPD penyelenggara layanan elektronik			
		Terganggunya Layanan SPBE	RSO2	Kepala Dinas	Sarana dan prasarana terbatas	Internal	C	Layanan elektronik terhenti	Seluruh OPD dan masyarakat	5	3	15	Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pusat Data Nasional saat down (ada masalah) melalui Zoom Meeting / online	4,50	3,50	15,75
					SDM Penyelenggara Layanan SPBE terbatas	Internal	C						Penyampaian informasi layanan helpdesk Diskominfo via WA			
					Adanya gangguan layanan eksternal (akses internet dan pasokan daya listrik)	eksternal	UC									
		Layanan SPBE masih belum optimal	RSO1	Kepala Dinas	Berakhirnya kebijakan pemanfaatan data atau sumber daya berbagi pakai oleh pemilik data/ sumber daya	Eksternal	UC									
		Pelayanan informasi dan Dokumentasi Publik Kota Solok tidak sesuai SOP PPID yang telah ditetapkan Walikota	RSO3	Kepala Dinas	SDM Pengelola layanan informasi dan dokumentasi publik OPD belum sepenuhnya memahami SOP dan aturan terkait PPID	Internal	C	Tidak terpenuhinya hak masyarakat atas informasi dan dokumentasi publik dan tuntutan hukum	Instansi Pemda, Pengguna informasi dan dokumentasi publik	4	4	16	Pengusulan Ulang Penandatanganan Pakta Integritas Kepala OPD dalam implementasi keterbukaan Informasi Publik	4,50	4,00	18,00
					Kurangnya sarana dan prasarana layanan informasi dan dokumentasi publik OPD	Internal	C						Sosialisasi PPID			
					Kurang tersedianya informasi dan dokumentasi publik oleh OPD sesuai standar	Eksternal	UC						Rehab kantor berupa penyediaan front office PPID			
		Jaringan Komputer LAN/WAN terputus dan lambat	ROO 2	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Gangguan/ kerusakan perangkat jaringan	Internal	C	Layanan elektronik tidak dapat diakses	Pemda dan masyarakat	5	4	20	Backup data konfigurasi dan monitoring jaringan secara berkala	5,00	4,00	20,00
					Gangguan pasokan dan jaringan listrik PLN	Eksternal	UC						Upgrade peralatan jaringan			
					Gangguan ketersediaan akses internet dari ISP (penyedia)	Eksternal	UC						Usulan pengadaan genset/ UPS			
					Bencana alam berupa badai/ petir/ banjir/ gempa bumi	Eksternal	UC									
		Pencurian dan pengrusakan infrastruktur TIK	ROO 4	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Kurangnya sarana pengamanan infrastruktur	Internal	C	Kerugian materiel dan layanan elektronik tidak dapat diakses	Pemda dan masyarakat	5	4	20	Peralatan outdoor dengan box pengamanan dipasang di posisi di luar jangkauan / tinggi	5,00	3,50	17,50
					Belum adanya jaminan asuransi atas barang TIK terutama aset strategis seperti Server, penyimpan data	Internal	C						Meningkatkan keamanan ruang server sesuai standar keamanan			
					Kurangnya kesadaran masyarakat turut serta menjaga fasilitas umum	Eksternal	UC									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI — Risiko: Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab: Uraian	Sumber	C/UC	Dampak: Uraian	Pihak yang terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI — Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko: Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Sebab: Uraian	Sumber	C/UC	Dampak: Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO — Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
						Kurangnya kesadaran masyarakat turut serta menjaga fasilitas umum	Eksternal	UC									Pertanggungjawaban kegiatan menjadi temuan pada hasil pemeriksaan aparat pengawasan	ROO 5	PPTK	Kelebihan Pembayaran	Internal	C	maladministrasi dan/atau kerugian daerah	PPTK, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	5	3	15	Koordinasi PPK-SKPD dengan PPTK terkait hasil perbaikan SPJ	5,00	3,00	15,00
			Pertanggungjawaban kegiatan menjadi temuan pada hasil pemeriksaan aparat pengawasan	ROO 5	PPTK	Kelebihan Pembayaran	Internal	C	maladministrasi dan/atau kerugian daerah	PPTK, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	5	3	15	Koordinasi PPK-SKPD dengan PPTK terkait hasil perbaikan SPJ						Pengadaan tidak sesuai dengan kontrak	Internal	C						Menerbitkan surat perintah Kepala Dinas kepada PPTK untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku			
						Pengadaan tidak sesuai dengan kontrak	Internal	C						Menerbitkan surat perintah Kepala Dinas kepada PPTK untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku						Administrasi tidak lengkap	Internal	C						Meningkatkan kompetensi SDM			
						Administrasi tidak lengkap	Internal	C									Pembobolan aplikasi e-government oleh hacker yang menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses dan/ atau pengrusakan/ pencurian data	ROO 8	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Kurangnya sarana pengamanan layanan elektronik yang sesuai standard keamanan TIK	Internal	C	Kebocoran data dan informasi	Pemda dan masyarakat	5	3	15	Sosialisasi pengamanan informasi	4,50	3,50	15,75
			Pembobolan aplikasi e-government oleh hacker yang menyebabkan aplikasi tidak dapat diakses dan/ atau pengrusakan/ pencurian data	ROO 8	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Kurangnya sarana pengamanan layanan elektronik yang sesuai standard keamanan TIK	Internal	C	Kebocoran data dan informasi	Instansi Pemda	5	3	15	Sosialisasi pengamanan informasi						Belum adanya Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Internal	C						Pembahasan teknis pengamanan sistem informasi/ aplikasi pendukung SPBE			
						Belum adanya Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Internal	C						Pembahasan teknis pengamanan sistem informasi/ aplikasi pendukung SPBE						Kurangnya kompetensi SDM terkait pengamanan layanan elektronik	Internal	C						Meningkatkan kompetensi SDM			
						Kurangnya kompetensi SDM terkait pengamanan layanan elektronik	Internal	C									Penyampaian Konten Berita / Dokumen Informasi Publik dari OPD sumber belum sesuai jadwal / belum lengkap / belum tertata dengan baik	ROO 12	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Kurang diberdayakannya kontributor OPD/ admin PPID yang sudah ditunjuk di masing-masing OPD	Eksternal	UC	Tidak terpenuhinya Hak Masyarakat untuk Tahu dalam rangka Pemantauan dan	Masyarakat	4	4	16	Fasilitasi / in service training bagi admin OPD yang terkendala update dokumen	4,50	3,50	15,75
			Penyampaian Konten Berita / Dokumen Informasi Publik dari OPD sumber belum sesuai jadwal / belum lengkap / belum tertata dengan baik	ROO 12	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Kurang diberdayakannya kontributor OPD/ admin PPID yang sudah ditunjuk di masing-masing OPD	Eksternal	UC	Tidak terpenuhinya Hak Masyarakat untuk Tahu dalam rangka Pemantauan dan ikut serta dalam pembangunan daerah	Masyarakat	4	4	16	Fasilitasi / in service training bagi admin OPD yang terkendala update dokumen						Informasi dan Dokumentasi Publik belum terhimpun oleh admin OPD dan proses penginputan belum sesuai pengelompokan	Eksternal	UC						Menerapkan mekanisme reward dan punishment			
						Informasi dan Dokumentasi Publik belum terhimpun oleh admin OPD dan proses penginputan belum sesuai pengelompokan	Eksternal	UC												Paradigma yang belum tepat dari beberapa pimpinan OPD terkait kerahasiaan informasi dan dokumentasi publik sehingga terjadi	Eksternal	UC						Meningkatkan monitoring dan evaluasi PPID			
						Paradigma yang belum tepat dari beberapa pimpinan OPD terkait kerahasiaan informasi dan dokumentasi publik sehingga terjadi penolakan/ resistensi dalam penyediaan beberapa	Eksternal	UC												Monitoring dan Evaluasi PPID yang dilakukan kurang tepat sasaran	Internal	C									
						Monitoring dan Evaluasi PPID yang dilakukan Kurang tepat sasaran	Internal	C												Mekanisme reward dan punishment belum diterapkan	Internal	C									
			Timbulnya tuntutan dari masyarakat terkait pemenuhan hak mereka tentang informasi dan dokumentasi publik (sengketa informasi)	ROO 13	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	1. Tidak terpenuhinya hak atas informasi publik yang diminta tanpa adanya penjelasan yang sesuai dengan aturan	Internal	C	Tuntutan Hukum	Instansi Pemda	5	3	15	Penyediaan pamflet dari Diskominfo sebagai bentuk sosialisasi oleh Pejabat dan Admin PPID di masing-masing OPD kepada seluruh jajaran karyawan, terutama front office			Timbulnya tuntutan dari masyarakat terkait pemenuhan hak mereka tentang informasi dan dokumentasi publik (sengketa informasi)	ROO 13	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	1. Tidak terpenuhinya hak atas informasi publik yang diminta tanpa adanya penjelasan yang sesuai dengan aturan	Internal	C	Tuntutan Hukum	Pemda dan masyarakat	5	3	15	Penyediaan pamflet dari Diskominfo sebagai bentuk sosialisasi oleh Pejabat dan Admin PPID di masing-masing OPD kepada seluruh jajaran karyawan, terutama front office	4,50	3,50	15,75
						2. Keterlambatan dalam memenuhi permintaan yang berdampak pada kerugian bagi masyarakat	Internal	C												2. Keterlambatan dalam memenuhi permintaan yang berdampak pada kerugian bagi masyarakat	Internal	C						Meningkatkan kompetensi SDM			
						3. Layanan yang masih kurang optimal dan memuaskan (belum sesuai SOP Pelayanan)	Internal	C												3. Layanan yang masih kurang optimal dan memuaskan (belum sesuai SOP Pelayanan)	Internal	C									
			Pengelolaan layanan persampahan belum terlaksana secara optimal	RSO1	Camat	Luasnya wilayah yang harus dilayani	Internal	C	Terjadi penumpukan sampah di komplek-komplek/ perumahan yang dapat mengganggu kesehatan lingkungan	Masyarakat	4	4	16	1. Perlu adanya Petunjuk Teknis pelaksanaan pengelolaan layanan persampahan 2. Penambahan jumlah petugas dan bentor pengangkut sampah	Tujuan: Meningkatkan pelayanan publik kewilayahan	Persentase organisasi/lembaga pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	Pengelolaan layanan persampahan belum terlaksana secara optimal	RSO1	Camat	Luasnya wilayah yang harus dilayani	Internal	C	Terjadi penumpukan sampah di komplek-komplek/ perumahan yang	Masyarakat	4	4	16	1. Perlu adanya Petunjuk Teknis pelaksanaan pengelolaan layanan persampahan 2. Penambahan jumlah petugas dan bentor pengangkut sampah	4,00	4,00	16,00
						Jumlah petugas yang terbatas	Internal	C												Jumlah petugas yang terbatas	Internal	C									
																				SOP dan Jadwal kerja belum disusun	Internal	C									
			Belum adanya petunjuk teknis pengelolaan dana kelurahan	RSO2	Camat	OPD yang berwenang belum menyusun petunjuk teknis	Eksternal	UC	Tidak tepat sasaran dan efisien, serta penyerapan anggaran rendah	Masyarakat	4	4	16	Mengintensifkan koordinasi dengan OPD terkait untuk percepatan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dana kelurahan			Belum adanya petunjuk teknis pengelolaan dana kelurahan	RSO2	Camat	OPD yang berwenang (Bappeda dan Kecamatan) belum menyusun petunjuk teknis	Eksternal	UC	Penggunaan anggaran belum tepat sasaran dan efisien, serta penyerapan	OPD dan Masyarakat	4	4	16	Mengintensifkan koordinasi dengan OPD terkait untuk percepatan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dana kelurahan	4,00	4,00	16,00
						Diantara OPD perencana dan keuangan belum ada kepastian dan kesamaan pemahaman kebijakan	Eksternal	UC		Persentase Realisasi Anggaran					Sasaran: Peningkatan pemberdayaan masyarakat					Diantara OPD perencana dan keuangan belum ada kepastian dan kesamaan pemahaman kebijakan	Eksternal	UC		Persentase Realisasi Anggaran							
						Proses penyusunan perwako butuh harmonisasi dengan kemenkumham, sehingga membutuhkan waktu yang lama	Eksternal	UC		Persentase Realisasi Anggaran										Proses penyusunan perwako butuh harmonisasi dengan kemenkumham, sehingga membutuhkan waktu yang lama	Eksternal	UC		Persentase Realisasi Anggaran							
			Masih rendahnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	RSO6	Camat	Kompetensi SDM yang belum memadai	Internal	C	Pencapaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan belum sesuai target		4	4	3	Mengoptimalkan bimbingan dan arahan kepada pegawai			Masih rendahnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	RSO6	Camat	Kompetensi SDM yang belum memadai	Internal	C	Pencapaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan belum sesuai target		4	4	16	1. Meningkatkan kompetensi pegawai 2. Menerapkan mekanisme reward dan punishment	4,00	4,00	16,00
						Aspirasi dan tuntutan camat atau lurah sering diabaikan oleh OPD terkait	Eksternal	UC												Aspirasi dan tuntutan camat atau lurah sering diabaikan oleh OPD terkait	Eksternal	UC									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI – Risiko – Uraian	Risiko – Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sebab – Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Dampak – Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI – Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko – Uraian	Risiko – Kode Risiko	Pemilik	Sebab – Uraian	Sebab – Sumber	C/UC	Dampak – Uraian	Dampak – Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA NILAI RISIKO – Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
						Belum adanya reward untuk pegawai di kelurahan yang sudah berkinerja baik	Eksternal	C												Belum adanya reward untuk pegawai di kelurahan yang sudah berkinerja baik	Eksternal	C									
						masih minimnya sarana dan prasarana pelayanan yang ada di kelurahan	Internal	C												masih minimnya sarana dan prasarana pelayanan yang ada di kelurahan	Internal	C									
			Usulan belanja barang belum diakomodir dalam SSH	ROO 8	BKD Bidang Aset	Barang yang dibeli bersifat khusus/ spesifik	Eksternal	UC	Kesulitan mendapatkan barang yang sesuai secara detail dengan yang tertera pada SSH	PPTK	4	4	3	Melakukan koordinasi dengan bagian SSH dan mengoptimalkan survey barang			Usulan belanja barang belum diakomodir dalam SSH	ROO 8	Camat, Lurah	Barang yang dibeli bersifat khusus/ spesifik	Eksternal	UC	Kesulitan mendapatkan barang yang sesuai secara detail dengan yang tertera	OPD	4	4	16	Melakukan koordinasi dengan bagian SSH dan mengoptimalkan survey barang	4,00	4,00	16,00
						SSH terlalu mengatur secara detail														SSH terlalu mengatur secara detail											
			DPA Dana Kelurahan yang telah disusun tidak optimal	ROO9	Camat, Lurah	Waktu yang diberikan sedikit	Eksternal	UC	Kegiatan tidak efektif dan efisien	PPTK, Masyarakat	4	4	16	Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan BKD beserta lurah			DPA Dana Kelurahan yang telah disusun tidak optimal	ROO9	Camat, Lurah	Waktu yang diberikan sedikit	Eksternal	UC	Kegiatan tidak efektif dan efisien	OPD dan Masyarakat	4	4	16	Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan BKD beserta lurah.	4,00	4,00	16,00
						Petunjuk dan tahapan tidak jelas	Eksternal	UC												Petunjuk dan tahapan tidak jelas	Eksternal	UC									
						Tidak adanya pembahasan RKA	Eksternal	UC												Tidak adanya pembahasan RKA	Eksternal	UC									
						Pembekalan untuk operator penyusunan RKA tidak ada	Eksternal	UC												Pembekalan untuk operator penyusunan RKA tidak ada	Eksternal	UC									
			Masih terjadinya intervensi dalam pelayanan administrasi di kelurahan dan kecamatan	ROO 13	Lurah/Kasi	Penerbitan surat yang di luar kewenangan lurah dan camat (surat keterangan lainnya)	0	C	Penyalahgunaan wewenang oleh masyarakat	OPD, Masyarakat	4	4	16	Melakukan koordinasi dengan pimpinan terhadap oknum yang melakukan intervensi			Masih terjadinya intervensi dalam pelayanan administrasi di Kelurahan dan Kecamatan	ROO 13	Lurah/Kasi	Penerbitan surat yang di luar kewenangan Lurah dan Camat (surat keterangan lainnya)	Internal	C	Penyalahgunaan izin oleh masyarakat	OPD, Masyarakat	4	4	16	1. Meningkatkan sosialisasi tentang pelayanan administrasi di Kelurahan dan Kecamatan kepada masyarakat 2. Meningkatkan kompetensi pegawai	4,00	4,00	16,00
						Masyarakat tidak mengikuti prosedur, melainkan langsung meminta rekomendasi pimpinan daerah	Eksternal	UC												Masyarakat tidak mengikuti prosedur, melainkan langsung meminta rekomendasi pimpinan daerah	Eksternal	UC									
						Persyaratan yang tidak bisa dilengkapi	Eksternal	UC												Persyaratan yang tidak bisa dilengkapi	Eksternal	UC									
						Kecenderungan masyarakat yang harus dimotivasi dulu secara materi untuk mengikuti sebuah acara atau kegiatan	Eksternal	C												Kecenderungan masyarakat yang harus dimotivasi dulu secara materi untuk mengikuti sebuah acara atau kegiatan	Eksternal	C									
			Pertanggungjawaban kegiatan menjadi objek pemeriksaan aparat pengawasan	ROO 18	PPTK	Kelebihan Pembayaran	Internal	C	Sering terjadinya salah paham antara PPTK dan PPK dalam penyajian SPJ kegiatan dan kelengkapannya	PPTK, PPK	4	4	16	1. Melakukan pembinaan terkait pertanggung jawaban keuangan 2. Menerapkan sanksi yang sesuai			Pertanggungjawaban kegiatan menjadi objek pemeriksaan aparat pengawasan	ROO 18	PPTK	Kelebihan Pembayaran	Internal	C	Tingkat akuntabilitas keuangan menjadi rendah	OPD	4	4	16	1. Meningkatkan kompetensi pegawai 2. Menerapkan mekanisme reward dan punishment	4,00	4,00	16,00
						Pengadaan tidak sesuai dengan kontrak	Internal	C												Pengadaan tidak sesuai dengan kontrak	Internal	C									
						Administrasi tidak lengkap	Internal	C												Administrasi tidak lengkap	Internal	C									
															Sasaran: Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Persentase organisasi/lembaga pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	Layanan pengambilan sampah belum berimbang dengan jumlah sampah rumah tangga dan cakupan luas wilayah kecamatan	RSO1	Camat Lurah Sikarah	Jumlah bentor sampah dan sarana prasarana pengangkutan sampah masih terbatas	Internal	C	Terjadi penumpukan sampah yang berdampak pada kesehatan lingkungan	Masyarakat	4	4	16		3,67	3,67	13,44
																				Jumlah petugas dan pengawasan kerja petugas	Internal	C									
																	Tidak terarahnya penggunaan dana kelurahan	RSO2	Camat	OPD yang berwenang belum menyusun petunjuk teknis Dana Kelurahan	Eksternal	UC	Tidak tepat sasaran dan efisien serta penyerapan anggaran rendah	Masyarakat	4	4	16		3,50	3,50	12,25
																				Diantara OPD perencana dan keuangan belum ada kepastian dan kesamaan pemahaman kebijakan	Eksternal	UC									
																	Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan Dana Kelurahan masih rendah	RSO3	Camat	Musrenbang bersifat rutinitas dan masih didominasi oleh perangkat kelurahan seperti RT/RW, LPMK, PKK dan Bundo	Eksternal	C	Belum meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Masyarakat	3	3	9		3,67	3,67	13,44
																				Masyarakat jadi apatis karena banyaknya usulan yang diberikan tidak terakomodir dan penjelasan tidak terakomodir belum	Internal	C									
																				Belum adanya pemilahan peserta undangan rapat Musrenbang berdasarkan keterwakilan bidang yang dibahas	Internal	C									
																				Paradigma di masyarakat yang masih mengukur partisipasi dengan adanya bantuan transportasi	Eksternal	C									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	SEBELUM EVALUASI											Rencana Tindak Pengendalian	SETELAH EVALUASI													Rencana Tindak Pengendalian	RATA-RATA N LAI RISIKO		
			Risiko			Sebab			Dampak								Risiko			Sebab			Dampak								
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko		Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
																	Beberapa kegiatan yang diusulkan dalam muarenbang belum merupakan prioritas sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat	RSO4	Cemat	Masyarakat belum memahami prioritas pembangunan Kota yang harus diserasikan dengan kebutuhan kelurahan	Eksternal	UC	Usulan program dan kegiatan hasil muarenbang tidak sesuai dengan rencana strategis	Masyarakat	4	4	16		4,00	4,00	16,00
																	Masih rendahnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan	RSO5	Cemat	Kompetensi SDM yang belum memadai	Internal	C	Tingkat kepuasan masyarakat rencah	Masyarakat	4	4	16		4,00	4,00	16,00
																				Aspirasi dan tuntutan cemat atau lurah sering diabaikan oleh OPD terkait	Eksternal	UC									
																				Belum adanya rewerp untuk pegawai yang sudah berkinerja baik	Eksternal	C									
																				Masih minimnya sarana dan prasarana pelayanan yang apa di kelurahan	Internal	C									

PENYUSUNAN PRIORITAS AREA PENGAWASAN
KELOMPOK PROGRAM RPJMD
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT/KOTA SOLOK

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	URAIAN SASARAN	NAMA OPD PENGAMPU (KOORDINATOR)	NAMA OPD PENGAMPU (PENDUKUNG)	LEVEL MR	PERSENTASE INHERENT RISK	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			PROGRAM TERMASUK SEKTOR UNGGULAN DAN MENDUKUNG RPJMN		TEMUAN DAN TL, POTENSI FRAUD, POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Pertimbangan Manajemen Lainnya						FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan
									Bobot: 25%			Bobot: 25%		Bobot: 20%		Bobot: 15%		Bobot: 10%		Bobot: 5%		Bobot: 100%						
							Nilai Risiko	Bobot	Anggaran	%	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	x-Thn Audit Terakhir	Bobot	Pengalaman APIP	Bobot	Permintaan KDH/Pihak berwenang lain	Bobot	Persentase Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	JUMLAH BOBOT RISIKO	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
I	PROGRAM-PROGRAM DI RPJMD																											
1	Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengalaman Ajaran Agama	Kesra/Setda		2	70%	15	3	6.809.926.120	3,14	2	3	5	0	1	4	5	1	1	3	4	0	0	30%	3	3	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali
2	Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal		Kesbangpol		2	70%	20	4	336.380.000	0,16	1	2	3	0	1	1	2	1	1	2	3	0	0	30%	1,75	3,325	Tinggi	1 tahun sekali
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Kesbangpol		2	70%	16	4	1.030.424.900	0,48	1	3	4	0	1	1	2	1	1	2	3	0	0	30%	2	3,4	Tinggi	1 tahun sekali
4	Program Koordinasi dan Pembinaan pencegahan bahaya narkoba dan miras		Kesbangpol		2	70%	16	4	68.860.000	0,03	1	3	5	0	1	2	3	1	1	2	3	0	0	30%	2,4	3,52	Tinggi	1 tahun sekali
5	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Kesbangpol		2	70%	16	4	5.500.000	0,00	1	2	3	0	1	0	1	1	1	2	3	0	0	30%	1,6	3,28	Tinggi	1 tahun sekali
6	Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal		Kesbangpol		2	70%	16	4	128.260.000	0,06	1	2	3	0	1	1	2	1	1	2	3	0	0	30%	1,75	3,325	Tinggi	1 tahun sekali
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Kesbangpol		2	70%	16	4	323.680.490	0,15	1	2	3	1	2	1	2	1	1	2	3	0	0	30%	1,95	3,385	Tinggi	1 tahun sekali
8	Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal		Kesbangpol		2	70%	16	4	519.100.980	0,24	1	2	3	0	1	1	2	1	1	2	3	0	0	30%	1,75	3,325	Tinggi	1 tahun sekali
9	Program Pengelolaan Pendidikan		Dinas Pendidikan		2	70%	16	4	34.263.903.975	15,81	5	3	5	3	4	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	4,3	4,09	Sangat Tinggi	1 Tahun sekali
10	Program Pengembangan Kurikulum		Dinas Pendidikan		2	70%	6	2	145.982.820	0,07	1	3	5	2	3	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,1	2,33	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali
11	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan		2	70%	12	3	9.750.000	0,00	1	3	5	3	4	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,3	3,09	Tinggi	1 tahun sekali
12	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Dinas Pol PP		2	70%	16	4	2.186.840.000	1,01	1	2	3	2	3	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,6	3,58	Tinggi	1 tahun sekali
13	Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Penalaman nilai-nilai adat dan budaya	Pariwisata		2	70%	16	4	-	0,00	1	3	5	2	3	3	4	1	1	2	3	0	0	30%	2,95	3,685	Tinggi	1 tahun sekali
14	Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	Berkembangnya Ekonomi Kerakyatan Berbasis potensi Unggulan Daerah	DPKUKM		2	70%	20	4	2.586.133.733	1,19	1	3	5	3	4	3	4	1	1	2	3	0	0	30%	3,15	3,745	Tinggi	1 tahun sekali
15	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha MIKRO (UMKM)		DPKUKM		2	70%	16	4	376.650.000	0,17	1	3	5	2	3	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,1	3,73	Tinggi	1 tahun sekali
16	Pengembangan UMKM		DPKUKM		2	70%	12	3	437.575.000	0,20	1	3	5	3	4	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,3	3,09	Tinggi	1 tahun sekali
17	Perencanaan dan Pembangunan Industri		DPKUKM		2	70%	12	3	560.036.650	0,26	1	3	5	3	4	3	4	1	1	2	3	0	0	30%	3,15	3,045	Tinggi	1 tahun sekali
18	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Dinas Pertanian		2	70%	16	4	652.699.500	0,30	1	3	4	2	3	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,85	3,655	Tinggi	1 tahun sekali
19	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Dinas Pertanian		2	70%	16	4	623.700.000	0,29	1	3	4	2	3	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,85	3,655	Tinggi	1 tahun sekali
20	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Dinas Pertanian		2	70%	9	2	180.872.800	0,07	1	2	3	1	2	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,4	2,12	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali
21	Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Dinas Pariwisata		2	70%	16	4	772.265.200	0,36	1	3	4	1	2	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,65	3,595	Tinggi	1 tahun sekali
22	Pemasaran Pariwisata		Dinas Pariwisata		2	70%	16	4	561.892.000	0,26	1	3	4	2	3	2	3	1	1	2	3	0	0	30%	2,55	3,565	Tinggi	1 tahun sekali
23	Pengelolaan Perikanan Budidaya		Dinas Pertanian		2	70%	16	4	257.940.000	0,12	1	2	3	0	1	2	3	1	1	2	3	0	0	30%	1,9	3,37	Tinggi	1 tahun sekali
24	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Dinas Pariwisata		2	70%	20	4	216.275.000	0,10	1	3	4	0	1	3	4	1	1	2	3	0	0	30%	2,3	3,49	Tinggi	1 tahun sekali

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	URAIAN SASARAN	NAMA OPD PENGAMPU (KOORDINATOR)	NAMA OPD PENGAMPU (PENDUKUNG)	LEVEL MR	PERSENTASE INHERENT RISK	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			PROGRAM TERMASUK SEKTOR UNGGULAN DAN MENDUKUNG RPJMN		TEMUAN DAN TL, POTENSI FRAUD, POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Pertimbangan Manajemen Lainnya						FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan
									Bobot: 25%			Bobot: 25%		Bobot: 20%		Bobot: 15%		Bobot: 10%		Bobot: 5%		Bobot: 100%						
							Nilai Risiko	Bobot	Anggaran	%	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	x-Thn Audit Terakhir	Bobot	Pengalaman APIP	Bobot	Permintaan KDH/Pihak berwenang lain	Bobot	Persentase Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	JUMLAH BOBOT RISIKO	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
25	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Nilai Investasi	DPMPTSP		2	70%	16	4	20.086.500	0,01	1	3	4	0	1	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,45	3,535	Tinggi	1 tahun sekali
26	Promosi Penanaman Modal		DPMPTSP		2	70%	16	4	11.315.000	0,01	1	3	4	1	2	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,65	3,595	Tinggi	1 tahun sekali
27	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja	DPMPTSP		2	70%	16	4	514.400.000	0,24	1	3	4	1	2	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,65	3,595	Tinggi	1 tahun sekali
28	Penempatan Tenaga Kerja		DPMPTSP		2	70%	20	4	1.850.000	0,00	1	3	4	2	3	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,85	3,655	Tinggi	1 tahun sekali
29	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan		2	70%	20	4	49.407.433.773	22,79	5	3	5	2	3	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	4,1	4,03	Sangat Tinggi	1 Tahun sekali
30	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		Dinas Kesehatan		2	70%	16	4	29.225.000	0,01	1	3	5	2	3	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,1	3,73	Tinggi	1 tahun sekali
31	Program sediaan Farmasi, alat kesehatan danmakanan minuman		Dinas Kesehatan		2	70%	12	3	389.570.800	0,18	1	3	5	2	3	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,1	3,03	Tinggi	1 tahun sekali
32	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		Dinas Kesehatan		2	70%	16	4	170.647.400	0,08	1	3	5	2	3	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,1	3,73	Tinggi	1 tahun sekali
33	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan		Dispora		2	70%	16	4	2.526.660.200	1,17	1	2	5	2	3	3	4	1	1	2	3	0	0	30%	2,95	3,685	Tinggi	1 tahun sekali
34	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan		Dispora		2	70%	16	4	341.550.000	0,16	1	2	3	2	3	3	4	1	1	2	3	0	0	30%	2,45	3,535	Tinggi	1 tahun sekali
35	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepramukaan		Dispora		2	70%	16	4	500.000.000	0,23	1	2	3	3	4	3	4	1	1	2	3	0	0	30%	2,65	3,595	Tinggi	1 tahun sekali
36	Program Pengendalian Penduduk		Dinas Dalduk & KB		2	70%	20	4	117.429.900	0,05	1	2	3	1	2	3	4	1	1	2	3	0	0	30%	2,25	3,475	Tinggi	1 tahun sekali
37	Program Pembinaan Keluarga Berencana		Dinas Dalduk & KB		2	70%	9	2	1.213.850.100	0,56	1	2	3	1	2	3	4	1	1	2	3	0	0	30%	2,25	2,075	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali
38	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera		Dinas Dalduk & KB		2	70%	20	4	1.337.352.800	0,62	1	2	3	0	1	3	4	1	1	2	3	0	0	30%	2,05	3,415	Tinggi	1 tahun sekali
39	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Dinas Pendidikan		2	70%	12	3	34.263.903.975	15,81	5	2	5	2	3	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	4,1	3,33	Tinggi	1 tahun sekali
40	Program Pengembangan Kurikulum		Dinas Pendidikan		2	70%	9	2	146.982.820	0,07	1	2	5	2	3	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,1	2,33	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali
41	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan		2	70%	0	1	9.750.000	0,00	1	2	5	3	4	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,3	1,69	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali
42	Program Pembinaan Perpustakaan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	70%	16	4	10.582.630.600	4,88	2	2	3	3	4	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,05	3,715	Tinggi	1 tahun sekali
43	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	70%	12	3	23.220.000	0,01	1	3	4	2	3	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,85	2,955	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali
44	Program Pengelolaa Arsip		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	70%	16	4	93.593.500	0,04	1	2	3	0	1	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,2	3,46	Tinggi	1 tahun sekali
45	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Dinas Sosial		2	70%	9	2	111.430.000	0,05	1	2	3	1	2	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,4	2,12	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali
46	Program Rehabilitasi Sosial		Dinas Sosial		2	70%	20	4	286.187.600	0,13	1	2	3	1	2	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,4	3,52	Tinggi	1 tahun sekali
47	program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Dinas Sosial		2	70%	16	4	418.509.900	0,19	1	2	3	1	2	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,4	3,52	Tinggi	1 tahun sekali
48	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan		Dinas Sosial		2	70%	16	4	-	0,00	1	0	3	0	1	1	2	1	1	2	3	0	0	30%	1,75	3,325	Tinggi	1 tahun sekali
49	Program Penanganan Bencana		Dinas Sosial		2	70%	16	4	92.435.500	0,04	1	2	3	0	1	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,2	3,46	Tinggi	1 tahun sekali
50	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Dinas Sosial		2	70%	20	4	20.528.200	0,01	1	2	3	0	1	2	3	1	1	2	3	0	0	30%	1,9	3,37	Tinggi	1 tahun sekali
51	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS)		Dinas Dalduk dan KB		2	70%	20	4	1.337.352.800	0,62	1	2	3	0	1	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,2	3,46	Tinggi	1 tahun sekali
52	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan		Dinas Pemuda dan Olahraga		2	70%	4	1	341.550.000	0,16	1	3	5	1	2	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,9	1,57	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali
53	Program Perlindungan Perempuan		DPPPA		2	70%	9	2	247.979.500	0,11	1	3	4	0	1	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,45	2,135	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali
54	Program Perlindungan Khusus Anak		DPPPA		2	70%	9	2	280.067.000	0,13	1	2	3	0	1	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,2	2,06	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali
55	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	DPMPPA		2	70%	20	4	714.948.600	0,33	1	2	3	0	1	2	3	1	1	2	3	0	0	30%	1,9	3,37	Tinggi	1 tahun sekali

NO	AREA PENGAWASAN (AUDITABLE UNIT)	URAIAN SASARAN	NAMA OPD PENGAMPU (KOORDINATOR)	NAMA OPD PENGAMPU (PENDUKUNG)	LEVEL MR	PERSENTASE INHERENT RISK	RISIKO INHEREN		ANGGARAN			PROGRAM TERMASUK SEKTOR UNGGULAN DAN MENDUKUNG RPJMN		TEMUAN DAN TL, POTENSI FRAUD, POTENSI KASUS HUKUM		ISU TERKINI		Pertimbangan Manajemen Lainnya						FAKTOR RISIKO		TOTAL		Frekuensi Pengawasan
									Bobot: 25%			Bobot: 25%		Bobot: 20%		Bobot: 15%		Bobot: 10%		Bobot: 5%		Bobot: 100%						
							Nilai Risiko	Bobot	Anggaran	%	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	x-Thn Audit Terakhir	Bobot	Pengalaman APIP	Bobot	Permintaan KDH/Pihak berwenang lain	Bobot	Persentase Faktor Risiko	Nilai Faktor Risiko	JUMLAH BOBOT RISIKO	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
56	Program Peningkatan kualitas keluarga		DPMPPA		2	70%	9	2	5.100.000	0,00	1	2	3	0	1	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,2	2,06	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali
57	Program Pengelolaan sistem data gender dan anak		DPMPPA		2	70%	20	4	390.000	0,00	1	2	3	0	1	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,2	3,46	Tinggi	1 tahun sekali
58	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		DPMPPA		2	70%	20	4	174.975.000	0,08	1	2	3	0	1	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,2	3,46	Tinggi	1 tahun sekali
59	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat		DPMPPA		2	70%	9	2	1.681.603.500	0,78	1	3	5	0	1	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,7	2,21	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali
60	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR		2	70%	16	4	625.937.000	0,29	1	2	5	2	3	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,1	3,73	Tinggi	1 tahun sekali
61	Program Pembinaan dan pengawasn terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Dinas LH		2	70%	0	1	2.275.000	0,00	1	2	3	2	3	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,6	1,48	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali
62	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)		Dinas LH		2	70%	4	1	3.677.735.000	1,70	1	2	3	3	4	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,8	1,54	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali
63	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar	Dinas PUPR		2	70%	20	4	12.688.473.925	5,85	3	2	5	3	4	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,8	3,94	Tinggi	1 tahun sekali
64	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh		Dinas Perkim		2	70%	20	4	260.605.000	0,12	1	3	4	3	4	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,05	3,715	Tinggi	1 tahun sekali
65	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Dinas PUPR		2	70%	16	4	5.361.136.950	2,48	2	3	5	3	4	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,55	3,865	Tinggi	1 tahun sekali
66	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Dinas PUPR		2	70%	16	4	319.093.000	0,15	1	3	4	3	4	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,05	3,715	Tinggi	1 tahun sekali
67	Program pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah		Dinas PUPR		2	70%	16	4	820.360.000	0,38	1	2	3	3	4	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,8	3,64	Tinggi	1 tahun sekali
68	Program peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)		Dinas Perkim		2	70%	16	4	10.233.790.503	4,72	2	3	4	3	4	3	4	1	1	2	3	0	0	30%	3,15	3,745	Tinggi	1 tahun sekali
69	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Dinas Dukcapil		2	70%	16	4	166.675.000	0,08	1	3	5	3	4	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	3,3	3,79	Tinggi	1 tahun sekali
70	Program Pencatatan Sipil		Dinas Dukcapil		2	70%	16	4	36.635.300	0,02	1	2	3	3	4	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,8	3,64	Tinggi	1 tahun sekali
71	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Dinas Dukcapil		2	70%	15	3	12.030.000	0,01	1	2	3	0	1	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,2	2,76	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali
72	Program pengelolaan profil kependudukan		Dinas Dukcapil		2	70%	0	1	-	0,00	1	0	3	0	1	1	2	1	1	2	3	0	0	30%	1,75	1,225	Rendah	4 s.d 5 tahun sekali
73	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	BKPSDM		2	70%	16	4	138.770.000	0,06	1	2	3	0	1	2	3	1	1	2	3	0	0	30%	1,9	3,37	Tinggi	1 tahun sekali
74	Program Kepegawaian Daerah		BKPSDM		2	70%	16	4	786.579.000	0,36	1	2	3	0	1	2	3	1	1	2	3	0	0	30%	1,9	3,37	Tinggi	1 tahun sekali
75	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah		BAPPEDA		2	70%	16	4	409.856.410	0,19	1	2	3	1	2	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,4	3,52	Tinggi	1 tahun sekali
76	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		BAPPEDA		2	70%	12	3	1.030.227.100	0,48	1	2	3	0	1	4	5	1	1	2	3	0	0	30%	2,2	2,76	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali
77	Program pengelolaan keuangan daerah		BKD		2	70%	20	4	7.968.040.616	3,68	2	2	3	0	1	2	3	1	1	3	4	0	0	30%	2,2	3,46	Tinggi	1 tahun sekali
78	Program pengelolaan barang milik daerah		BKD		2	70%	12	3	2.499.600.505	1,15	1	2	5	1	2	2	3	1	1	3	4	0	0	30%	2,65	2,895	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali
79	Program pengelolaan pendapatan daerah		BKD		2	70%	20	4	498.651.979	0,23	1	2	3	2	3	3	4	1	1	3	4	0	0	30%	2,5	3,55	Tinggi	1 tahun sekali
80	Program penyelenggaraan pengawasan		Inspektorat		2	70%	16	4	483.750.000	0,22	1	2	3	1	2	2	3	1	1	2	3	0	0	30%	2,1	3,43	Tinggi	1 tahun sekali
81	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi		Inspektorat		2	70%	16	4	233.888.000	0,11	1	2	3	0	1	1	2	1	1	2	3	0	0	30%	1,75	3,325	Tinggi	1 tahun sekali
82	Penataan Organisasi		Organisasi/Setda		2	70%	15	3	106.897.300	0,05	1	2	3	0	1	2	3	1	1	3	4	0	0	30%	1,95	2,685	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali
83	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Kesra		2	70%	16	4	7.291.652.160	3,36	2	2	3	0	1	4	5	1	1	3	4	0	0	30%	2,5	3,55	Tinggi	1 tahun sekali
84	Program Perekonomian dan Pembangunan		Setda/Perekonomian		2	70%	15	3	655.679.292	0,30	1	2	3	0	1	3	4	1	1	3	4	0	0	30%	2,1	2,73	Sedang	2 s.d 3 tahun sekali

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: ISU TERKINI
PEMERINTAH KOTA SOLOK

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				Nilai	Bobot
			Sorotan Masyarakat	Isu Nasional	Layanan Publik	Hajat Hidup Orang Banyak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kesra/Setda	1	1	1	1	4	5
2	Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak	Kesbangpol	1	0	0	0	1	2
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol	1	0	0	0	1	2
4	Program Koordinasi dan Pembinaan pencegahan bahaya narkoba dan miras	Kesbangpol	1	1	0	0	2	3
5	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol	0	0	0	0	0	1
6	Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Kesbangpol	1	0	0	0	1	2
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol	1	0	0	0	1	2
8	Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Kesbangpol	1	0	0	0	1	2
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	1	1	1	1	4	5
10	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan	1	1	1	1	4	5
11	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	1	1	1	1	4	5
12	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Dinas Pol PP	1	1	1	1	4	5
13	Pengembangan Kebudayaan	Pariwisata	1	1	0	1	3	4
14	Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	DPKUKM	1	1	0	1	3	4
15	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha MIKRO (UMKM)	DPKUKM	1	1	1	1	4	5
16	Pengembangan UMKM	DPKUKM	1	1	1	1	4	5
17	Perencanaan dan Pembangunan Industri	DPKUKM	1	1	0	1	3	4
18	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian	1	1	1	1	4	5
19	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	1	1	1	1	4	5
20	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian	1	1	1	1	4	5
21	Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	1	1	1	4	5
22	Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	1	0	0	2	3
23	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian	1	1	0	0	2	3
24	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	1	1	0	1	3	4
25	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP	1	1	1	1	4	5
26	Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	1	1	1	1	4	5
27	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Karja	DPMPTSP	1	1	1	1	4	5
28	Penempatan Tenaga Kerja	DPMPTSP	1	1	1	1	4	5
29	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Upaya Kesehatan	Dinas Kesehatan	1	1	1	1	4	5
30	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Dinas Kesehatan	1	1	1	1	4	5
31	Program sediaan Farmasi, alat kesehatan danmakanan minuman	Dinas Kesehatan	1	1	1	1	4	5
32	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	1	1	1	1	4	5

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				Nilai	Bobot
			Sorotan Masyarakat	Isu Nasional	Layanan Publik	Hajat Hidup Orang Banyak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	Dispora	1	1	1	0	3	4
34	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Dispora	1	1	1	0	3	4
35	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepramukaan	Dispora	1	1	1	0	3	4
36	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Dalduk & KB	1	1	1	0	3	4
37	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Dalduk & KB	1	1	1	0	3	4
38	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Dalduk & KB	1	1	1	0	3	4
39	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	1	1	1	1	4	5
40	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan	1	1	1	1	4	5
41	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	1	1	1	1	4	5
42	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	1	1	4	5
43	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	1	1	4	5
44	Program Pengelolaa Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	1	1	4	5
45	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	1	1	1	1	4	5
46	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	1	1	1	1	4	5
47	program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	1	1	1	1	4	5
48	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	Dinas Sosial	0	0	1	0	1	2
49	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial	1	1	1	1	4	5
50	Program Pengeloaan Taman Makam Pahlawan	DInas Sosial	1	0	1	0	2	3
51	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS)	Dinas Dalduk dan KB	1	1	1	1	4	5
52	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	1	1	1	4	5
53	Program Perlindungan Perempuan	DPPPA	1	1	1	1	4	5
54	Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPA	1	1	1	1	4	5
55	Program Pengerusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	DPMPPA	1	0	0	1	2	3
56	Program Peningkatan kualitas keluarga	DPMPPA	1	1	1	1	4	5
57	Program Pengelolaan sistem data gender dan anak	DPMPPA	1	1	1	1	4	5
58	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPMPPA	1	1	1	1	4	5
59	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat, dan	DPMPPA	1	1	1	1	4	5
60	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR	1	1	1	1	4	5
61	Program Pembinaan dan pengawasn terhadap izin lingkungan dan izin	Dinas LH	1	1	1	1	4	5
62	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Dinas LH	1	1	1	1	4	5
63	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR	1	1	1	1	4	5
64	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Dinas Perkim	1	1	1	1	4	5
65	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR	1	1	1	1	4	5
66	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR	1	1	1	1	4	5
67	Program pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah	Dinas PUPR	1	1	1	1	4	5
68	Program peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)	Dinas Perkim	1	0	1	1	3	4
69	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil	1	1	1	1	4	5
70	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil	1	1	1	1	4	5

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				Nilai	Bobot
			Sorotan Masyarakat	Isu Nasional	Layanan Publik	Hajat Hidup Orang Banyak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil	1	1	1	1	4	5
72	Program pengelolaan profil kependudukan	Dinas Dukcapil	0	0	1	0	1	2
73	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	0	1	1	0	2	3
74	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	0	1	1	0	2	3
75	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA	1	1	1	1	4	5
76	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	BAPPEDA	1	1	1	1	4	5
77	Program pengelolaan keuangan daerah	BKD	1	1	0	0	2	3
78	Program pengelolaan barang milik daerah	BKD	1	1	0	0	2	3
79	Program pengelolaan pendapatan daerah	BKD	1	1	1	0	3	4
80	Program penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat	1	1	0	0	2	3
81	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Inspektorat	0	1	0	0	1	2
82	Penataan Organisasi	Organisasi/Setda	0	1	1	0	2	3
83	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kesra	1	1	1	1	4	5
84	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda/Pereonomian	1	1	1	0	3	4

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: TINDAK LANJUT TEMUAN, POTENSI FRAUD & KASUS HUKUM
PEMERINTAH KOTA SOLOK

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				Nilai	Bobot
			Penyelesaian Temuan Auditor Internal ≤ 95%	Penyelesaian Temuan Auditor Eksternal ≤ 90%	Potensi Fraud	Kasus Hukum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kesra/Setda	0	0	0	0	0	1
2	Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Kesbangpol	0	0	0	0	0	1
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol	0	0	0	0	0	1
4	Program Koordinasi dan Pembinaan pencegahan bahaya narkoba dan miras	Kesbangpol	0	0	0	0	0	1
5	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol	0	0	0	0	0	1
6	Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Kesbangpol	0	0	0	0	0	1
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol	0	0	1	0	1	2
8	Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Kesbangpol	0	0	0	0	0	1
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	1	1	1	0	3	4
10	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan	1	1	0	0	2	3
11	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	1	1	1	0	3	4

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				Nilai	Bobot
			Penyelesaian Temuan Auditor Internal ≤ 95%	Penyelesaian Temuan Auditor Eksternal ≤ 90%	Potensi Fraud	Kasus Hukum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Dinas Pol PP	0	1	1	0	2	3
13	Pengembangan Kebudayaan	Pariwisata	0	1	1	0	2	3
14	Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	DPKUKM	1	1	1	0	3	4
15	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha MIKRO (UMKM)	DPKUKM	1	1	0	0	2	3
16	Pengembangan UMKM	DPKUKM	1	1	1	0	3	4
17	Perencanaan dan Pembangunan Industri	DPKUKM	1	1	1	0	3	4
18	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian	0	1	1	0	2	3
19	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	0	1	1	0	2	3
20	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian	0	0	1	0	1	2
21	Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	0	0	1	0	1	2
22	Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	1	0	0	2	3
23	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian	0	0	0	0	0	1

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				Nilai	Bobot
			Penyelesaian Temuan Auditor Internal ≤ 95%	Penyelesaian Temuan Auditor Eksternal ≤ 90%	Potensi Fraud	Kasus Hukum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	0	0	0	0	0	1
25	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP	0	0	0	0	0	1
26	Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	0	0	1	0	1	2
27	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Karja	DPMPTSP	0	0	1	0	1	2
28	Penempatan Tenaga Kerja	DPMPTSP	0	1	1	0	2	3
29	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	1	1	0	0	2	3
30	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Dinas Kesehatan	1	1	0	0	2	3
31	Program sediaan Farmasi, alat kesehatan danmakanan minuman	Dinas Kesehatan	1	1	0	0	2	3
32	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	1	1	0	0	2	3
33	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	Dispora	1	1	0	0	2	3
34	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Dispora	1	1	0	0	2	3
35	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepramukaan	Dispora	1	1	1	0	3	4

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				Nilai	Bobot
			Penyelesaian Temuan Auditor Internal ≤ 95%	Penyelesaian Temuan Auditor Eksternal ≤ 90%	Potensi Fraud	Kasus Hukum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Dalduk & KB	0	0	1	0	1	2
37	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Dalduk & KB	0	0	1	0	1	2
38	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Dalduk & KB	0	0	0	0	0	1
39	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	1	1	0	0	2	3
40	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan	1	1	0	0	2	3
41	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	1	1	1	0	3	4
42	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	1	0	3	4
43	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	0	0	2	3
44	Program Pengelolaa Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	0	0	0	1
45	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	0	0	1	0	1	2
46	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	0	0	1	0	1	2
47	program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	0	0	1	0	1	2

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				Nilai	Bobot
			Penyelesaian Temuan Auditor Internal ≤ 95%	Penyelesaian Temuan Auditor Eksternal ≤ 90%	Potensi Fraud	Kasus Hukum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	1
49	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial	0	0	0	0	0	1
50	Program Pengeloaan Taman Makam Pahlawan	DInas Sosial	0	0	0	0	0	1
51	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS)	Dinas Dalduk dan KB	0	0	0	0	0	1
52	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	0	0	0	1	2
53	Program Perlindungan Perempuan	DPPPA	0	0	0	0	0	1
54	Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPA	0	0	0	0	0	1
55	Program Pengerusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	DPMPPA	0	0	0	0	0	1
56	Program Peningkatan kualitas keluarga	DPMPPA	0	0	0	0	0	1
57	Program Pengelolaan sistem data gender dan anak	DPMPPA	0	0	0	0	0	1
58	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPMPPA	0	0	0	0	0	1
59	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	DPMPPA	0	0	0	0	0	1

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				Nilai	Bobot
			Penyelesaian Temuan Auditor Internal ≤ 95%	Penyelesaian Temuan Auditor Eksternal ≤ 90%	Potensi Fraud	Kasus Hukum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
60	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR	1	0	1	0	2	3
61	Program Pembinaan dan pengawasn terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Dinas LH	0	1	1	0	2	3
62	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Dinas LH	1	1	1	0	3	4
63	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR	1	1	1	0	3	4
64	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Dinas Perkim	1	1	1	0	3	4
65	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR	1	1	1	0	3	4
66	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR	1	1	1	0	3	4
67	Program pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah	Dinas PUPR	1	1	1	0	3	4
68	Program peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)	Dinas Perkim	1	1	1	0	3	4
69	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil	1	1	1	0	3	4
70	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil	1	1	1	0	3	4

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	KRITERIA				Nilai	Bobot
			Penyelesaian Temuan Auditor Internal ≤ 95%	Penyelesaian Temuan Auditor Eksternal ≤ 90%	Potensi Fraud	Kasus Hukum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
71	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil	0	0	0	0	0	1
72	Program pengelolaan profil kependudukan	Dinas Dukcapil	0	0	0	0	0	1
73	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	0	0	0	0	0	1
74	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	0	0	0	0	0	1
75	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA	0	1	0	0	1	2
76	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	BAPPEDA	0	0	0	0	0	1
77	Program pengelolaan keuangan daerah	BKD	0	0	0	0	0	1
78	Program pengelolaan barang milik daerah	BKD	1	0	0	0	1	2
79	Program pengelolaan pendapatan daerah	BKD	1	1	0	0	2	3
80	Program penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat	0	1	0	0	1	2
81	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Inspektorat	0	0	0	0	0	1
82	Penataan Organisasi	Organisasi/Setda	0	0	0	0	0	1
83	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kesra	0	0	0	0	0	1
84	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda/Pereonomian	0	0	0	0	0	1

PERTIMBANGAN MANAJEMEN: KETERKAITAN DENGAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PEMDA, RPJMN, DAN YANG TERMASUK SEKTOR UNGGULAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SOLOK

NO	PROGRAM	NAMA OPD PENGAMPU UTAMA URUSAN	TERKAIT LANGSUNG DENGAN TUJUAN/ SASARAN RPJMD	PROGRAM MENDUKUNG RPJMN	SEKTOR UNGGULAN	NILAI	BOBOT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kesra/Setda	1	1	1	3	5
2	Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Kesbangpol	1	1	0	2	3
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol	1	1	1	3	4
4	Program Koordinasi dan Pembinaan pencegahan bahaya narkoba dan	Kesbangpol	1	1	1	3	5
5	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol	1	1	0	2	3
6	Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Kesbangpol	1	1	0	2	3
7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbangpol	1	1	0	2	3
8	Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak kriminal	Kesbangpol	1	1	0	2	3
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	1	1	1	3	5
10	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan	1	1	1	3	5
11	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	1	1	1	3	5
12	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Dinas Pol PP	1	1	0	2	3
13	Pengembangan Kebudayaan	Pariwisata	1	1	1	3	5

14	Meningkatkan Sarana Distribusi Perdagangan	DPKUKM	1	1	1	3	5
15	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha MIKRO (UMKM)	DPKUKM	1	1	1	3	5
16	Pengembangan UMKM	DPKUKM	1	1	1	3	5
17	Perencanaan dan Pembangunan Industri	DPKUKM	1	1	1	3	5
18	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian	1	1	1	3	4
19	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian	1	1	1	3	4
20	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian	1	1	0	2	3
21	Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	1	1	3	4
22	Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	1	1	1	3	4
23	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian	1	1	0	2	3
24	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	1	1	1	3	4
25	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP	1	1	1	3	4
26	Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	1	1	1	3	4
27	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Karja	DPMPTSP	1	1	1	3	4
28	Penempatan Tenaga Kerja	DPMPTSP	1	1	1	3	4
29	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	1	1	1	3	5

30	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Dinas Kesehatan	1	1	1	3	5
31	Program sediaan Farmasi, alat kesehatan danmakanan minuman	Dinas Kesehatan	1	1	1	3	5
32	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	1	1	1	3	5
33	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Keolahragaan	Dispora	1	1	0	2	5
34	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Dispora	1	1	0	2	3
35	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepramukaan	Dispora	1	1	0	2	3
36	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Dalduk & KB	1	1	0	2	3
37	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Dalduk & KB	1	1	0	2	3
38	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas Dalduk & KB	1	1	0	2	3
39	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	1	1	0	2	5
40	Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan	1	1	0	2	5
41	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	1	1	0	2	5
42	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	0	2	3
43	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	1	3	4
44	Program Pengelolaa Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	0	2	3
45	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	1	1	0	2	3

46	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	1	1	0	2	3
47	program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	1	1	0	2	3
48	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	Dinas Sosial	0	0	0	0	3
49	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial	1	1	0	2	3
50	Program Pengeloaan Taman Makam Pahlawan	DInas Sosial	1	1	0	2	3
51	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS)	Dinas Dalduk dan KB	1	1	0	2	3
52	Program Pengembangan Kapasitas Daya saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	1	1	3	5
53	Program Perlindungan Perempuan	DPPPA	1	1	1	3	4
54	Program Perlindungan Khusus Anak	DPPPA	1	1	0	2	3
55	Program Pengerusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	DPMPPA	1	1	0	2	3
56	Program Peningkatan kualitas keluarga	DPMPPA	1	1	0	2	3
57	Program Pengelolaan sistem data gender dan anak	DPMPPA	1	1	0	2	3
58	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPMPPA	1	1	0	2	3
59	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	DPMPPA	1	1	1	3	5
60	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR	1	1	0	2	5
61	Program Pembinaan dan pengawasn terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Dinas LH	1	1	0	2	3
62	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Dinas LH	1	1	0	2	3

63	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR	1	1	0	2	5
64	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Dinas Perkim	1	1	1	3	4
65	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR	1	1	1	3	5
66	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR	1	1	1	3	4
67	Program pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah	Dinas PUPR	1	1	0	2	3
68	Program peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)	Dinas Perkim	1	1	1	3	4
69	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil	1	1	1	3	5
70	Program Pencatatan Sipil	Dinas Dukcapil	1	1	0	2	3
71	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil	1	1	0	2	3
72	Program pengelolaan profil kependudukan	Dinas Dukcapil	0	0	0	0	3
73	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	1	1	0	2	3
74	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	1	1	0	2	3
75	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA	1	1	0	2	3
76	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	BAPPEDA	1	1	0	2	3
77	Program pengelolaan keuangan daerah	BKD	1	1	0	2	3
78	Program pengelolaan barang milik daerah	BKD	1	1	0	2	5

79	Program pengelolaan pendapatan daerah	BKD	1	1	0	2	3
80	Program penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat	1	1	0	2	3
81	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Inspektorat	1	1	0	2	3
82	Penataan Organisasi	Organisasi/Setda	1	1	0	2	3
83	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kesra	1	1	0	2	3
84	Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda/Pereonomian	1	1	0	2	3